



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) TAHUN 2025-2029



Prepared By :



**TKPK KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Jalan Mustafa Kemal No. 1
Telephone/Faximile (0727) 322 177
Kalianda - Lampung Selatan



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR **20** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional yang dapat menghambat pembangunan dan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, yang membutuhkan langkah-langkah penanganan secara komprehensif dan terintegrasi, guna meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, serta memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, demi mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2030.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025–2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah program percepatan kemiskinan yang dilakukan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
13. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan.
14. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja untuk menanggulangi kemiskinan secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Aksi Tahunan, selanjutnya disingkat RAT adalah dokumen dari RPKD untuk periode 1 (satu) tahunan.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2030 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dan operasional bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi dasar acuan bagi perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta mitra pembangunan lainnya dalam mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan.

Pasal 3

Tujuan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 - 2030 adalah guna mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan mensinergikan kegiatan dan tindakan konkret dari semua pihak atau multipihak serta berfungsi sebagai :

- a. mempercepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan akar penyebab kemiskinan diwilayah Kabupaten Lampung Selatan secara komprehensif dan berbasis data yang akuran dan terkini;
- c. merumuskan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang responsif terhadap kondisi lokal dan sejalan dengan kebijakan nasional serta provinsi;
- d. meningkatkan efektivitas koordinasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan;
- e. memastikan keterpaduan intervensi program penanggulangan kemiskinan baik dalam hal perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, maupun pengurangan beban pengeluaran Masyarakat miskin;
- f. mendorong peran aktif masyarakat, dunia usaha dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung Upaya penghapusan kemiskinan dan Pembangunan yang inklusif; dan
- g. menyediakan kerangka pemantauan dan evaluasi terhadap capaian penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses pebaikan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pasal 4

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030, memiliki sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran Umum;
- c. profil Kemiskinan;
- d. prioritas Program;
- e. lokasi Prioritas; dan
- f. penutup.

BAB II PROGRAM AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 - 2030.
- (2) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2030, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
- (2) Susunan personalia TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penanggung jawab : Bupati Lampung Selatan
 - b. ketua : Wakil Bupati Lampung Selatan
 - c. wakil ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - d. sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - e. wakil sekretaris :
 - 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 - f. kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga
 - 1. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Anggota :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

- c) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 - d) Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
 - e) Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Lampung Selatan
 - f) Badan Urusan Logistik
 - g) Media
- g. Kelompok Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- 1. Koordinator : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Anggota :
 - a) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
 - b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
 - c) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
 - d) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
 - e) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
 - f) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
 - g) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
 - h) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
 - i) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
 - j) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
 - k) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
 - l) Bank Lampung
 - m) Perempuan Anak Lingkungan Usaha Mikro dan Agribisnis (PALUMA)
 - n) Kadin Kabupaten Lampung Selatan
 - o) Perusahaan Umum Daerah Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan
 - p) Universitas Muhammadiyah Kalianda
- h. Sekretariat
- 1. Kepala : Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 3. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - b) Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

- c) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - d) Fungsional Perencana Bindang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - e) Unsur Staf Pelaksana PNS pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - f) Unsur Pelaksana Non PNS (THLS) pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- (3) Susunan personalia TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dilakukan dengan mengikuti sertakan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. partisipasi dalam forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
 - b. pemberdayaan masyarakat yang termasuk dalam masyarakat miskin dan miskin ekstrem; dan
 - c. keterlibatan dalam pengumpulan dan validasi data terkait masyarakat miskin dan rentan miskin di lingkungan tempat tinggalnya.

BAB V FASILITASI

Pasal 8

- (1) Bupati menyelenggarakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
- (2) Penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - b. keterlibatan multisektor dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
 - c. monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
 - d. kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan; dan
 - e. pemberian bantuan bagi masyarakat termasuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.

Pasal 9

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengentasan kemiskinan daerah.

BAB VI MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan program pengentasan kemiskinan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Daerah dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target anggaran dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

Pasal 11

Kepala Daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur Selaku Ketua TKPK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiasaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiasaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan atau produk hukum yang telah ditetapkan terkait dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 JULI 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

 RADITYO EGKI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 JULI 2025

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

 SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2030**

NARASI

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2030**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	10
2.1 Aspek Geografi	10
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	10
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografi	12
2.1.3 Topografi.....	12
2.1.4 Geohidrologi.....	15
2.1.5 Klimatologi.....	17
2.1.6 Resiko Dampak Bencana	19
2.1.7 Penggunaan Lahan dan Kawasan	48
2.2 Demografi.....	58
2.2.1 Jumlah Penduduk	58
2.2.2 Sebaran Penduduk	59
2.2.3 Kepadatan Penduduk.....	60
2.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	61
2.2.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk.....	62
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH	63
3.1 Kondisi Kemiskinan Makro	65
3.2 Kondisi Sosial Kesejahteraan Penduduk.....	71
3.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	76

3.2.2 Bidang Kesehatan	78
3.2.3 Bidang Pendidikan	84
3.2.4 Bidang Ekonomi	93
3.2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan	98
3.2.6 Bidang Infrastruktur	99
3.3 Proyeksi Kemiskinan	106
BAB IV PRIORITAS PROGRAM.....	121
BAB V LOKASI PRIORITAS	184
BAB VI PENUTUP	186

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	10
Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung	17
Tabel 2.3 Kawasan Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana Kabupaten Lampung Selatan	21
Tabel 2.4 Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Selatan	26
Tabel 2.5 Resiko Banjir Kabupaten Lampung Selatan	30
Tabel 2.6 Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Selatan	33
Tabel 2.7 Resiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan	35
Tabel 2.8 Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	39
Tabel 2.9 Kelas Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lampung Selatan	41
Tabel 2.10 Kelas Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan	44
Tabel 2.11 Kelas Resiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Lampung Selatan	47
Tabel 2.12 Persentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan	52
Tabel 2.13 Luasan Daya Tampung Lahan Per Kecamatan	53
Tabel 2.14 Daya Dukung Air Permukaan.....	54
Tabel 2.15 Luasan Klasifikasi Fungsi Penyediaan Air Bersih	55
Tabel 2.16 Daya Dukung Pangan	57
Tabel 2.17 Luasan Klasifikasi Fungsi Penyediaan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan	57
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan	59
Tabel 2.19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan.....	60
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan.....	61
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan	65
Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan....	73
Tabel 3.3 <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	79
Tabel 3.4 Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024	82

Tabel 3.5 Capaian SPM Bidang Kesehatan	83
Tabel 3.6 Capaian SPM Bidang Pendidikan	84
Tabel 3.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020-2024.....	90
Tabel 3.8 Angka Putus Sekolah dai per 10.000 Murid	91
Tabel 3.9 PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah)	93
Tabel 3.10 PDRB Per Kapita	96
Tabel 3.11 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	97
Tabel 3.12 Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender	98
Tabel 3.13 Panjang Jalan Kabupaten Lampung Selatan	100
Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	101
Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	103
Tabel 4.1 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2030	122
Tabel 5.1 Lokus Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Dimensi Aksesibilitas, Infrastruktur, Pelayanan Dasar dan Kesulitan Geografis	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi	12
Gambar 2.2 Peta Topografi	14
Gambar 2.3 Peta Geologi	17
Gambar 2.4 Peta Iklim.....	19
Gambar 2.5 Peta Potensi Rawan Bencana	20
Gambar 2.6 Peta Kerawanan Bencana BNPB.....	22
Gambar 2.7 Peta Resiko Gempa Bumi.....	26
Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Banjir	29
Gambar 2.9 Peta Resiko Banjir	30
Gambar 2.10 Peta Potensi Tsunami.....	32
Gambar 2.11 Peta Resiko Tsunami.....	33
Gambar 2.12 Peta Resiko Cuaca Ekstrem	35
Gambar 2.13 Peta Resiko Kekeringan.....	38
Gambar 2.14 Peta Resiko Tanah Longsor	41
Gambar 2.15 Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan	43
Gambar 2.16 Peta Resiko Gunung Api.....	46
Gambar 2.17 Peta Tutupan Lahan	49
Gambar 2.18 Peta Kawasan Pertanian.....	50
Gambar 2.19 Peta Kawasan Peruntukan Industri.....	51
Gambar 2.20 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air	56
Gambar 3.1 Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut.....	13
Grafik 2.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten	13
Grafik 2.3 Distribusi Penduduk Lampung Selatan.....	60
Grafik 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	62
Grafik 3.1 Analisis Persentase Penduduk Miskin (P0)	66
Grafik 3.2 Analisis Jumlah Penduduk Miskin.....	67
Grafik 3.3 Analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	68
Grafik 3.4 Analisis Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	70
Grafik 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	77
Grafik 3.6 Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan	78
Grafik 3.7 Kepesertaan Jaminan Kesehatan	80
Grafik 3.8 Kelahiran di Fasilitas Kesehatan.....	81
Grafik 3.9 Angka Harapan Hidup	82
Grafik 3.10 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024	86
Grafik 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	87
Grafik 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM).....	89
Grafik 3.13 Angka Melek Huruf.....	92
Grafik 3.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi	94
Grafik 3.15 Laju Inflasi.....	95
Grafik 3.16 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	100
Grafik 3.17 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Airminum Laya, Perkotaan dan Perdesaan	102
Grafik 3.18 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	104
Grafik 3.19 Rumah Tidak Layak Huni	105

Grafik 3.20 Proyeksi Persentase Kemiskinan	107
Grafik 3.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025-2030	108
Grafik 3.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2025-2030	109
Grafik 3.23 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2025-2030	110
Grafik 3.24 Usia Harapan Hidup 2025-2030	112
Grafik 3.25 Indeks Resiko Bencana 2025-2030	113
Grafik 3.26 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2025-2030	114
Grafik 3.27 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Tahun 2025-2030	115
Grafik 3.28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030	116
Grafik 3.29 Indek Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030	117
Grafik 3.30 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	118
Grafik 3.31 Inflasi 2025-2030.....	118
Grafik 3.32 PDRB Perkapita 2025-2030	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan minimnya pendapatan, sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan pokok menjadi sangat sulit bagi golongan masyarakat miskin. Kemiskinan menjadi suatu masalah yang sangat kompleks dimana untuk menanggulanginya harus menentukan solusi dan strategi yang tepat dan berkesinambungan (Ikejiaku, 2009). (Ozughalu, 2016) mengatakan bahwa kemiskinan menjadi tantangan bagi suatu negara dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu negara (Kuncoro, 2015).

Pendapat Lain Kemiskinan menurut Sach dalam Amir (2007) ditandai atau tidak dimilikinya: (1) human capital (kesehatan, pendidikan dan nutrisi yang baik); (2) bussines capital; (3) infrastructure (jalan, listrik, air bersih, sanitasi, perlindungan lingkungan dan sarana publik lainnya); (4) natural capital; (5) public institutional capital (administrasi public yang dikelola dengan baik, sistem pengadilan yang bersih dan polisi yang baik); dan (6) knowledge capital (modal ilmu pengetahuan). Permasalahan yang tidak bisa dihindari oleh suatu daerah, tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan-pelayanan tentu sangat tinggi karena sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduknya dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya penanggulangan kemiskinan, sebagai bagian dari

perencanaan pembangunan wilayah, memerlukan dasar studi ilmiah yang kuat serta analisis yang tepat. Hal ini penting agar dapat dirumuskan langkah-langkah dan tindakan nyata dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang kemudian telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Lebih lanjut, pada tahun 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. RPKD diperlukan untuk memastikan indikator-indikator yang terkait didalamnya menjadi prioritas dalam rencana intervensi yang disusun oleh pemerintah daerah. Prioritas penanganan permasalahan di setiap daerah juga berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut, menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan amanat yang perlu ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan, guna mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang relevan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di daerah. Hal ini sejalan dengan pembentukan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/5.1/V.01/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan intervensi kebijakan yang berbasis bukti dan kebutuhan nyata masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Melihat kondisi tersebut maka dibutuhkan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan. Dokumen RPKD diharapkan menjadi acuan dan pedoman untuk mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dalam proses perencanaan dan penganggaran baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, selain itu RPKD juga diharapkan mampu meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung Selatan untuk bersama-sama bersinergi dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2030 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dan operasional bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dokumen ini menjadi dasar acuan bagi perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta mitra pembangunan lainnya dalam

mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan. Tujuan Penyusunan RPKD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030 bertujuan untuk:

1. Mempercepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Mengidentifikasi permasalahan dan akar penyebab kemiskinan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan secara komprehensif dan berbasis data yang akurat dan terkini
3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang responsif terhadap kondisi lokal dan sejalan dengan kebijakan nasional serta provinsi
4. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan
5. Memastikan keterpaduan intervensi program penanggulangan kemiskinan baik dalam hal perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, maupun pengurangan beban pengeluaran Masyarakat miskin
6. Mendorong peran aktif Masyarakat, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung upaya penghapusan kemiskinan dan pembangunan yang inklusif
7. Menyediakan kerangka pemantauan dan evaluasi terhadap capaian penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2030 disusun sebagai acuan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Ruang lingkup dokumen ini mencakup beberapa aspek utama, sebagai berikut:

1. RPKD Kabupaten Lampung Selatan berisi tentang analisis terhadap kondisi umum wilayah, identifikasi profil kemiskinan, penentuan program dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun mulai 2025 hingga 2030.

2. RPKD disusun bersama dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
3. RPKD dilakukan melalui strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.
 - a) Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta, sinergi kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
 - b) RPKD memfokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan umum (multidimensi) berdasarkan indikator makro dan mikro, kemiskinan ekstrem sebagaimana didefinisikan dalam arahan nasional, kerentanan terhadap kemiskinan akibat kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan bencana
 - c) Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas program bantuan sosial dan jaminan sosial berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, serta program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa dan pihak swasta serta lembaga lainnya
4. Dokumen ini menggunakan pendekatan:
 - a. **Partisipatif**, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat miskin
 - b. **Berbasis data**, dengan memanfaatkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

- c. **Lintas Sektor dan Lintas Aktor**, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, Non-Governmental Organization dan media
- 5. RKPD menjadi bagian dari dokumen RPJMD

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/59/V.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
16. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/537/V.01/HK/2024 tentang Lokasi Prioritas Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan;
17. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/591/V.01/HK/2024 tentang penetapan data P3KE Kabupaten Lampung Selatan;

18. Surat Edaran Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan;
19. Surat Edaran Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Cek Bantuan Langsung Kemiskinan Secara Online dan Pemutakhiran Data Mandiri Kabupaten Lampung Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi
 - 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi
 - 2.1.2 Letak dan Kondisi Geografi
 - 2.1.3 Topografi
 - 2.1.4 Geohidrologi
 - 2.1.5 Klimatologi
 - 2.1.6 Resiko Dampak Bencana
 - 2.1.7 Penggunaan Lahan dan Kawasan
- 2.2 Demografi
 - 2.2.1 Jumlah Penduduk
 - 2.2.2 Sebaran Penduduk
 - 2.2.3 Kepadatan Penduduk
 - 2.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 - 2.2.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1 Kondisi Kemiskinan Makro
 - 3.1.1 Persentase Penduduk Miskin
 - 3.1.2 Jumlah Penduduk Miskin
 - 3.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
 - 3.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
- 3.2 Kondisi Sosial Kesejahteraan Penduduk
 - 3.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 3.2.2 Bidang Kesehatan
 - 3.2.3 Bidang Pendidikan
 - 3.2.4 Bidang Ekonomi
 - 3.2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 3.2.6 Bidang Infrastruktur
- 3.3 Proyeksi Kemiskinan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

BAB V LOKASI PRIORITAS

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Selatan memiliki posisi geografis yang strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa melalui Selat Sunda. Lokasi ini tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga memainkan peran vital dalam koneksi antarwilayah, arus barang dan jasa, serta mobilitas penduduk antara dua pulau besar di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah ini memiliki luas sekitar 2.227 km² dan terdiri dari beragam bentang alam mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga wilayah pesisir dan kepulauan kecil. Keberagaman kondisi geografis ini menjadikan Lampung Selatan sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar.

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung dengan ibukota kabupaten di Kalianda. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah sebesar 2.227,38 Km² yang tersebar ke dalam 17 kecamatan, 4 kelurahan dan 256 desa. Wilayah terluas adalah Kecamatan Natar sebesar 261,08 Km², sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Way Panji dengan luas wilayah sebesar 36,75 Km². Secara rinci data kecamatan dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Km ²	Persentase
1	Kecamatan Bakauheni	60,15	2,70%
2	Kecamatan Candipuro	122,62	5,51%
3	Kecamatan Jati Agung	250,18	11,23%
4	Kecamatan Kalianda	176,00	7,90%
5	Kecamatan Katibung	161,97	7,27%
6	Kecamatan Ketapang	143,46	6,44%
7	Kecamatan Merbau Mataram	130,09	5,84%
8	Kecamatan Natar	261,08	11,72%
9	Kecamatan Palas	128,26	5,76%
10	Kecamatan Panengahan	106,30	4,77%

11	Kecamatan Rajabasa	120,96	5,43%
12	Kecamatan Sidomulyo	132,74	5,96%
13	Kecamatan Sragi	87,82	3,94%
14	Kecamatan Tanjung Bintang	165,94	7,45%
15	Kecamatan Tanjung Sari	96,29	4,32%
16	Kecamatan Way Panji	36,75	1,65%
17	Kecamatan Way Sulan	46,77	2,10%
	Kabupaten Lampung Selatan	2.227,38	100%

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, diolah

Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas beberapa pulau. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau: Krakatau, Sebesi, Sebuku, Rakata Tua, Legundi, Siuncal, Rimau dan Kandang. Bila ditinjau dari segi luas keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang lagi. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali. Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang ke dua berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Agustus 2007, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung serta Teluk Lampung;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa

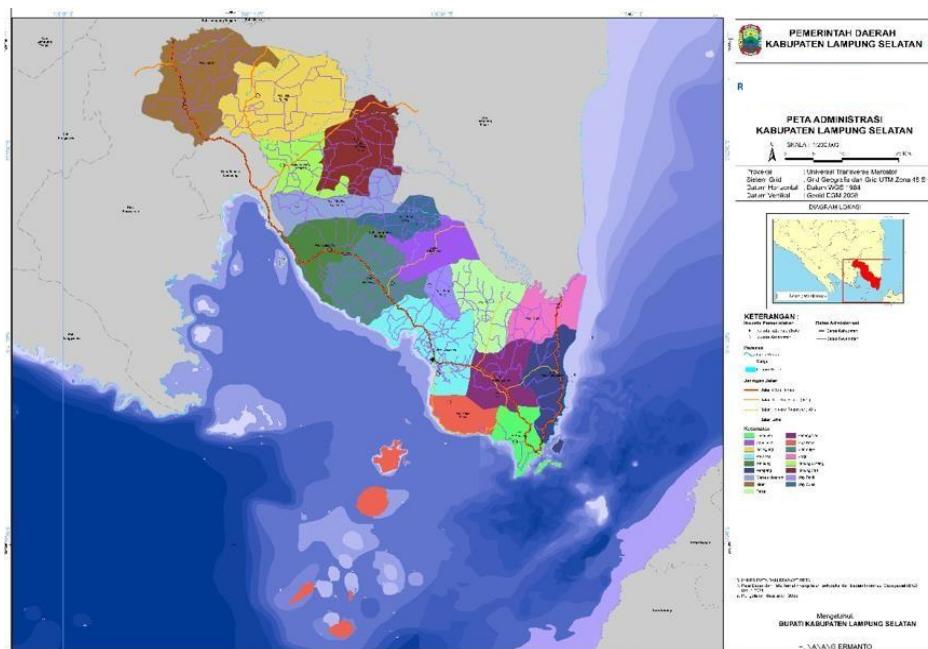
Terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II yang merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah lainnya ke Sumatera dan sebaliknya, atau dengan kata lain Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini

dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk mengetahui wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada peta di bawah ini.

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota di Kecamatan Kalianda. Secara astronomis Kabupaten Lampung Selatan terletak pada $105^{\circ}14'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15'-6^{\circ}$ Lintang Selatan, di ujung Pulau Sumatera. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Selatan

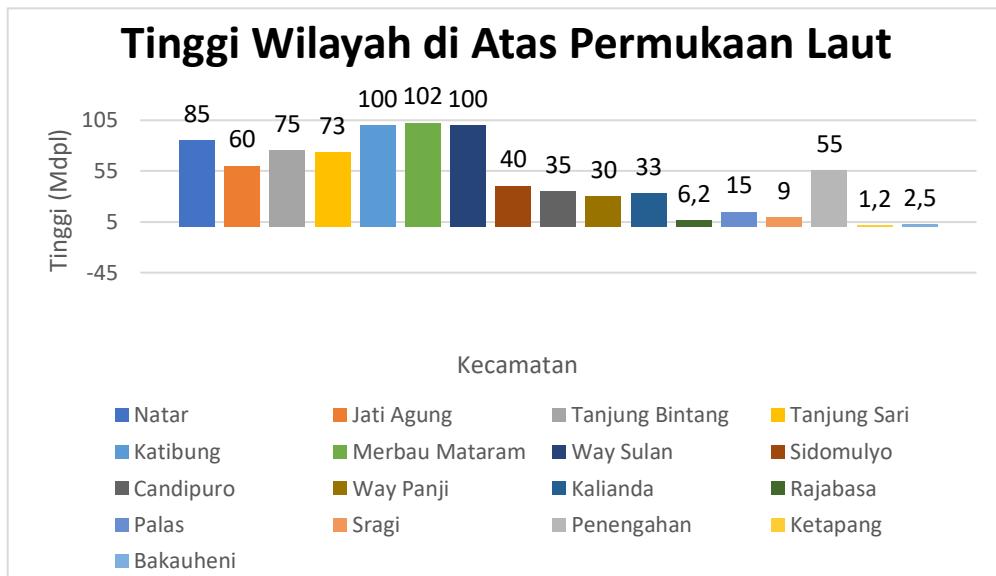


2.1.3. Topografi

Secara umum, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Berdasarkan Gambar 2.1 dibawah. terlihat bahwa daerah dataran tertinggi berada di Kecamatan Merbau Mataram dengan ketinggian 102 meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan Natar dan Kecamatan Katibung sebagai wilayah terbesar berada pada ketinggian masing-masing 85 mdpl dan 100 mdpl. Sedangkan kecamatan dengan dataran terendah yaitu Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni yang berada di bawah 3 mdpl.

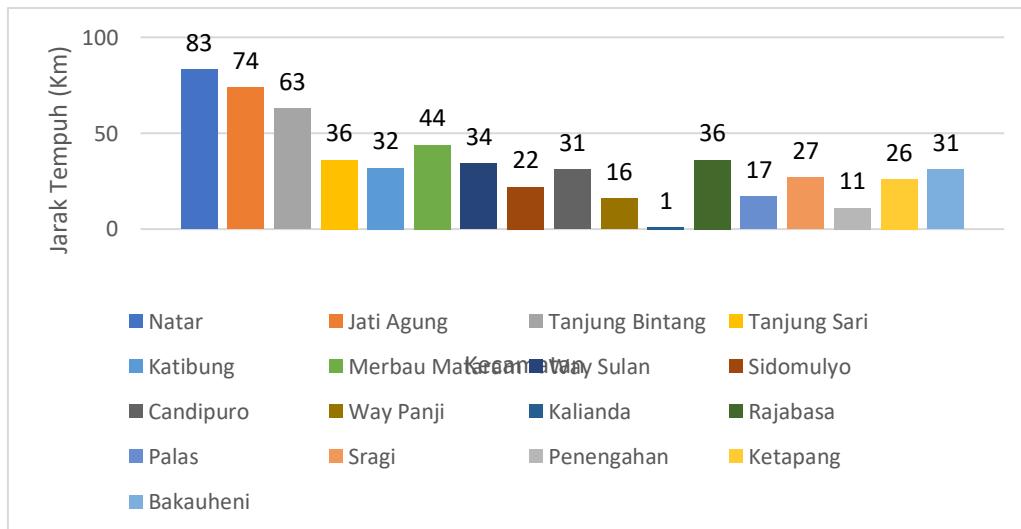
Sementara, Kecamatan Kalianda sebagai ibukota pemerintahan berada pada 33 mdpl. Berdasarkan ketinggian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan beriklim panas. Berikut disajikan secara lengkap tinggi wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Grafik 2.1 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan



Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024*

Grafik 2.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten



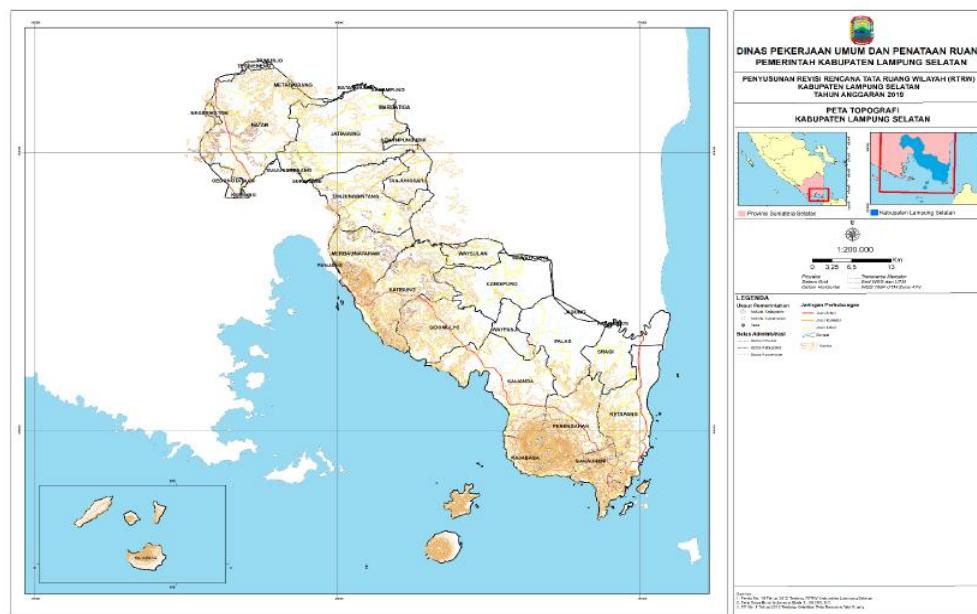
Sumber: *Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024*

Sementara itu, berdasarkan Gambar 2.2 jika dilihat dari jarak yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ke Ibukota Kabupaten, masyarakat yang berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, dan Kecamatan Tanjung Bintang harus menempuh jarak yang relatif jauh menuju ibukota kabupaten

dengan jarak tempuh antara 60-85 Km. Hal ini membuat masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama jika ingin mengurus sesuatu hal di ibu kota pemerintahan kabupaten yaitu Kecamatan Kalianda. Namun, saat ini telah beroperasi jalan tol lintas Sumatera yang melalui perlintasan beberapa wilayah di Lampung Selatan dari Kecamatan Bakauheni sampai Kecamatan Natar sehingga dapat memangkas waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten di Kecamatan Kalianda. Sedangkan jarak tempuh untuk masyarakat

Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Katibung, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Bakauheni ke Kalianda relatif lebih dekat, yaitu antara 30–60 Km. Sementara itu, Kecamatan Penengahan merupakan kecamatan terdekat dari ibukota pemerintahan hanya menempuh jarak 11 Km untuk mencapai ibukota pemerintahan.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan gambar 2.3. dapat dinyatakan bahwa Peta topografi Kabupaten Lampung Selatan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik spasial dan kondisi fisik wilayah kabupaten. Secara geografis, Lampung Selatan terletak di ujung

selatan Pulau Sumatra dan dikelilingi oleh perairan strategis seperti Teluk Lampung, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Wilayah ini memiliki kontur topografi yang bervariasi, mencakup dataran rendah, wilayah perbukitan, serta gugusan pulau-pulau vulkanik seperti Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku yang berada di bagian selatan. Berdasarkan peta, pola jaringan jalan nasional dan provinsi tampak membentang menghubungkan pusat-pusat kecamatan dari utara ke selatan, dengan konsentrasi aktivitas pembangunan yang lebih padat di wilayah selatan dan tengah, terutama di sekitar Kalianda sebagai pusat pemerintahan kabupaten.

Selain itu, peta ini juga menunjukkan penyebaran desa/kelurahan yang tersebar secara merata namun dengan kepadatan yang lebih tinggi di bagian selatan, mengindikasikan pusat pertumbuhan wilayah yang cenderung mengarah ke area pesisir dan pusat administrasi. Keberadaan jaringan sungai dan kawasan perbukitan turut memengaruhi pola pemukiman dan penggunaan lahan, sehingga aspek tata ruang harus mempertimbangkan potensi risiko bencana seperti banjir di dataran rendah dan erupsi vulkanik dari Gunung Anak Krakatau di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, pemanfaatan peta ini sangat penting dalam perencanaan ruang wilayah, penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur, serta mitigasi risiko kebencanaan di Kabupaten Lampung Selatan. Peta ini juga mendukung pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan yang memperhatikan aspek keterhubungan antarwilayah, kondisi geomorfologis, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat.

2.1.4 Geohidrologi

Kondisi Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kondisi Cekungan Air Tanah (CAT). Kondisi CAT Kabupaten Lampung Selatan, termasuk ke dalam dua cekungan yaitu CAT Metro-Kotabumi dan CAT Kalianda. CAT Metro-Kotabumi memiliki rata-rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 11.807.000.000 \text{ m}^3$ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan

aquifernya mencapai ± 524.000.000 m³ per tahunnya. CAT Metro-Kotabumi merupakan CAT yang dominan di Provinsi Lampung. Sedangkan CAT Kalianda memiliki rata-rata imbuhan air tanah bebas mencapai ± 128.000.000 m³ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya hanya ± 11.000.000 m³ per tahunnya. CAT Kalianda hanya merupakan CAT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan CAT Metro-Kotabumi.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- Tanah Latosol

Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-merahan adalah hasil pelapukan bahan induk kompleks turfinmedier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

- Tanah Podsolik

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolik berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.

- Tanah Andosol

Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk kompleks turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai hitam. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

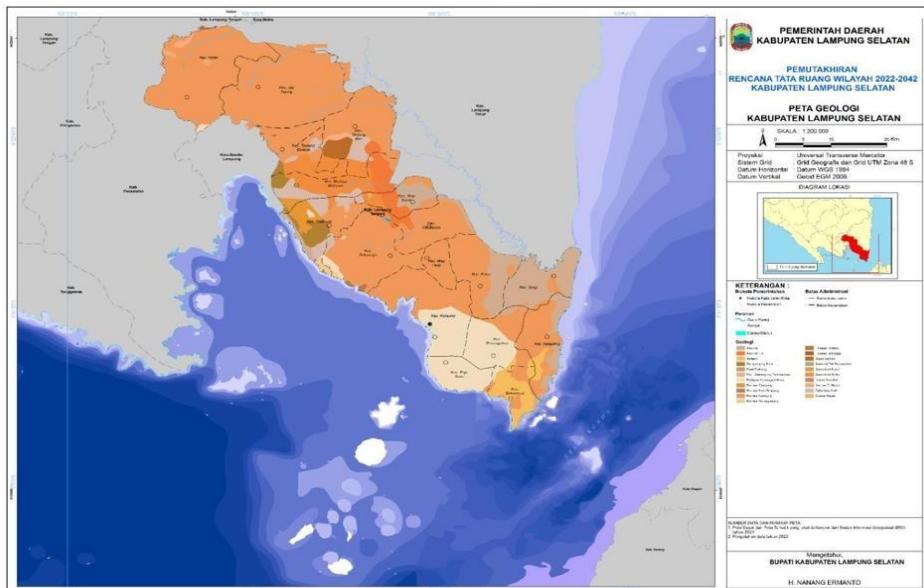
- Tanah Hidromorf

Tanah Hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

- Tanah Alluvial

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar.

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.5 Klimatologi

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Secara rinci, pengamatan unsur iklim di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung

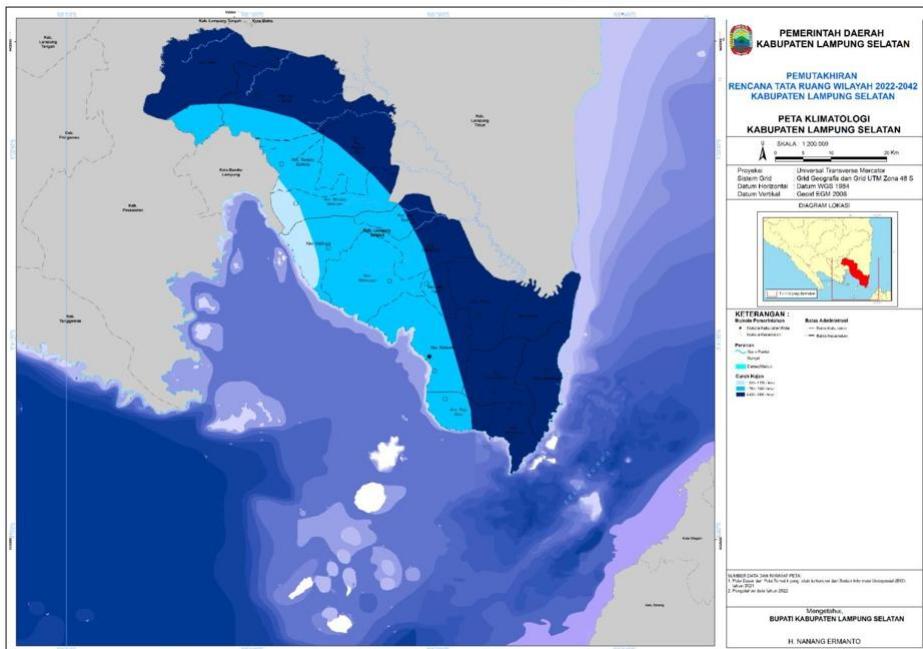
Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	26,5	82,6	2,4	999,7	343,2	22	2,9
Februari	26,5	82,3	2,8	999,8	193,3	21	3,0
Maret	26,7	83,6	2,7	1000,5	292,4	21	5,4
April	27,8	77,3	2,9	999,3	70,9	8	6,3
Mei	28,1	79,8	2,9	1000,5	185,4	12	6,0

Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Juni	27,4	81,7	2,9	1000,4	123,2	11	5,4
Juli	27,1	79,7	3,0	1001,3	195,4	9	5,0
Agustus	27,2	76,3	3,8	1001,9	47,5	4	7,1
September	28,0	65,4	4,1	1001,2	2,0	2	8,3
Oktober	29,4	65,0	4,4	1001,4	2,4	2	8,8
November	28,5	75,6	2,8	1000,0	88,0	10	5,2
Desember	28,3	76,7	2,4	1000,3	101,5	13	0,6

Sumber : Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2023

Tabel di atas memberikan gambaran iklim di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2024 berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Radin Inten II. Rata-rata suhu di tahun 2024 berkisar antara 26 °C – 28 °C, dengan rata-rata kelembaban 77% - 83%. Sedangkan kecepatan angin berkisar 1,8 meter/detik – 2,6 meter/detik dengan tekanan udara rata-rata 1.000 mb. Curah hujan di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2024 sangat berfluktuatif, dimana di awal tahun pada bulan Januari curah hujan mencapai 343,2 mm dengan total mencapai 22 hari hujan turun, yang merupakan curah hujan dan jumlah hari terbesar di tahun 2024. Sementara pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Agustus, curah hujan masih berkisar di atas 47,5 mm, yang menandakan akan terjadi musim kemarau. Namun mendekati akhir tahun, curah hujan kembali meningkat hingga mencapai 101,5 mm, yang merupakan bulan musim penghujan.

Gambar 2.4 Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan. 2024*

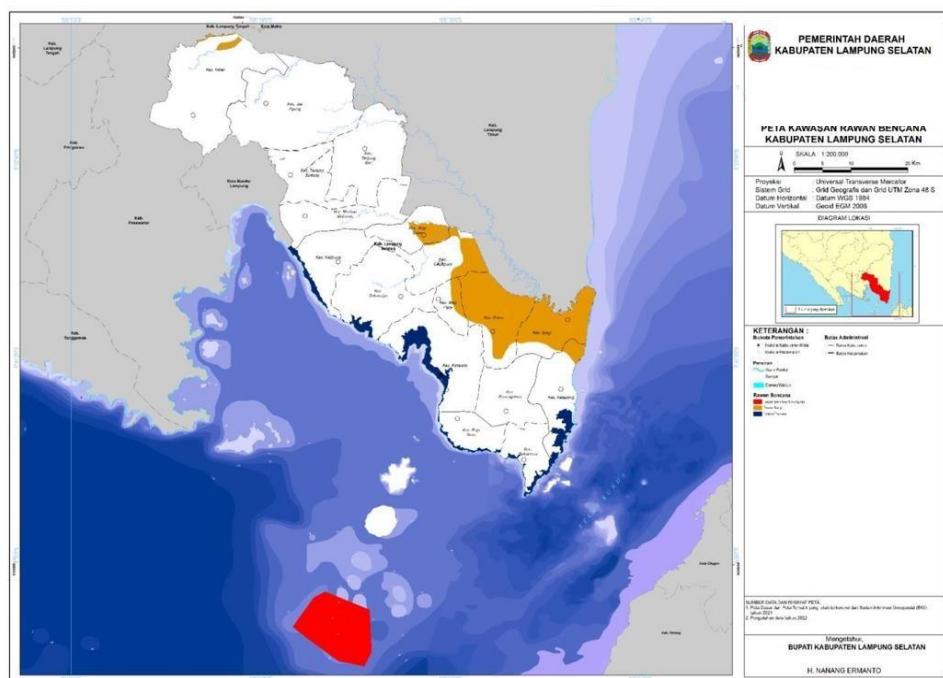
2.1.6 Resiko Dampak Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Lampung Selatan termasuk kategori wilayah yang memiliki indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tinggi. Data BNPB tahun 2015-2022 menunjukkan indeks risiko bencana Kabupaten Lampung Selatan yang cenderung tidak berubah karena disebabkan kecenderungan nilai kapasitas konstan yaitu 187,20 (kelas risiko tinggi) pada tahun 2015 hingga tahun 2021, sedangkan tahun 2023 yaitu 167,23 (kelas risiko tinggi). Tahun 2023 potensi jenis bencana dilihat dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Lampung Selatan adalah bencana banjir skor 28.16 (kelas risiko tinggi), gempa bumi skor 16.90 (kelas risiko tinggi), tsunami skor 12.52 (kelas risiko tinggi), letusan gunung api skor 3.13 (kelas risiko rendah), kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem/abrasi, cuaca ekstrem dengan skor 10.64 (kelas risiko sedang). Memperhatikan potensi risiko yang sebagian besar tinggi dan kompleksitas dalam penanganan bencana memerlukan suatu manajemen atau perencanaan yang matang, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Berbagai upaya yang dilakukan selama ini

belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering terjadi tumpang tindih bahkan terdapat beberapa prioritas penting yang belum tertangani.

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018). Berdasarkan BMKG bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut sesar tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif (Suharno, 2018). Patahan (sesar tarahan) yang berada di Tarahan tersebut memicu gempa magnitudo (M) 3,8 pada koordinat 5.72 LS dan 105.36 BT tepatnya berada di laut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dengan kedalaman hiposenter 4 km (dangkal) pada Senin, 27 Januari 2020 (BMKG). Sampai dengan saat ini potensi akan terjadinya bencana alam akan terus mengancam keselamatan masyarakat, untuk itu diperlukannya upaya mitigasi bencana.

Gambar 2.5 Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan. Tahun 2023

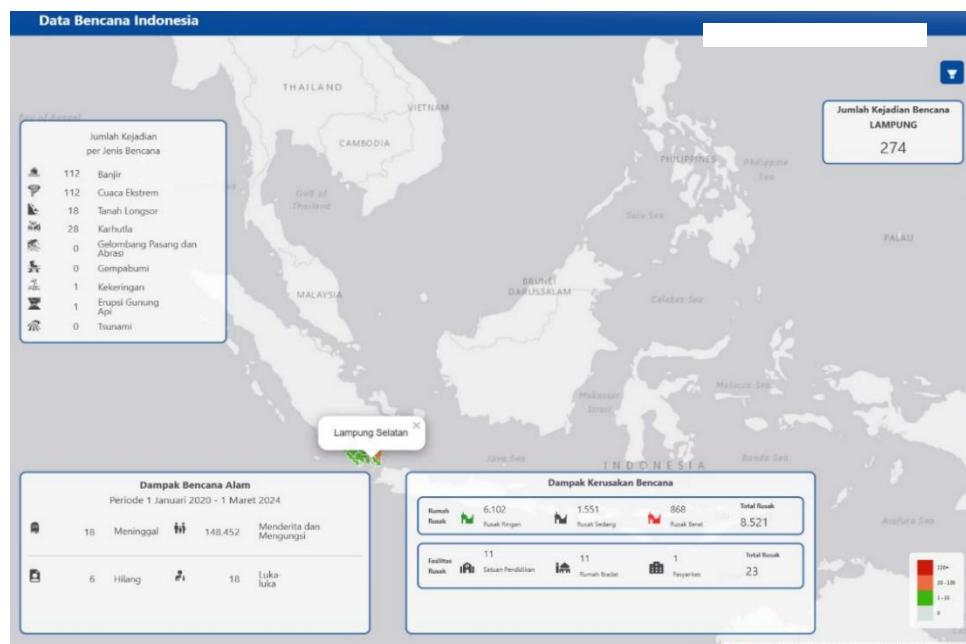
Tabel 2.3 Kawasan Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Bencana	Jalur Evakuasi Bencana
	(1)	(2)	(3)
1	Natar	Banjir	Tidak memerlukan jalur evakuasi mengingat banjir yang terjadi tidak berada di daerah permukiman
2	Katibung	Tsunami	Dievakuasi menuju Bukit Tarahan
3	Way Sulan	Banjir	Menuju Kecamatan Candipuro dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
4	Sidomulyo	Tsunami	Dievakuasi menuju sekitar jalan lintas Sumatera
5	Candipuro	Banjir	Dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
6	Way Panji	Banjir	Dievakuasi di Sukoharjo disekitar kantor Kecamatan Way Panji
7	Kalianda	Tsunami	Dievakuasi menuju kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten
8	Rajabasa	Tsunami	Dievakuasi menuju Gunung Rajabasa
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Rajabasa
9	Palas	Banjir	Dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Palas
10	Sragi	Banjir	Dievakuasi mengarah ke Bangunrejo di sekitar kantor Kecamatan Ketapang
11	Ketapang	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Ketapang
12	Bakauheni	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api	Dievakuasi menuju Kecamatan Penengahan

No	Kecamatan	Bencana	Jalur Evakuasi Bencana
	(1)	(2)	(3)
		Krakatau	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Gambar 2.6 Peta Kerawanan Bencana BNPB Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Geoportal Bencana Indonesia BNPB, 2024

Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Penetapan tingkat risiko bencana dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) dilakukan dengan menganalisis tiga aspek, yaitu potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Potensi bahaya mengindikasikan jenis-jenis ancaman yang mungkin terjadi di

Kabupaten Lampung Selatan, baik yang sudah pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Kerentanan wilayah mencerminkan potensi kerugian dan/atau kehilangan yang mungkin terjadi jika terjadi bencana, seperti jumlah penduduk yang terpapar, kerugian harta, dan dampak pada lingkungan. Komponen ketiga, yaitu kapasitas daerah, menunjukkan sejauh mana lembaga pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan siap untuk mengurangi dan menanggulangi risiko bencana. Mengacu pada hasil analisis, diketahui 8 (delapan) jenis potensi bahaya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan meliputi banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami dan gunungapi. Delapan bahaya tersebut dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga menghasilkan risiko.

a. Gempa Bumi

Gempa bumi ialah suatu fenomena tektonik atau vulkanik yang mencerminkan pergerakan batuan dan menghasilkan getaran atau gemetar pada Bumi. Gempa bumi terkait dengan pecahnya tiba-tiba batuan di sepanjang retakan, patahan, atau sesar yang terkena medan tegangan dalam kerak Bumi dan litosfer. Indonesia memiliki potensi gempa bumi yang tinggi karena terletak di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan berselisih dengan Lempeng Eurasia, sementara Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki sesar penyeimbang dari sesar utama, yaitu sesar Semangko. Beberapa kecamatan dilalui oleh sesar tersebut. Bakauheni memiliki dua sesar atau patahan, yaitu sesar Peterjajar yang masih aktif dan sesar Way Baka yang berpotensi aktif.

Kecamatan Kalianda tidak terletak di wilayah yang dilintasi oleh sesar atau patahan, dan memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Sesar Peterjajar telah menyebabkan gempa bumi di Kecamatan Penengahan dan sekitarnya. Kecamatan Katibung, termasuk Desa Tarahan di Katibung, dilewati oleh sesar Tarahan

yang seringkali menyebabkan gempa bumi dengan magnitudo relatif kecil. Sesar Tarahan, yang membentang sepanjang 40 km dari Desa Tarahan hingga Kecamatan Natar, seringkali memicu gempa bumi di wilayah ini. Gempa-gempa tersebut memiliki magnitudo (M) 3,4 dengan intensitas I-II di Kecamatan Natar. Meskipun begitu, berdasarkan analisis kecamatan-kecamatan tersebut memiliki bahaya rendah terhadap gempa bumi.

Gempa bumi menjadi salah satu bencana yang mengancam Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun jarang terjadi dan zona utama gempa bumi cenderung jauh dari wilayah, tetapi bahaya gempabumi tetap diperhitungkan dan dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda pada beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.

Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas tinggi

Sesar yang berada di Kabupaten Lampung Selatan merupakan sesar penyeimbang dari sesar utama yaitu sesar Semangko dan menurut data kejadian bencana 10 tahun terakhir, wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak pernah mengalami kejadian bencana gempa bumi yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan.

Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas sedang

- a. Bakauheni, terdapat dua sesar atau patahan yang melintas di Kecamatan Bakauheni, yaitu sesar Peterjajar yang saat ini dalam kondisi aktif dan sesar Way Baka dengan status *capable fault* atau berpotensi aktif.
- b. Kalianda, berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Kalianda bukan termasuk wilayah yang dilintasi oleh sesar atau patahan dan jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Kalianda tergolong kedalam kelas ancaman rendah terhadap bencana gempa bumi.
- c. Penengahan, menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung, aktivitas Sesar Peterjajar telah menyebabkan gempa bumi di Kecamatan Penengahan dan sekitarnya.
- d. Katibung, Kecamatan Katibung atau desa Tarahan merupakan wilayah yang dilintasi oleh sesar Tarahan. Aktivitas sesar ini

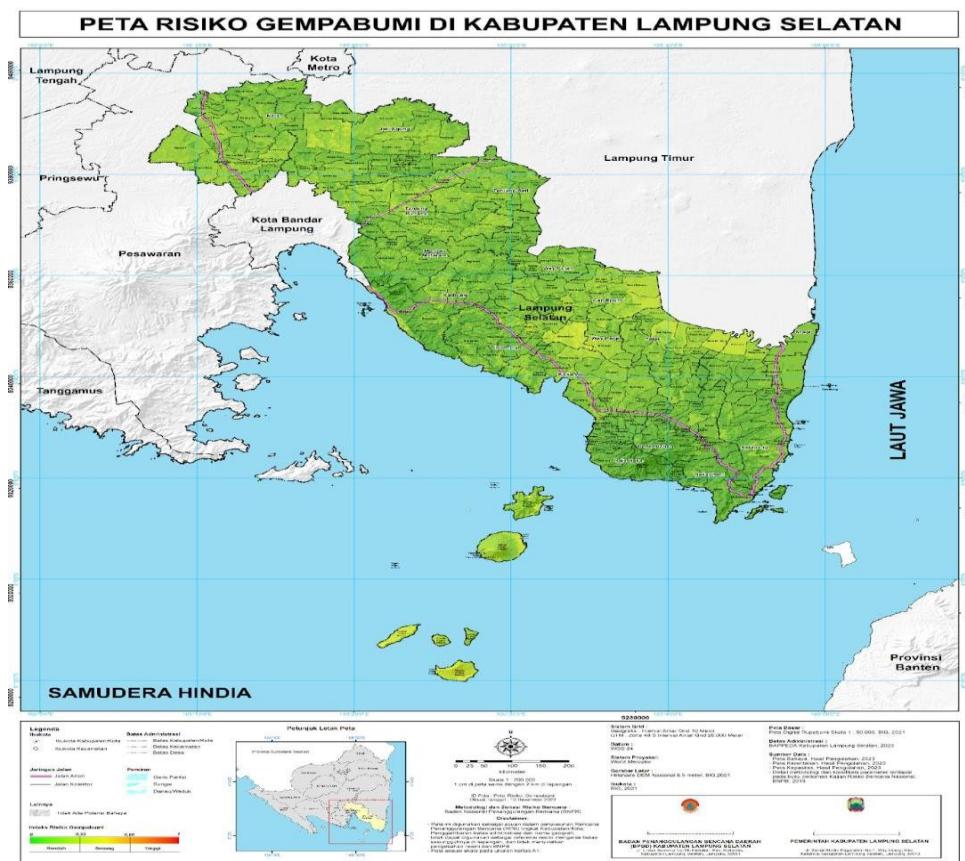
sering menyebabkan kejadian bencana gempa bumi dengan magnitudo yang relatif kecil, tercatat pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 08.27 WIB aktivitas sesar Tarahan telah menyebabkan gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,8 dengan episentrum berada dilaut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dan kedalaman 4 km.

- e. Natar, aktivitas sesar Tarahan yang membentang sepanjang 40 km dari desa Tarahan sampai dengan Kecamatan Natar sering kali menyebabkan gempa bumi di wilayah ini yang berkekuatan magnitudo (M) 3,4 dengan skala intensitas I-II di Kecamatan Natar.

Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas rendah

Beberapa wilayah kecamatan yang masuk kedalam zonasi kelas rendah terhadap ancaman bencana gempa bumi merupakan wilayah yang tidak dilintasi oleh sesar dan berdasarkan data kejadian bencana Kecamatan seperti Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Jati Agung tidak pernah mengalami dampak bencana gempa bumi (Sari dkk, 2021).

Gambar 2.8 Peta Risiko Gempa Bumi di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2024

Tabel 2.4 Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Gempabumi (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	25.357,77	576,36	-	25.934,13	Rendah	
2	Tanjung Bintang	16.088,13	550,44	-	16.638,57	Rendah	
3	Kalianda	16.981,83	611,28	-	17.593,11	Rendah	
4	Sidomulyo	12.102,57	1.237,50	-	13.340,07	Sedang	
5	Katibung	15.828,93	363,33	-	16.192,26	Rendah	
6	Penengahan	10.659,24	63,99	-	10.723,23	Rendah	
7	Palas	11.318,76	1.572,75	-	12.891,51	Sedang	
8	Jati Agung	23.783,94	1.142,37	-	24.926,31	Rendah	
9	Ketapang	14.040,18	280,26	-	14.320,44	Rendah	
10	Sragi	7.827,21	957,96	-	8.785,17	Sedang	
11	Raja Basa	9.115,02	2.736,99	-	11.852,01	Rendah	
12	Candipuro	11.358,81	963,45	-	12.322,26	Rendah	
13	Merbau Mataram	12.982,59	62,73	-	13.045,32	Rendah	
14	Bakauheni	5.933,61	54,09	-	5.987,70	Rendah	
15	Tanjung Sari	9.552,69	120,96	-	9.673,65	Rendah	

No	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Gempabumi (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
16	Way Sulan	4.663,62	75,60	-	4.739,22	Rendah	
17	Way Panji	3.315,15	457,83	-	3.772,98	Rendah	
Kab. Lampung Selatan		210.910,04	11.827,88	-	222.737,92	Sedang	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel risiko bencana gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menggambarkan luas risiko dalam Ha untuk tiga kelas, tiga kecamatan yaitu Sidomulyo (13.340,07 Ha), Palas (12.891,51 Ha), dan Sragi (8.785,17 Ha) memiliki wilayah risiko sedang terhadap gempa bumi. Sementara, kecamatan sisanya tergolong berisiko rendah. Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan memiliki luas risiko gempa bumi rendah sebesar 210.910,04 Ha, dan kelas risiko sedang mencapai 11.827,88 Ha. Analisis ini memberikan gambaran tentang sebaran risiko bencana gempa bumi di setiap kecamatan, memungkinkan perencanaan dan mitigasi yang lebih tepat di tingkat lokal. Gambar di bawah ini merupakan grafik potensi luas risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Banjir

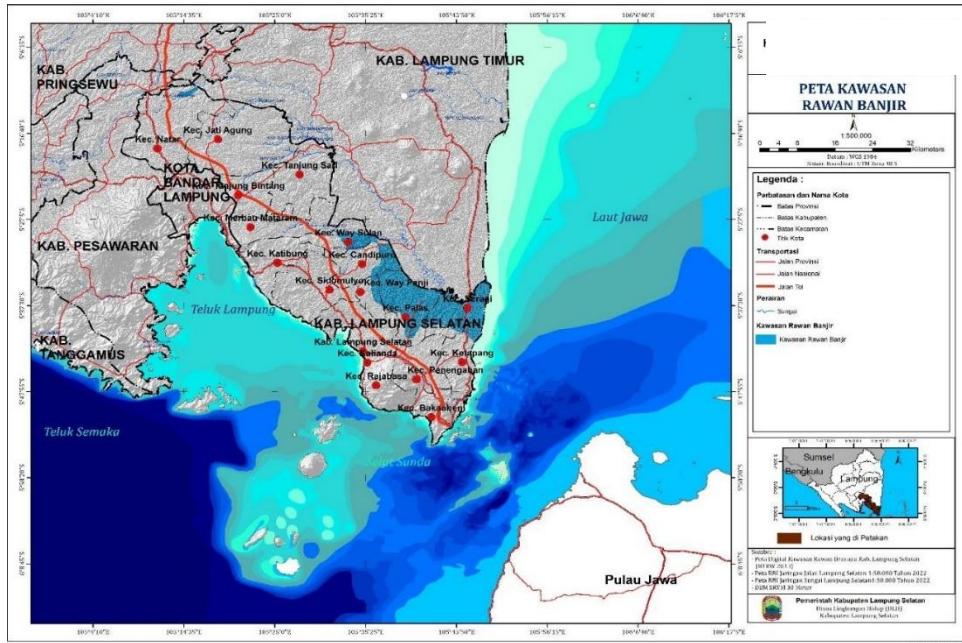
Banjir menjadi salah satu permasalahan bencana di Kabupaten Lampung Selatan. Sungai-sungai di Kabupaten Lampung Selatan, seperti Way Katibung, Way Sekampung, dan Way Pisang, seringkali menjadi pemicu terjadinya banjir (Sari dkk, 2021). Way Katibung melewati empat Kecamatan, yakni Katibung, Candipuro, Way Sulan, dan Sidomulyo. Berdasarkan kajian bahaya banjir, keempat kecamatan ini tergolong bahaya tinggi. Kenaikan yang signifikan dalam jumlah air sungai kerap kali menjadi penyebab banjir di kecamatan-kecamatan yang dilalui oleh sungai tersebut. Faktor ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi dalam periode yang lama dan pasang air laut. Akibatnya, sungai meluap dan membanjiri wilayah sekitarnya. Saat debit air sungai meningkat, aliran sungai melambat bahkan dapat terhenti, menyebabkan

penumpukan air yang akhirnya juga meluap dan membanjiri area sekitarnya.

Banjir menjadi bencana kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Lampung Selatan setelah cuaca ekstrim. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 66 kejadian banjir dalam rentang waktu 2020-2023. Bencana tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 60 jiwa terpaksa mengungsi. Tak hanya itu, rumah penduduk juga terendam akibat banjir. Risiko banjir merupakan hasil penilaian dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Terdapat beberapa sungai di Kabupaten Lampung Selatan yang sering menjadi penyebab banjir yaitu Sungai Way Katibung, sungai Way Sekampung dan sungai Way Pisang. Sungai Way Katibung membentang diantara empat Kecamatan yaitu Kecamatan Katibung, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo. Sungai Way Sekampung dan Sungai Way Pisang. Peningkatan debit air yang sangat drastis yang terjadi di Sungai Way Sekampung seringkali menyebabkan bencana banjir di Kecamatan Sragi. Peningkatan debit air Sungai Way Sekampung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, Intensitas curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama dan pasang air laut. Hal ini yang menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi wilayah Kecamatan Sragi. Ketika Sungai Way Sekampung mengalami peningkatan debit, hal ini akan berpengaruh terhadap Sungai Way Pisang, aliran Sungai yang seharusnya bergerak menuju Sungai Way Sekampung akan terhenti dan akan membuat debit air di Sungai Way Pisang mengalami penumpukan, kemudian meluap dan menggenangi wilayah Kecamatan Palas (Sari dkk, 2021). Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam wilayah rawan bencana banjir dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Banjir



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan gambar 2.8 dapat dilihat bahwa Peta kawasan rawan banjir Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat kerentanan banjir yang cukup tinggi, khususnya di bagian tengah hingga timur dan pesisir utara yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan visualisasi spasial, area yang ditandai sebagai zona rawan banjir tampak terkonsentrasi di sepanjang aliran sungai utama, daerah dataran rendah, dan wilayah yang berada dekat dengan garis pantai, seperti Kecamatan Sidomulyo, Katibung, Candipuro, Penengahan, dan sekitarnya. Kondisi ini disebabkan oleh faktor geomorfologis berupa topografi datar hingga bergelombang rendah, intensitas curah hujan yang tinggi, serta sistem drainase yang kurang optimal di beberapa wilayah padat penduduk.

Selain itu, peta ini juga memperlihatkan kedekatan kawasan rawan banjir dengan jalur transportasi nasional dan provinsi, yang mengindikasikan bahwa potensi gangguan infrastruktur akibat banjir dapat berdampak pada mobilitas ekonomi dan pelayanan publik. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana. Dengan demikian, peta kawasan rawan banjir ini berfungsi sebagai

instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan pengurangan risiko bencana, pengendalian tata ruang, serta perlindungan terhadap permukiman dan fasilitas strategis di wilayah terdampak. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif berbasis data geospasial seperti ini, guna memastikan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan dinamika hidrologis yang semakin kompleks.

Gambar 2.9 Peta Risiko Banjir



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel 2.5 Risiko Banjir di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Banjir (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	3.508,20	305,19	0,18	3.813,57	Tinggi	
2	Tanjung Bintang	1.101,24	196,65	0,00	1.297,89	Tinggi	
3	Kalianda	760,41	9,45	0,00	769,86	Tinggi	
4	Sidomulyo	1.730,79	103,50	0,00	1.834,29	Tinggi	
5	Katibung	372,06	178,38	0,00	550,44	Tinggi	
6	Penengahan	568,98	101,88	0,00	670,86	Tinggi	
7	Palas	2.287,44	5.698,98	3,42	7.989,84	Sedang	
8	Jati Agung	1.569,24	1.944,18	6,48	3.519,90	Tinggi	
9	Ketapang	1.446,21	609,75	15,75	2.071,71	Sedang	
10	Sragi	2.714,49	2.119,05	44,10	4.877,64	Sedang	
11	Raja Basa	5,22	0,00	0,00	5,22	Rendah	
12	Candipuro	2.221,38	3.974,67	0,00	6.196,05	Tinggi	

13	Merbau Mataram	770,40	350,91	0,00	1.121,31	Tinggi
14	Bakauheni	27,63	0,00	0,00	27,63	Tinggi
15	Tanjung Sari	688,86	575,55	0,00	1.264,41	Sedang
16	Way Sulan	1.474,47	171,90	0,00	1.646,37	Sedang
17	Way Panji	438,66	0,00	0,00	438,66	Tinggi
Kab. Lampung Selatan		21.685,68	16.340,04	69,93	38.095,65	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Tabel risiko bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan luas risiko banjir yang dapat dijumpai di setiap kecamatan. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kecamatan dengan risiko banjir tertinggi adalah Natar, Tanjung Bintang, dan Sidomulyo, masing-masing dengan total luas risiko banjir 3.813,57 Ha, 1.297,89 Ha, dan 1.834,29 Ha. Kecamatan-kecamatan ini menghadapi risiko banjir tinggi, yang dapat menyebabkan dampak serius terhadap infrastruktur dan masyarakat setempat. Sementara itu, kelas risiko sedang terdapat di Kecamatan Palas (7.989,84 Ha), Sragi (4.887,64 Ha), Ketapang (2.071,71 Ha), Way Sulan (1.646,37 Ha), dan Tanjung Sari (1.264,41 Ha).

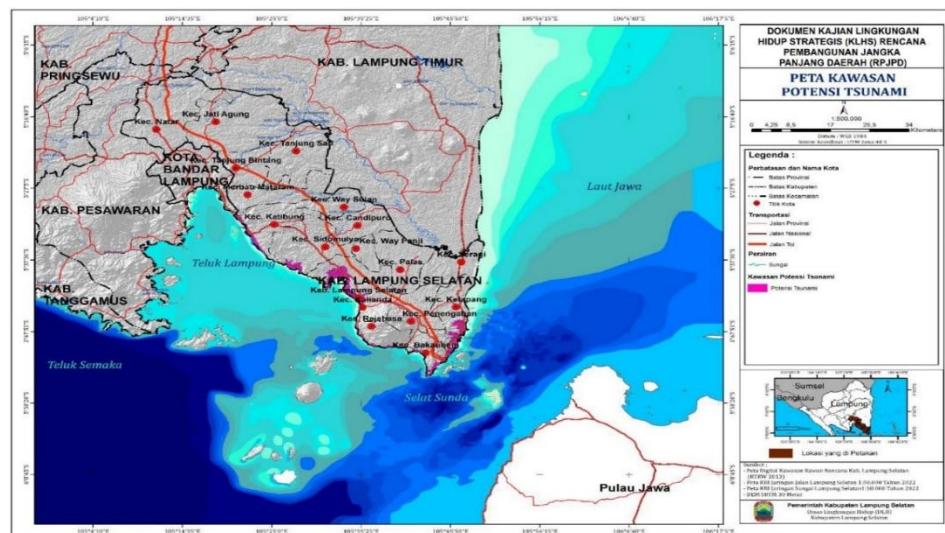
c. Tsunami

Tsunami merupakan salah satu bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik dangkal yang mengakibatkan gempabumi besar serta memicu terjadinya tsunami. Namun, berkaca pada kejadian tsunami di Kabupaten Lampung Selatan, bencana tsunami diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan Gunung Anak Krakatau pada Desember 2018. Kecamatan di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah pesisir perlu mewaspadai gelombang tsunami.

Jarak dari pusat gempa, jarak wilayah daratan Kabupaten Lampung Selatan dengan asumsi episentrum gempa bumi berada di lokasi Gunung Krakatau, menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan terletak pada jarak kurang dari 150 km. Kelerengan topografi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan dataran dengan kemiringan lereng kurang dari 10 %. Namun pada

sebagian kecil wilayah (Kecamatan Sidomulyo), kelerengan cukup bervariasi, yaitu antara 20% - 30%. Kelerengan yang cukup curam terdapat Kecamatan Rajabasa di mana terdapat Gunung Rajabasa yang memiliki ketinggian mencapai 1.280 m dari permukaan laut. Jarak dari sungai, wilayah daratan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan jaraknya dari sungai yang berada di Kabupaten Lampung Selatan kurang dari 450 km. Keterlindungan lahan, secara umum wilayah daratan pantai Kabupaten Lampung Selatan tidak terlindung dari ancaman bahaya tsunami. Morfologi garis pantai, bagian Selatan Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah Teluk Lampung karena itu morfologi pantainya merupakan pantai berteluk. Pantai berteluk memiliki potensi ancaman bahaya bencana tsunami lebih tinggi dari pantai yang tidak memiliki teluk. Keberadaan pulau penghalang, wilayah barat Kabupaten Lampung Selatan tepatnya Kecamatan Bakauheni terdapat beberapa Pulau kecil yaitu, Pulau Kelapa, Pulau Sindu, Pulau Kandang Lunik, Pulau Kandang Balak dan Gugus Anak Krakatau (Sari dkk, 2021). Berdasarkan gambar 2.10, hasil analisis dan pemodelan sistem informasi geografis,bencana tsunami di pantai selatan Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari tiga kelas, yaitu: tinggi, sedang dan rendah, seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.10 Peta Potensi Tsunami Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Gambar 2.11 Peta Risiko Tsunami



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Tabel 2.6 Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Tsunami (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	-	-	-	-	-	
2	Tanjung Bintang	-	-	-	-	-	
3	Kalianda	596,76	58,77	-	655,47	Sedang	
4	Sidomulyo	95,49	9,63	-	105,12	Rendah	
5	Katibung	255,96	102,87	-	358,83	Sedang	
6	Penengahan	-	-	-	-	-	
7	Palas	-	-	-	-	-	
8	Jati Agung	-	-	-	-	-	
9	Ketapang	1.698,03	118,98	-	1.817,01	Rendah	
10	Sragi	1124,10	41,58	-	1.165,68	Rendah	
11	Raja Basa	479,43	279,81	-	758,24	Sedang	
12	Candipuro	-	-	-	-	-	
13	Merbau Mataram	-	-	-	-	-	
14	Bakauheni	469,88	25,11	-	585,99	Rendah	
15	Tanjung Sari	-	-	-	-	-	
16	Way Sulan	-	-	-	-	-	
17	Way Panji	-	-	-	-	-	
Kab. Lampung Selatan		3.977,01	724,32	-	4.701,33	Sedang	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Analisis risiko tsunami di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat risiko di berbagai kecamatan. Dari total luas risiko tsunami sebesar 4.701,33 Ha, sebagian besar terdistribusi pada Kecamatan Ketapang (1.817,01 Ha), Sragi (1.165,68 Ha), dan Raja Basa (759,24 Ha), dengan tingkat risiko yang cenderung rendah hingga sedang. Kecamatan Kalianda juga memiliki luas risiko yang signifikan sebesar 655,47 Ha, menempatkannya dalam kategori risiko sedang. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Natar, Tanjung Bintang, Penengahan, Palas, Jati Agung, Candipuro, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Way Sulan, dan Way Panji tidak memiliki risiko tsunami yang terdeteksi.

d. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah suatu kondisi cuaca yang tidak biasa dan dapat menyebabkan kerugian, terutama terhadap keselamatan jiwa dan harta. Kondisi ini bisa ditandai oleh perubahan drastis pada curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang. Cuaca ekstrem bisa berupa gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, badai, atau bahkan cuaca dingin yang sangat tidak biasa.

Bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrim dan kekeringan, dapat dipicu oleh anomali cuaca dan perubahan iklim. Menurut NASA (2023), perubahan iklim global telah berdampak pada berbagai cuaca ekstrim di seluruh dunia. Gelombang panas rekor di daratan dan lautan, hujan lebat, banjir parah, kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan yang ekstrim, serta banjir saat badai semakin sering dan intens. Tindakan manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, secara signifikan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Tiga faktor yang digunakan untuk mengenali daerah yang berpotensi mengalami bahaya cuaca ekstrim, khususnya angin puting beliung, adalah tingkat keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan. Kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem, seperti angin puting beliung, cenderung lebih tinggi di wilayah dengan tingkat keterbukaan lahan yang signifikan, seperti daerah pemukiman dan pertanian.

Gambar 2.12 Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Tabel 2.7 Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Cuaca Ekstrem (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	2.960,01	22.823,46	-	25.783,47	Sedang	
2	Tanjung Bintang	305,37	16.145,37	-	16.450,74	Sedang	
3	Kalianda	293,22	14.906,43	-	15.199,65	Sedang	
4	Sidomulyo	1.584,81	11.545,38	-	13.130,19	Sedang	
5	Katibung	2.945,25	10.808,10	-	13.753,35	Sedang	
6	Penengahan	433,44	6.085,71	-	6.519,15	Sedang	
7	Palas	690,21	12.090,15	-	12.780,36	Sedang	
8	Jati Agung	1.214,37	23.584,86	-	24.799,23	Sedang	
9	Ketapang	2.050,20	11.419,83	-	13.470,03	Sedang	
10	Sragi	784,80	7.868,61	-	8.653,41	Sedang	
11	Raja Basa	462,78	1.548,27	-	2.011,05	Sedang	
12	Candipuro	101,07	12.100,77	-	12.201,84	Sedang	
13	Merbau Mataram	338,04	10.808,28	-	11.146,32	Sedang	
14	Bakauheni	1.933,74	2.554,20	-	4.487,94	Sedang	

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Cuaca Ekstrim (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
15	Tanjung Sari	413,10	9.133,11	-	9.546,21	Sedang	
16	Way Sulan	257,13	4.372,29	-	4.629,42	Sedang	
17	Way Panji	78,93	3.594,69	-	3.673,62	Sedang	
Kab. Lampung Selatan		16.846,47	181.389,51	-	198.235,98	Sedang	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Tabel risiko bencana cuaca ekstrem per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan luas risiko dalam Ha dan dikelompokkan ke dalam kelas risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan Natar memiliki luas risiko sedang terbesar dengan 25.783,47 Ha, diikuti oleh Jati Agung dengan 24.799,23 Ha. Meskipun seluruh kecamatan menunjukkan risiko sedang, terdapat variasi dalam luas risiko antar kecamatan. Penilaian risiko ini mencakup faktor-faktor seperti curah hujan, penggunaan lahan, kapasitas masyarakat dan daerah, serta kerentanan sosial, ekonomi, dan fisik terhadap cuaca ekstrem.

e. Kekeringan

Kekeringan turut menjadi perhatian potensi bencana di Kabupaten Lampung Selatan, mengingat sebagian besar masyarakat memiliki ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan. Ini juga dibuktikan bahwa analisis BNPB (2022) menyatakan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko tinggi terhadap kekeringan. Wilayah memiliki luas pertanian dan perkebunan seluas 175.95 Hektar, dengan 20% untuk persawahan, 45% untuk perkebunan, dan 30% untuk ladang. Selain menjadi sentra pertanian padi yang luas, Kabupaten Lampung Selatan juga terkenal sebagai pusat produksi jagung dengan produksi mencapai 529.028 ton setiap tahun. Apabila kekeringan tidak dapat diatasi, maka akan menimbulkan kerugian yang signifikan dan terganggunya distribusi kebutuhan pangan. Selain itu, dampak kekeringan dapat memunculkan banjir bandang, pepohonan mati, tanah menjadi gundul yang pada musim hujan akan menjadi mudah tererosi dan banjir, lalu ada dampak urbanisasi dikarenakan hilangnya bahan pangan

tanaman sehingga para petani kehilangan mata pencaharian, dan dampak kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang akan menjadi rentan terhadap penyakit.

Penyebab utama kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diidentifikasi dari gabungan faktor alam, seperti rendahnya curah hujan dan periode kemarau yang berkepanjangan. Perubahan iklim menjadi faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan intensitas dan durasi kekeringan yang ekstrim. Kendala-kendala seperti kurangnya infrastruktur penyimpanan air bersih, kurangnya keragaman sumber air untuk keperluan pertanian, dan kesulitan dalam memperoleh pasokan air bersih dari sumber yang memadai, turut menjadi pemicu kekeringan.

Kekeringan patut menjadi perhatian sebagai potensi bencana di Kabupaten Lampung Selatan, mengingat sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Wilayah ini memiliki luas pertanian dan perkebunan mencapai 175.956 Ha, dengan persawahan mencakup 20%, perkebunan 45%, dan ladang 30%. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra pertanian padi dan produsen jagung dengan produksi mencapai 529.028 ton setiap tahun. Analisis KRB menunjukkan bahaya kekeringan termasuk dalam kategori sedang di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Lampung Selatan, bencana kekeringan pernah terjadi di Kecamatan Sidomulyo, Palas, dan Sragi pada tahun 2015 dan pada bulan September tahun 2023 kekeringan terjadi di Kecamatan Natar. Kekeringan merupakan salah satu bencana yang tidak terlihat dampaknya secara signifikan akan tetapi dapat menimbulkan kerugian yang tinggi.

Berdasarkan gambar 2.13, dapat digambarkan bahwa wilayah yang berwarna kuning menunjukkan risiko sedang, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan risiko rendah, dan oranye menunjukkan risiko tinggi. Sebagian besar wilayah Lampung Selatan berada pada risiko sedang hingga rendah, dengan

beberapa daerah kecil yang berisiko tinggi terutama di bagian selatan dan pulau-pulau di lepas pantai. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya mitigasi harus difokuskan pada daerah-daerah dengan risiko tinggi, seperti pengelolaan sumber air, konservasi tanah, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kekeringan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan berkala dan pengembangan sistem peringatan dini agar dampak kekeringan dapat diminimalisir, terutama bagi sektor pertanian yang sangat rentan. Peta ini juga menjadi dasar untuk koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana kekeringan di Lampung Selatan secara efektif dan efisien.

Gambar 2.13 Peta Risiko Kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Tabel 2.8 Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Kekeringan (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	13.526,66	12.547,19	-	26.073,86	Sedang	
2	Tanjung Bintang	5.112,74	11.570,60	-	16.683,35	Sedang	
3	Kalianda	12.098,63	5.561,57	-	17.660,21	Sedang	
4	Sidomulyo	5.758,94	7.588,01	-	13.346,96	Sedang	
5	Katibung	2.131,13	14.106,44	-	16.237,58	Sedang	
6	Penengahan	5.632,76	5.076,47	-	10.709,24	Sedang	
7	Palas	9.353,90	3.535,67	-	12.889,58	Sedang	
8	Jati Agung	10.026,11	15.028,04	-	25.054,16	Sedang	
9	Ketapang	7.914,35	6.341,60	-	14.255,96	Sedang	
10	Sragi	5.683,52	3.074,69	-	8.758,22	Sedang	
11	Raja Basa	3.428,30	8.411,60	-	11.839,91	Sedang	
12	Candipuro	8.100,83	4.195,91	-	12.296,75	Sedang	
13	Merbau Mataram	5.344,76	7.705,19	-	13.049,96	Sedang	
14	Bakauheni	2.600,21	3.314,72	-	5.914,94	Sedang	
15	Tanjung Sari	1.681,04	7.930,37	-	9.611,42	Sedang	
16	Way Sulan	4.664,54	11,61	-	4.676,15	Rendah	
17	Way Panji	2.050,49	1.629,20	-	3.679,70	Sedang	
Kab. Lampung Selatan		105.108,98	117.628,95	-	222.737,92	Sedang	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko bencana kekeringan kelas sedang. Total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mengalami risiko sebesar 222.737,92 Ha, dengan risiko tertinggi di Kecamatan Natar, sebesar 26.073,86 Ha, risiko terbesar kedua pada Kecamatan Jati Agung, sebesar 25.054,16 Ha, dan risiko terbesar ketiga pada Kecamatan Kalianda sebesar 17.660,21 Ha.

f. Resiko Tanah Longsor

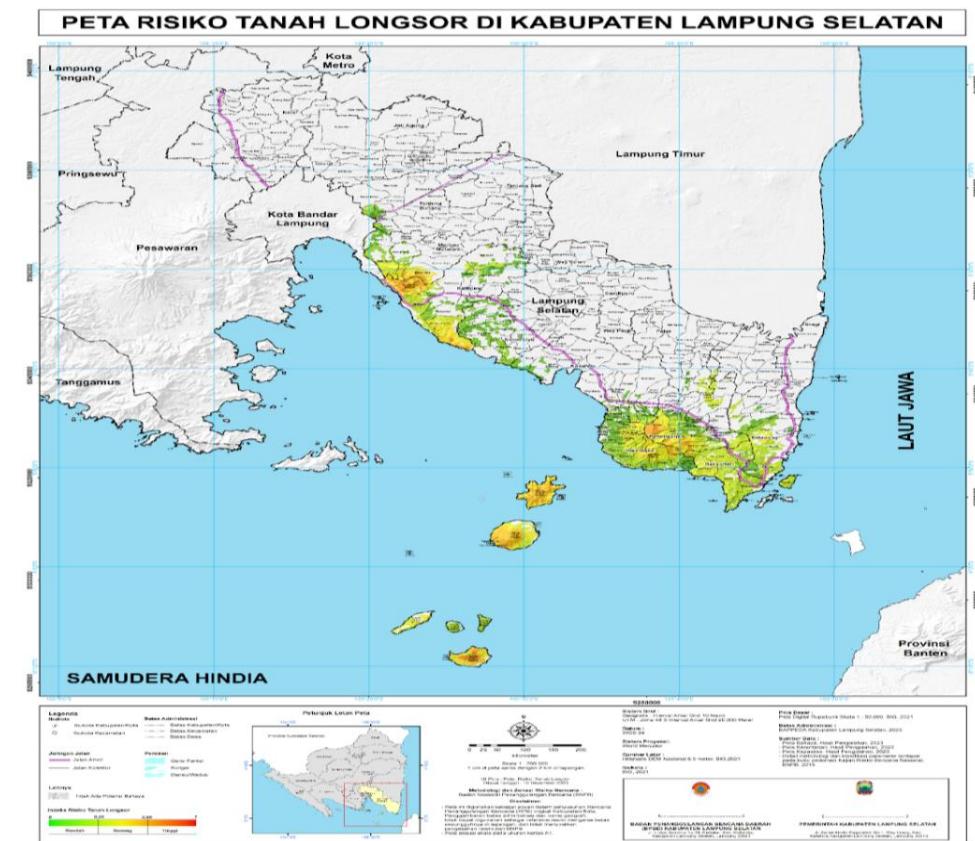
Potensi terjadinya longsor di Kabupaten Lampung Selatan memiliki karakteristik khusus yang perlu diambil perhatian. Wilayah yang berdekatan dengan Gunung Rajabasa cenderung memiliki kemiringan lereng lebih dari 15%. Fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng. Keberadaan ini menjadi perhatian khusus

terutama selama musim hujan, di mana air yang meresap ke dalam tanah dapat meningkatkan beban pada lereng dan mengakibatkan ketidakstabilan yang berpotensi memicu longsor. Risiko ini semakin tinggi karena adanya perkebunan dengan akar dangkal dan area pemukiman.

Berdasarkan hasil kajian, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi bahaya tinggi terhadap bencana tanah longsor. Kecamatan Rajabasa merupakan wilayah dengan luas bahaya tertinggi (10.573,82 hektar) dibandingkan kecamatan lainnya. Hal demikian disebabkan karena Kecamatan Rajabasa terletak di kaki Gunung Rajabasa, sehingga terdapat topografi tinggi dan perbukitan. Permasalahan utama yang muncul dari bencana longsor ialah permukiman penduduk yang berada di kawasan lereng rawan longsor.

Berdasarkan pada Gambar 2.14 dapat dilihat bahwa Peta risiko tanah longsor di Kabupaten Lampung Selatan ini menunjukkan distribusi tingkat kerawanan longsor dengan klasifikasi rendah (hijau), sedang (kuning), dan tinggi (merah). Dari analisis spasial, terlihat bahwa wilayah dengan risiko tinggi dan sedang tersebar terutama di bagian selatan dan barat daya kabupaten, mencakup daerah perbukitan dan lereng yang berdekatan dengan garis pantai serta beberapa pulau di sekitarnya. Area dengan risiko tinggi juga tampak beririsan dengan wilayah permukiman dan jalur transportasi utama, sehingga meningkatkan potensi dampak terhadap keselamatan jiwa, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aksesibilitas. Kondisi ini menuntut prioritas mitigasi berupa penataan tata ruang yang adaptif, penguatan struktur lereng, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan sistem peringatan dini. Selain itu, penting dilakukan pemantauan rutin pada musim hujan dan pengelolaan vegetasi untuk mengurangi laju erosi.

Gambar 2.14 Risiko Tanah Longsor



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023-2027

Tabel 2.9 Kelas Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Tanah Longsor (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	-	-	-	-	-	
2	Tanjung Bintang	543,60	48,51	0,00	592,11	Tinggi	
3	Kalianda	1.913,22	722,97	0,09	2.636,28	Tinggi	
4	Sidomulyo	2.261,70	18,99	0,00	2.280,69	Tinggi	
5	Katibung	1.749,06	3.516,30	566,91	5.832,27	Tinggi	
6	Penengahan	1.388,34	3.273,03	868,77	5.530,14	Tinggi	
7	Palas	70,74	269,91	0,00	340,65	Tinggi	
8	Jati Agung	-	-	-	-	-	
9	Ketapang	1.786,86	1.252,35	0,00	3.039,21	Tinggi	
10	Sragi	364,14	0,54	0,00	364,68	Tinggi	
11	Raja Basa	2.746,98	6.901,11	380,61	10.028,70	Sedang	
12	Candipuro	132,48	203,94	0,00	336,42	Tinggi	
13	Merbau Mataram	705,51	1.232,19	0,54	1.938,24	Tinggi	
14	Bakauheni	1.600,83	2.424,78	0,27	4.025,88	Sedang	
15	Tanjung Sari	-	-	-	-	-	

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Tanah Longsor (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
16	Way Sulan	332,10	905,22	0,00	1.237,32	Tinggi	
17	Way Panji	-	-	-	-	-	
Kab. Lampung Selatan		15.595,56	20.769,84	1.817,19	38.182,59	Tinggi	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung

Selatan 2023-2027

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko bencana tanah longsor kelas tinggi. Total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mengalami risiko sebesar 38.182,59 Ha, dengan risiko tertinggi di Kecamatan Rajabasa, sebesar 10.028,70 Ha (namun masuk kategori kelas sedang), risiko terbesar kedua pada Kecamatan Katibung, sebesar 5.832,27 Ha (kelas tinggi), dan risiko terbesar ketiga pada Kecamatan Penengahan sebesar 5.530,14 Ha (kelas tinggi).

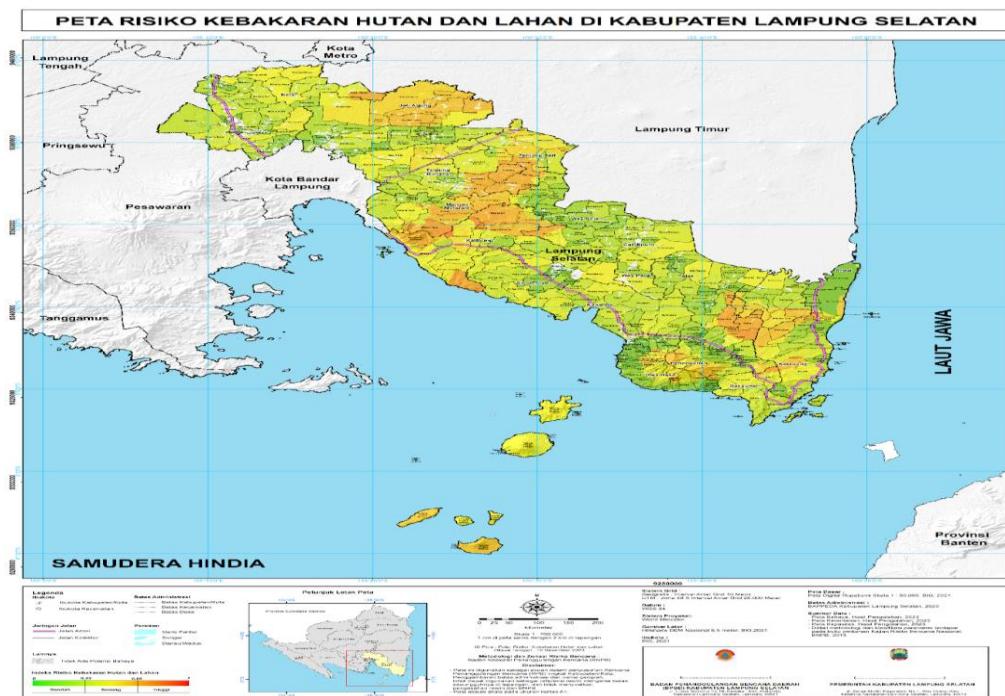
g. Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang secara rutin terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami melibatkan musim kering yang sangat ekstrim akibat pengaruh fenomena El-Nino. Di sisi lain, faktor manusia mencakup penggunaan api dalam persiapan lahan, ketidakpuasan terhadap pengelolaan hutan, dan praktik ilegal seperti penebangan liar.

Potensi bencana karhutla melibatkan seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil kajian, seluruh kabupaten tergolong bahaya tinggi terhadap karhutla, dengan luas wilayah tertinggi ialah Kecamatan Natar (25.056,73 Ha) dan Kecamatan Jati Agung (24.134,30 Ha). Pemadaman terhadap titik api karhutla harus dilakukan secara maksimal dan cepat. Kurangnya infrastruktur dan transportasi penunjang untuk memadamkan hutan yang terbakar bisa menjadi pemicu karhutla semakin meluas. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan fenomena yang sering terjadi, khususnya apabila musim kemarau yang berkepanjangan. Data BPBD Lampung Selatan Tahun 2023 menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebar di beberapa Kecamatan,

seperti Kecamatan Natar, Kalianda, Way Panji, Jati Agung, Tanjung Bintang, Bakauheni, dan Penengahan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut mengakibatkan kerusakan dan kerugian

Gambar 2.15 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Berdasarkan Gambar 2.15 dapat dinyatakan bahwa Peta risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Selatan ini memberikan gambaran spasial mengenai tingkat kerawanan wilayah terhadap ancaman kebakaran, dengan klasifikasi risiko rendah (hijau), sedang (kuning), dan tinggi (orange-merah). Dari analisis peta, terlihat bahwa sebagian besar wilayah Lampung Selatan berada pada kategori risiko sedang, terutama di bagian tengah dan timur, sementara zona risiko tinggi tersebar secara sporadis di beberapa kecamatan, terutama di wilayah selatan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Hal ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan cukup signifikan, terutama pada musim kemarau atau saat terjadi fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Wilayah dengan risiko tinggi umumnya beririsan dengan kawasan hutan, lahan pertanian, dan permukiman, sehingga menuntut upaya mitigasi terpadu seperti patroli rutin, edukasi masyarakat, penguatan

sistem peringatan dini, serta penegakan hukum terhadap pembakaran liar. Peta ini menjadi alat penting bagi BPBD dan pemangku kepentingan lain untuk menentukan prioritas intervensi, alokasi sumber daya, serta perencanaan evakuasi dan penanggulangan darurat guna meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan di Lampung Selatan.

Tabel 2.10 Kelas Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Karhutla (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	2.470,95	18.651,24	502,83	21.625,02	Sedang	
2	Tanjung Bintang	1.548,18	11.466,00	1.525,77	14.539,95	Tinggi	
3	Kalianda	3.267,45	12.689,19	0,00	15.956,64	Sedang	
4	Sidomulyo	2.031,66	9.805,59	0,99	11.838,24	Sedang	
5	Katibung	806,76	12.010,95	2.340,63	15.158,34	Tinggi	
6	Penengahan	3.339,81	5.135,04	1.449,27	9.924,12	Tinggi	
7	Palas	3.583,17	6.943,68	824,67	11.351,52	Tinggi	
8	Jati Agung	3.684,51	18.040,68	90,54	21.815,73	Sedang	
9	Ketapang	4.024,53	9.073,98	75,33	13.173,84	Sedang	
10	Sragi	2.788,11	5.170,32	2,97	7.961,40	Sedang	
11	Raja Basa	2.904,30	8.779,14	0,00	11.683,44	Sedang	
12	Candipuro	1.890,90	8.090,19	539,01	10.520,10	Sedang	
13	Merbau Mataram	2.252,70	7.989,21	1.648,80	11.890,71	Tinggi	
14	Bakauheni	181,08	5.243,85	198,54	5.623,47	Sedang	
15	Tanjung Sari	530,46	7.568,91	699,48	8.798,85	Tinggi	
16	Way Sulan	3.378,42	719,91	0,00	4.098,33	Sedang	
17	Way Panji	617,76	2.500,47	0,00	3.118,23	Sedang	
Kab. Lampung Selatan		39.300,75	149.878,35	9.898,83	199.077,93	Tinggi	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko bencana kebakaran hutan dan lahan kelas tinggi. Hasil analisis tersebut harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah untuk lebih meminimalisir bencana kebakaran hutan dan lahan untuk diwaktu yang akan datang. Total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mengalami risiko sebesar 199.077,93 Ha, dengan risiko tertinggi di Kecamatan Jati Agung, sebesar 21.815,73 Ha, risiko terbesar

kedua pada Kecamatan Natar, sebesar 21.625,02 Ha, dan risiko terbesar ketiga pada Kecamatan Kalianda sebesar 15.956,64 Ha.

h. Resiko Gunung Api

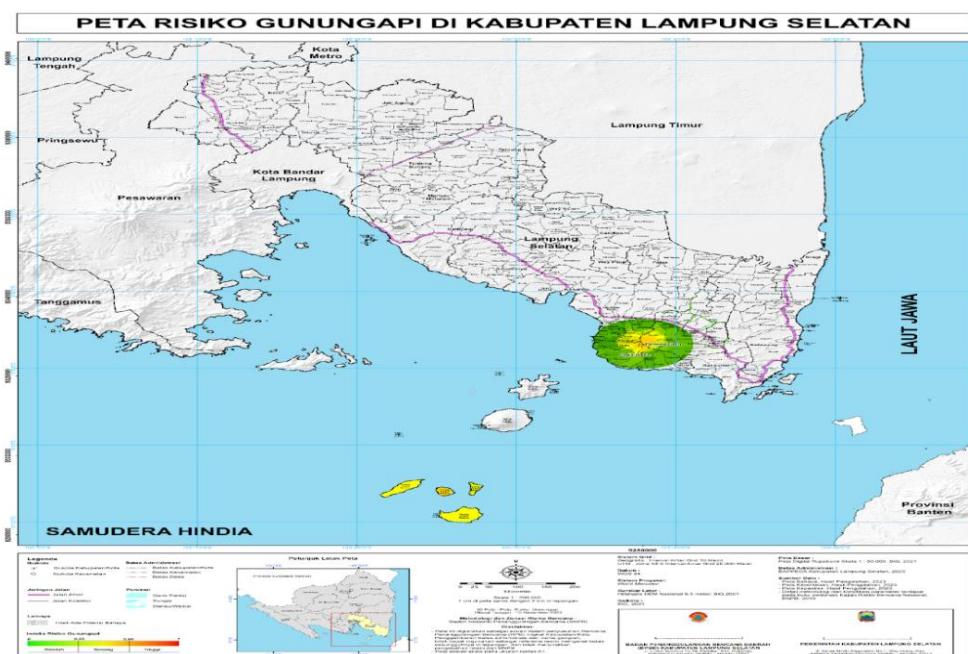
Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi ancaman letusan gunungapi yang signifikan karena wilayah ini mencakup dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Anak Krakatau dan Gunung Rajabasa. Gunung Anak Krakatau, yang terletak di Selat Sunda, merupakan gunungapi laut yang terus menunjukkan aktivitas erupsi skala kecil. Meskipun letusan-letusan kecil tersebut belum mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, potensi bahaya tetap ada. Letusan besar seperti yang terjadi pada tahun 2018 dapat memicu bencana ikutan, termasuk tsunami. Jika aktivitas vulkanik terus meningkat, masyarakat akan dilarang mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius tertentu sesuai rekomendasi dari pihak berwenang. Selain itu, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Gunung Rajabasa, gunungapi bertipe kerucut dengan ketinggian 1.281 mdpl. Gunung ini berjarak hanya sekitar 5 km dari Kalianda, ibu kota kabupaten. Aktivitas fumarol (hembusan gas panas) masih terpantau di kaki gunung, namun hingga kini belum ada studi yang mengindikasikan potensi letusan Gunung Rajabasa dalam waktu dekat.

Berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Lampung Selatan dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat bahaya tinggi terhadap letusan gunungapi. Kecamatan-kecamatan yang berpotensi terdampak terutama berada di bagian selatan kabupaten, mencakup Kecamatan Kalianda, Penengahan, Palas, Ketapang, Rajabasa, dan Bakauheni. Letusan Gunung Anak Krakatau umumnya menghasilkan gas, abu vulkanik, dan material piroklastik. Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi—yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan—merupakan wilayah terdekat dengan Gunung Anak Krakatau. Meskipun aktivitas letusan kecil belum berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di kedua pulau tersebut, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di zona potensi bahaya. Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat sebanyak 139 letusan Gunung Anak Krakatau terjadi sepanjang tahun 2023, meskipun sebagian besar berskala kecil. Data ini menjadi pengingat penting akan perlunya kesiapsiagaan menghadapi potensi letusan yang lebih besar di masa mendatang.

Berdasarkan Gambar 2.16 dapat dianalisis bahwa tingkat kerentanan wilayah terhadap potensi bahaya erupsi Gunungapi Rajabasa. Sebagai seorang ahli kebencanaan, peta ini penting untuk mengidentifikasi zona risiko serta mendukung pengambilan keputusan berbasis spasial dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kawasan dengan tingkat risiko tertinggi ditandai oleh warna merah yang mengelilingi pusat gunung api, mencakup area yang sangat rentan terhadap ancaman langsung seperti aliran lava, awan panas, lontaran material vulkanik, dan lahar. Zona kuning hingga hijau menggambarkan tingkat risiko menengah hingga rendah, tetapi tetap berada dalam zona paparan sekunder seperti hujan abu dan gangguan terhadap infrastruktur dasar. Peta ini juga memperlihatkan jaringan jalan, pemukiman, dan batas administrasi yang memudahkan analisis evakuasi dan respons darurat.

Gambar 2.16 Peta Risiko Gunung Api di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Diketahui bahwa beberapa wilayah di Kecamatan Kalianda dan sekitarnya termasuk dalam zona terdampak langsung, yang memerlukan prioritas dalam perencanaan jalur evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, dan sosialisasi kepada masyarakat. Integrasi peta risiko ini dengan data kependudukan dan tata guna lahan sangat vital untuk menyusun strategi mitigasi yang holistik, serta memperkuat ketahanan masyarakat lokal terhadap ancaman erupsi gunung api.

Tabel 2.11 Kelas Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas	
		Luas Risiko Letusan Gunung Api (Ha)					
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Natar	-	-	-	-	-	
2	Tanjung Bintang	-	-	-	-	-	
3	Kalianda	2.222,82	669,96		2.892,78	Sedang	
4	Sidomulyo	-	-	-	-	-	
5	Katibung	-	-	-	-	-	
6	Penengahan	2.984,58	920,43		3.905,01	Sedang	
7	Palas	74,34	0,00		74,34	Rendah	
8	Jati Agung	-	-	-	-	-	
9	Ketapang	23,67	0,00		23,67	Rendah	
10	Sragi	-	-	-	-	-	
11	Raja Basa	3.677,31	3.203,19		6.880,50	Sedang	
12	Candipuro	330,21	0,00		330,21	Rendah	
13	Merbau Mataram	-	-	-	-	-	
14	Bakauheni	40,23	0,00		40,23	Rendah	
15	Tanjung Sari	-	-	-	-	-	
16	Way Sulan	-	-	-	-	-	
17	Way Panji	-	-	-	-	-	
Kab. Lampung Selatan		9.353,16	4.793,58		14.146,74	Sedang	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Analisis risiko bencana letusan Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan mengindikasikan variasi tingkat risiko di berbagai kecamatan. Kecamatan Kalianda dan Raja Basa menunjukkan risiko tertinggi dengan luas risiko masing-masing sebesar 2.892,78 hektar dan 6.880,50 hektar, menempatkannya

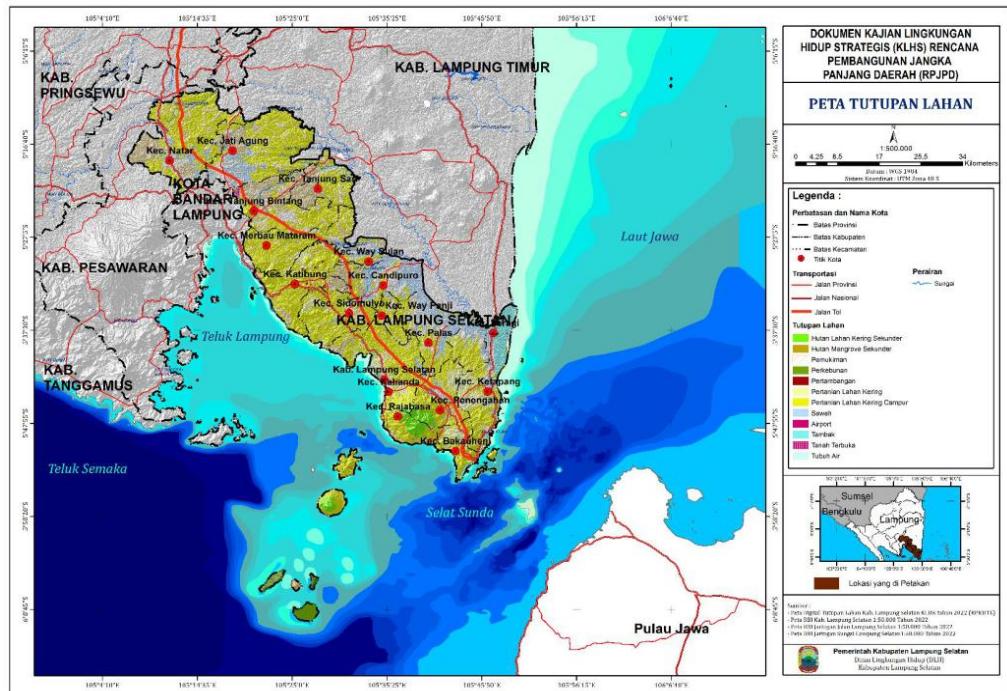
dalam kategori risiko sedang. Kecamatan Penengahan juga memiliki risiko yang signifikan sebesar 3.905,01 hektar, juga masuk dalam kategori risiko sedang. Di sisi lain, kecamatan Palas, Ketapang, Candipuro, dan Bakauheni menunjukkan risiko yang relatif lebih rendah, dengan luas risiko di bawah 100 hektar, dan masuk dalam kategori risiko rendah. Total luas risiko bencana letusan gunungapi di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 14.146,74 hektar, dengan kategori risiko sedang. Grafik berikut menggambarkan perbandingan luas risiko bencana letusan Gunung Anak Krakatau.

2.1.7. Penggunaan Lahan dan Kawasan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk lebih mengetahui kondisi penggunaan lahan dapat di lihat pada peta tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi liputan lahan citra lansat. Hasil peta tutupan lahan menunjukkan sebagian besar wilayah berwarna hijau yang menunjukkan bahwa tutupan lahan masih tinggi walaupun lebih banyak pada tutupan lahan pertanian.

Selanjutnya pada Gambar 2.17 dapat dianalisis bahwa peta ini menunjukkan dinamika antara kawasan terbangun, lahan pertanian, kawasan lindung, dan badan air yang saling berinteraksi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kawasan terbangun yang terkonsentrasi di sepanjang jalur utama dan pusat-pusat kota seperti Bandar Lampung dan Kalianda menandakan tekanan urbanisasi yang cukup tinggi, yang berpotensi mengganggu kawasan lindung di sekitarnya jika tidak diatur dengan baik.

Gambar 2.17 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan



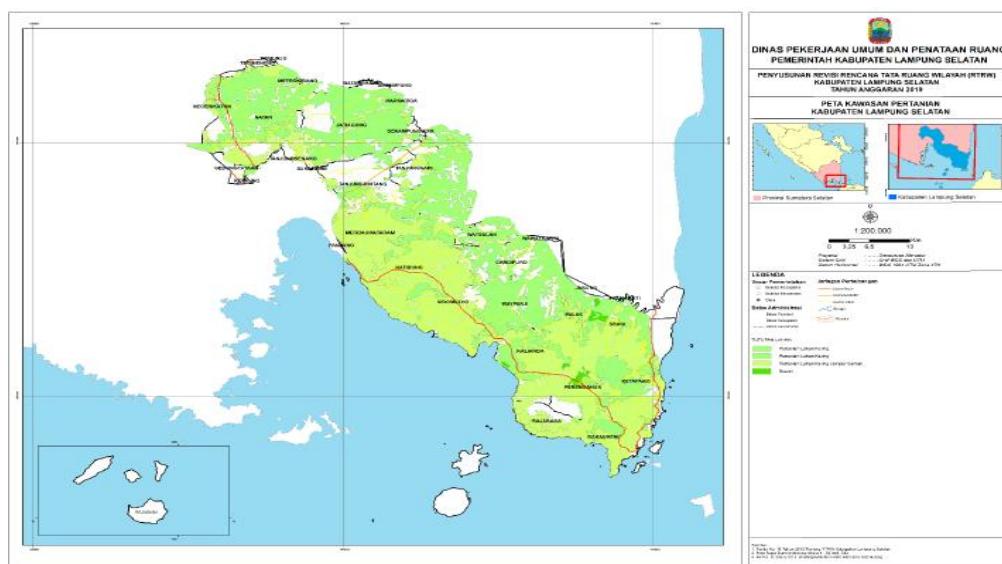
*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan, 2024*

Kawasan hutan lindung, taman nasional, serta sempadan pantai dan sempadan sungai yang ditandai dengan tutupan vegetasi alami merupakan zona-zona yang harus dipertahankan untuk fungsi ekologis dan pengendalian bencana, khususnya dalam menghadapi risiko banjir, longsor, dan abrasi pantai. Sementara itu, wilayah dengan tutupan pertanian lahan kering dan sawah memperlihatkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor agraris, yang memerlukan perlindungan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Di sisi lain, tampak pula wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan intrusi air laut, khususnya di sekitar Teluk Lampung dan Selat Sunda.

Gambar selanjutnya 2.18 menganalisis bahwa peta ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Lampung Selatan, terutama di bagian tengah dan selatan, telah dialokasikan sebagai kawasan budidaya pertanian yang tersebar dalam warna hijau muda dan hijau tua. Hal ini menandakan bahwa Lampung Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan regional, dengan luas lahan yang dapat dikembangkan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan hortikultura.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang ditandai dengan warna hijau terang merupakan zona strategis yang harus dilindungi dari alih fungsi lahan non-pertanian, terutama terhadap ekspansi permukiman dan industri. Keberadaan jaringan jalan dan infrastruktur pendukung yang merata menunjukkan potensi efisiensi dalam distribusi hasil pertanian dan aksesibilitas petani terhadap pasar. Namun demikian, tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam seperti kekeringan dan banjir musiman, yang dapat memengaruhi produktivitas dan ketahanan pangan. Optimalisasi kawasan pertanian ini harus dibarengi dengan inovasi teknologi budidaya, penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan), peningkatan kapasitas petani, serta perlindungan terhadap lahan produktif.

Gambar 2.18 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan



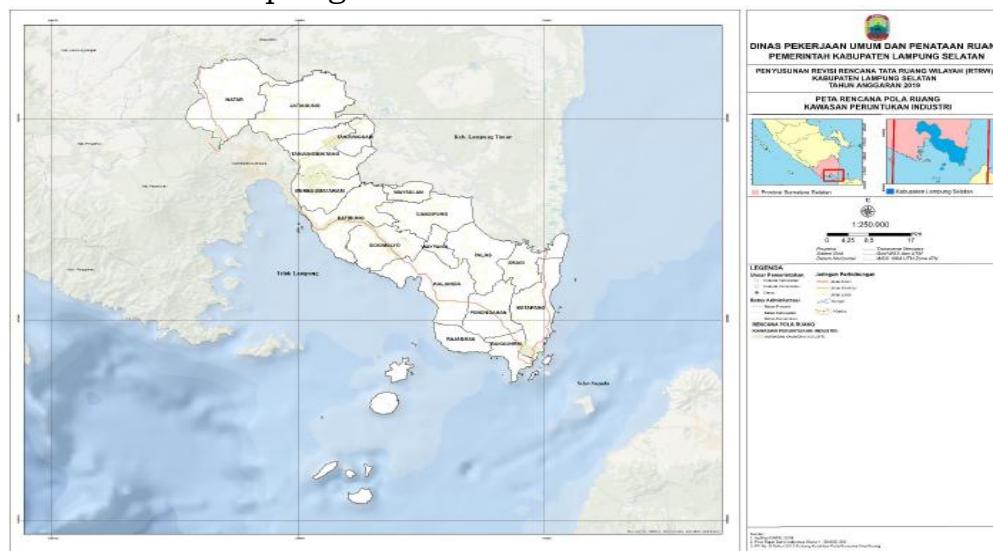
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan hasil pemetaan, kawasan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan tersebar merata di seluruh kecamatan. Namun, lahan pertanian sawah hanya terdapat di beberapa wilayah tertentu, yang ditandai dengan warna hijau terang pada peta. Sementara itu, sebagian besar kawasan pertanian lainnya didominasi oleh lahan ladang dan perkebunan.

Pada gambar 2.19, dapat dianalisis bahwa identifikasi batas wilayah, jaringan jalan utama, serta kedekatan dengan pelabuhan dan pusat distribusi seperti Teluk Lampung dan Selat Sunda, menunjukkan bahwa kawasan ini sangat potensial untuk pengembangan industri terintegrasi. Penempatan kawasan industri yang dekat dengan jalur transportasi laut dan darat menjadi kunci efisiensi dalam rantai pasok (supply chain), terutama untuk sektor-sektor seperti industri pengolahan hasil pertanian, logistik, dan manufaktur ringan.

Dari perspektif tata letak fasilitas (facility layout), arah pengembangan kawasan industri semestinya memperhatikan ketersediaan energi, air, dan sumber daya manusia yang terampil dari wilayah sekitarnya seperti Kalianda, Natar, dan Sidomulyo. Distribusi spasial wilayah kecamatan pada peta ini dapat mendukung perencanaan zonasi industri secara hierarkis: kawasan industri berat di pesisir untuk akses ekspor langsung, dan kawasan industri ringan di pedalaman yang dekat dengan sumber bahan baku atau pasar lokal. Analisis ini juga menuntut integrasi antara perencanaan ruang dan teknologi industri 4.0, yaitu bagaimana kawasan industri yang dirancang dapat adaptif terhadap sistem produksi cerdas, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi energi.

Gambar 2.19 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Kabupaten Lampung Selatan memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dan keluar ke berbagai daerah lainnya di Pulau Sumatra maupun Pulau Jawa. Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah ini semakin memperkuat potensinya sebagai lokasi pengembangan kawasan industri. Sejumlah kawasan industri telah berkembang di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan peta peruntukan wilayah, kawasan industri tersebut terutama berada di Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Bakauheni.

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilainya maka fungsi lindung semakin baik, begitu pula sebaliknya, yakni semakin rendah nilainya maka fungsi lindung semakin buruk. Berikut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan pedoman tersebut. Berikut adalah tabel yang digunakan untuk menghitung daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 2.12 Persentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan

No	JENIS TUTUPAN LAHAN	Luas (Km ²)	Persen
1	Bandara	1,33	0,06%
2	Hutan dataran rendah	25,81	1,16%
3	Hutan mangrove sekunder	4,12	0,19%
4	Hutan sekunder	39,22	1,76%
5	Lahan kering tidak produktif	3,02	0,14%
6	Pemukiman	303,97	13,65%
7	Perkebunan	206,52	9,27%
8	Pertambangan	2,62	0,12%
9	Pertanian lahan kering	108,63	4,88%
10	Pertanian lahan kering campur	1.228,06	55,13%
11	Sawah	237,35	10,66%
12	Tambak	46,09	2,07%
13	Tanah terbuka	9,65	0,43%
14	Tubuh air	0,87	0,04%
15	Lainnya	10,12	0,45%
LUAS TOTAL		2.227,38	100,00%

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (data diolah)

Secara umum, daya dukung lahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: kawasan potensial, kawasan kendala, dan kawasan limitasi. Kawasan Potensial Merupakan kawasan yang secara biofisik dan spasial memiliki kondisi yang mendukung pengembangan sebagai kawasan terbangun. Lahan dalam kategori ini umumnya memiliki kemiringan lereng, jenis tanah, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pembangunan. Kawasan Kendala merupakan kawasan yang masih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun, namun terdapat kendala teknis atau lingkungan, seperti risiko banjir, kemiringan lereng sedang, atau keterbatasan infrastruktur dasar. Pengembangan pada kawasan ini dapat dilakukan dengan penerapan teknologi tepat guna dan langkah mitigasi risiko secara terpadu. Kawasan Limitasi Merupakan kawasan yang tidak direkomendasikan untuk pengembangan sebagai kawasan budidaya atau terbangun karena memiliki keterbatasan yang signifikan, seperti kemiringan lereng curam, tanah rawan longsor, atau merupakan kawasan lindung. Pembangunan di kawasan ini dapat menimbulkan dampak negatif serius dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan pembangunan.

Tabel 2.13 Luasan Daya Tampung Lahan Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Proyeksi Penduduk tahun 2045	Daya Tampung
1	Natar	27.108,43	194.226	3.157.212
2	Jati Agung	23.411,77	304.349	3.533.996
3	Tanjung Bintang	17.147,87	126.304	1.245.826
4	Tanjung Sari	9.621,69	49.875	2.106.063
5	Katibung	16.201,94	106.761	1.424.612
6	Merbau Mataram	12.982,52	108.552	1.445.327
7	Way Sulan	4.566,27	35.810	839.584
8	Sidomulyo	13.249,29	118.152	2.104.621
9	Candipuro	12.359,77	76.161	1.247.997
10	Way Panji	3.672,04	25.391	491.252
11	Kalianda	17.441,02	132.780	2.144.434
12	Rajabasa	12.064,41	42.017	783.726
13	Palas	12.819,84	87.981	1.629.421
14	Sragi	8.777,20	51.853	1.254.456
15	Penengahan	10.807,50	76.830	1.378.208

16	Ketapang	14.336,68	74.288	1.340.067
17	Bakauheni	6.010,82	29.268	822.821
	Total	222.579	1.640.598	26.949.623

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa daya tampung lahan di Kabupaten tiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dapat menampung jumlah penduduk sampai tahun 2045 yang akan datang.

Tabel 2.14 Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /thn)	Kebutuhan Air (m ³ /thn)	Selisih	Status
1	Natar	202.805.253	191.800.000	11.005.253	Belum Terlampaui
2	Jati Agung	182.846.974	128.600.000	54.246.974	Belum Terlampaui
3	Tanjung Bintang	130.705.483	82.200.000	48.505.483	Belum Terlampaui
4	Tanjung Sari	73.236.837	31.800.000	41.436.837	Belum Terlampaui
5	Katibung	122.121.566	72.600.000	49.521.566	Belum Terlampaui
6	Merbau Mataram	101.086.749	56.500.000	44.586.749	Belum Terlampaui
7	Way Sulan	32.630.301	24.300.000	8.330.301	Belum Terlampaui
8	Sidomulyo	94.232.198	65.300.000	28.932.198	Belum Terlampaui
9	Candipuro	100.559.056	57.600.000	42.959.056	Belum Terlampaui
10	Way Panji	27.797.535	18.100.000	9.697.535	Belum Terlampaui
11	Kalianda	135.965.957	94.100.000	41.865.957	Belum Terlampaui
12	Rajabasa	95.659.761	24.800.000	70.859.761	Belum Terlampaui
13	Palas	98.631.949	60.900.000	37.731.949	Belum Terlampaui
14	Sragi	67.714.325	35.700.000	32.014.325	Belum Terlampaui
15	Penengahan	83.737.325	42.300.000	41.437.325	Belum Terlampaui
16	Ketapang	110.625.683	53.100.000	57.525.683	Belum Terlampaui
17	Bakauheni	46.725.424	24.500.000	22.225.424	Belum Terlampaui
T O T A L		1.707.082.376	1.064.200.000	642.882.376	Belum Terlampaui

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa daya dukung air kabupaten Lampung Selatan belum terlampaui karena jumlah ketersediaan air > kebutuhan air dan mengalami surplus kebutuhan air sebesar yaitu selisih dari ketersediaan air dan kebutuhan air sebesar 642.882.376 m³/tahun.

Fungsi penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan tiap kelas penyediaan air bersih pada tiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.15 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Lampung Selatan

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	1.335,37	124,49	6.955,88	235,99	766,65	9.418,37
CANDIPURO	88,74	821,87	713,35	2,09	66,90	1.692,95
JATI AGUNG	-	1.653,65	436,96	-	-	2.090,61
KALIANDA	2.206,82	3.207,93	5.014,36	8.036,59	-	18.465,71
KATIBUNG	1.096,99	3.805,12	1.817,08	27,54	56,25	6.802,97
KETAPANG	56,29	8.799,97	8.985,46	668,35	2.987,51	21.497,57
MERBAU MATARAM	119,22	971,32	1.115,65	-	2.655,82	4.862,01
NATAR	-	9.734,42	1.447,40	879,94	0,28	12.062,03
PALAS	-	16.739,55	16.629,14	18.589,85	833,43	52.791,96
PENENGGAHAN	56,39	267,77	18.160,57	20.927,61	208,38	39.620,72
RAJABASA	-	2.585,46	12.683,28	-	-	15.268,74
SIDOMULYO	3,44	990,94	1.082,78	7.329,24	875,00	10.281,40
SRAGI	330,12	4.178,61	738,60	2.551,02	-	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	3.372,93	11.839,86	-	-	15.212,79
TANJUNG SARI	-	21,24	264,05	1.810,10	246,47	2.341,85
WAY PANJI	-	0,25	261,83	-	-	262,08
WAY SULAN	-	-	98,25	611,64	-	709,88
Grand Total	5.293,36	57.275,52	88.244,47	61.669,94	8.696,68	221.179,98
%	2,39	25,90	39,90	27,88	3,93	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan,

Tahun 2024

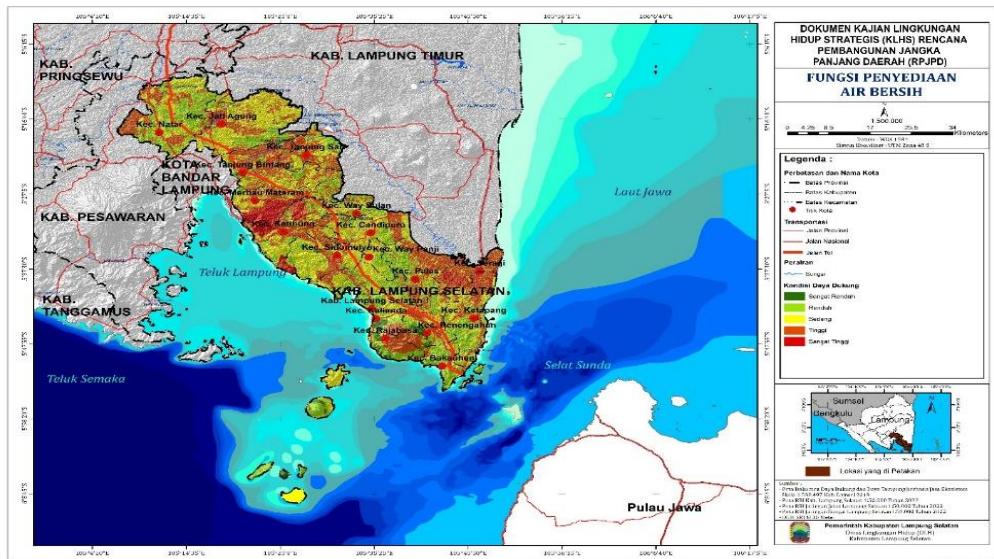
Daya dukung pangan Kabupaten Lampung Selatan, jika dilihat dari neraca beras hingga tahun 2024, menunjukkan kondisi surplus dengan indeks sebesar 4,09. Hal ini menunjukkan bahwa produksi beras masih jauh melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Meskipun terdapat ancaman berkurangnya luas lahan pertanian akibat meningkatnya kebutuhan lahan terbangun, ketersediaan beras di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 tetap tergolong melimpah. Berdasarkan perhitungan neraca beras, surplus beras mencapai 260.577 ton per tahun.

Selanjutnya berdasarkan Gambar 2.20 dapat dijelaskan bahwa persebaran kelas penyediaan air bersih dapat bahwa fungsi penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh kelas sedang sebesar 39,90% atau sebesar 88.244,47 Ha. Sedangkan untuk kelas

sangat rendah hanya sebesar 2,39%, untuk kelas rendah dan kelas tinggi nilainya hampir sama yaitu 25,90% dan 27,88%.

Gambar 2.20 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan Gambar 2.21 dapat dianalisis bahwa Kabupaten Lampung Selatan menggambarkan tingkat potensi wilayah dalam menyediakan air bersih berdasarkan kondisi ekologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Dari analisis spasial pada peta ini, dapat dilihat bahwa wilayah dengan potensi penyediaan air bersih yang tinggi (ditandai dengan warna hijau) terkonsentrasi di area hulu dan zona-zona berhutan serta wilayah perbukitan, yang memainkan peran penting sebagai daerah tangkapan air. Sebaliknya, wilayah berwarna merah dan oranye, yang tersebar luas di zona perkotaan seperti Kota Bandar Lampung, Kalianda, Natar, dan sekitarnya, menunjukkan tingkat potensi penyediaan air yang rendah hingga sangat rendah. Hal ini umumnya disebabkan oleh alih fungsi lahan, urbanisasi yang masif, dan berkurangnya area resapan air.

Kondisi ini menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan wilayah karena menandakan adanya tekanan terhadap daya dukung lingkungan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air domestik dan industri di masa depan. Wilayah pesisir dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung mengalami defisit air bersih, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan krisis sanitasi apabila tidak diantisipasi melalui strategi

pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Peta ini sekaligus menunjukkan pentingnya konservasi kawasan hutan dan daerah resapan sebagai bentuk intervensi ekologis untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah serta air permukaan.

Tabel 2.16 Daya Dukung Pangan

No.	Daya Dukung Pangan	2024
1	Luas lahan panen (Ha)	74.092
2	Produksi padi (ton)	345.034
3	Produktivitas lahan (ton/Ha/tahun)	4,66
4	Produksi beras (konversi GKG ke Beras 64,02%)	220.890
5	Jumlah penduduk (jiwa)	1.081.115
6	Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	78,12
7	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	84.457
8	Daya Dukung Pangan	4,09
9	Surplus beras (ton/tahun)	260.577

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan,
Tahun 2024

Penyediaan pangan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan tiap kelas penyediaan pangan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.17 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	23,19	72,00	484,70	58,37	8.780,12	9.418,37
CANDIPURO	-	-	767,37	925,58	-	1.692,95
JATI AGUNG	-	28,95	-	408,78	1.652,88	2.090,61
KALIANDA	5.423,90	584,96	3.778,44	2.146,81	7.304,31	19.238,41
KATIBUNG	24,92	88,70	218,20	5.097,49	1.373,67	6.802,97
KETAPANG	14,11	5.648,92	3.675,18	2.056,45	10.102,91	21.497,57
MERBAU MATARAM		2.696,00	-	2.166,00	-	4.862,01
NATAR	104,37	2.223,24		-	9.734,42	12.062,03
PALAS					52.791,96	52.791,96
PENENGAHAN	-	-	25.352,89	159,98	14.107,84	39.620,72
RAJABASA	-	-	-	15.268,74	-	15.268,74
SIDOMULYO	90,49	1.714,72	-	7.497,78	978,41	10.281,40
SRAGI	-	-	7.120,26	195,71	482,37	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	-	-	15.212,79	-	15.212,79
TANJUNG SARI	-	29,68	92,27	194,38	2.025,52	2.341,85
WAY PANJI	-	-	-	262,08	-	262,08

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
WAY SULAN	-	-	-	709,88	-	709,88
Grand Total	5.680,98	13.087,16	41.489,31	52.360,82	109.334,42	221.952,68
Persentase (%)	2,56	5,90	18,69	23,59	49,26	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2024

Klasifikasi Fungsi Penyediaan paling besar pada kelas sangat tinggi, hingga 49,26% atau sebesar 109.334,42 Ha. Kelas sangat tinggi dapat dilihat pada warna merah pada Gambar dibawah ini. Akan tetapi kecamatan Palas merupakan kecamatan yang paling besar luas wilayahnya untuk jasa penyediaan pangan, luas wilayah Kecamatan Palas memiliki luas untuk kelas sangat tinggi sebesar 52.791,96 ha.

2.2. Aspek Demografi

2.2.1 Jumlah Penduduk

Dalam perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, data kependudukan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terutama berkaitan dengan dwifungsi penduduk dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan. Sementara sebagai objek, penduduk menjadi target atau sasaran dari hasil pembangunan itu sendiri. Kedua peran ini harus dijalankan secara seimbang dan terpadu agar proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebanyak 1.124.683 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 2,1% dibandingkan tahun 2023. Tabel 2.23 menunjukkan bahwa Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, masing-masing sebanyak 203.709 jiwa dan 129.171 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Bakauheni memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 19.100 jiwa dan 25.536 jiwa.

Namun, jumlah penduduk yang besar tidak selalu mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Jati Agung sebesar 3,31% dan Kecamatan Merbau Mataram sebesar 3,04%. Sementara itu, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Ketapang menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah, masing-masing sebesar 1,07% dan 1,14%

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

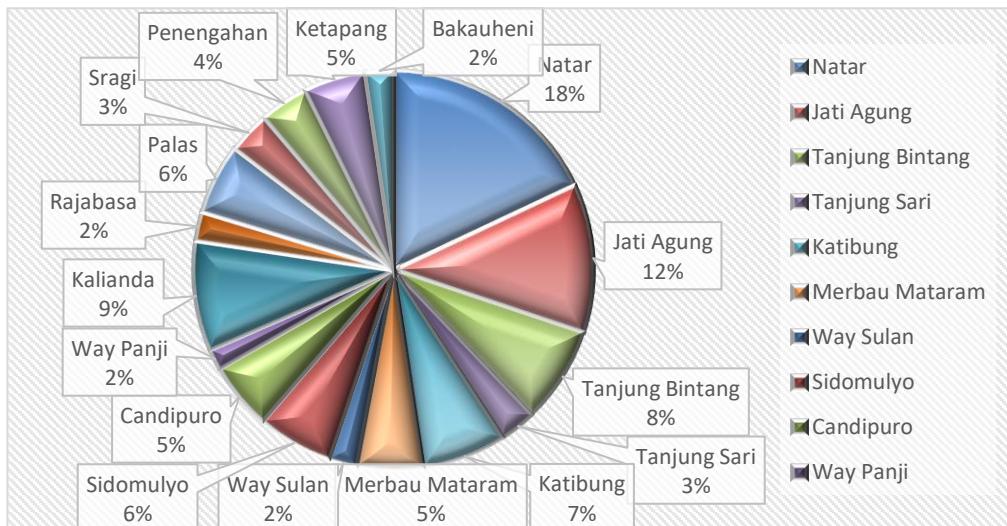
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
Natar	203.709	2,54
Jati Agung	129.171	3,31
Tanjung Bintang	89.312	2,70
Tanjung Sari	34.659	2,28
Katibung	76.403	1,75
Merbau Mataram	60.233	3,04
Way Sulan	26.110	2,07
Sidomulyo	69.592	1,81
Candipuro	61.096	1,33
Way Panji	19.100	1,22
Kalianda	100.311	1,66
Rajabasa	26.077	1,75
Palas	64.616	1,07
Sragi	37.351	1,18
Penengahan	45.049	1,84
Ketapang	56.358	1,14
Bakauheni	25.536	1,87
Lampung Selatan	1.124.683	1,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2024

2.2.2. Sebaran Penduduk

Pada Grafik 2.3 ditunjukkan bahwa data sebaran penduduk di Lampung Selatan tahun 2024. Terlihat bahwa Kecamatan Natar memiliki porsi terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, diikuti oleh Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Kalianda. Sementara itu, proporsi jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Rajabasa, Bakauheni, Way Panji dan Way Sulan dengan rata-rata distribusi luas berada pada kisaran 2 persen.

Grafik 2.3 Distribusi Penduduk Lampung Selatan 2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

2.2.3. Kepadatan Penduduk

Tabel 2.19 Kepadatan Penduduk Lampung Selatan, 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Natar	953
Jati Agung	785
Tanjung Bintang	688
Tanjung Sari	335
Katibung	435
Merbau Mataram	529
Way Sulan	561
Sidomulyo	568
Candipuro	721
Way Panji	497
Kalianda	622
Rajabasa	260
Palas	377
Sragi	456
Penengahan	339
Ketapang	519
Bakauheni	447
Lampung Selatan	535

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Salah satu bagian dari kepadatan penduduk di suatu wilayah berdasarkan Kajian Kependudukan, 2024, adalah kepadatan penduduk

aritmatika, yang menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas willyah.

Berdasarkan Tabel di atas rata-rata kepadatan penduduk aritmatika di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 535 jiwa/km², yang artinya setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh 535 jiwa. Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu lebih dari 10% dan kepadatan penduduk aritmatika juga yang terbesar yaitu 953 jiwa/km² dan 785 jiwa/km². Sementara Kecamatan Kalianda yang merupakan ibukota Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan memiliki kepadatan penduduk sebesar 8,83% dan kepadatan aritmatika sebesar 622 jiwa/km². Sedangkan presentase kepadatan penduduk terkecil dengan tingkat kepadatan aritmatika terkecil adalah Kecamatan Rajabasa, dengan kepadatan penduduk aritmatika sebesar 260 jiwa/km².

2.2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2024

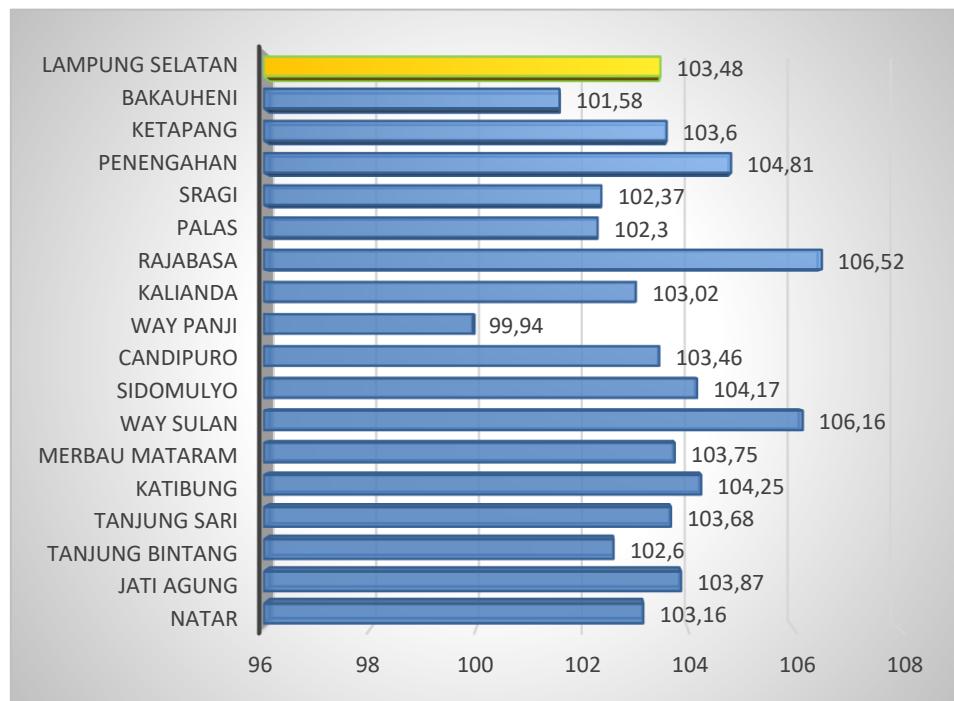
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	41.309	39.031	80.340
5-9	51.805	48.629	100.434
10-14	53.726	50.601	104.327
15-19	41.254	39.809	81.063
20-24	46.173	44.163	90.336
25-29	44.987	42.331	87.318
30-34	42.717	40.923	83.640
35-39	42.591	42.232	84.823
40-44	44.976	44.689	89.665
45-49	41.350	40.533	81.883
50-54	33.459	32.584	66.043
55-59	27.249	27.409	54.658
60-64	21.236	22.132	43.368
65-69	15.715	14.722	30.437
70-74	10.974	10.091	21.065
75+	12.353	12.930	25.283
Jumlah	571.874	552.809	1.124.683

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

Tabel diatas menunjukan bahwa, secara umum, jumlah anak-anak di Kabupaten Lampung Selatan dengan rentang usia hingga 10 tahun tergolong paling banyak dibandingkan kelompok umur lainnya. Sementara itu, kelompok usia produktif (20 hingga 45 tahun) juga mendominasi, dengan jumlah penduduk berkisar 80 ribu jiwa disetiap rentang kelompok umur. Adapun kelompok lanjut usia (diatas 60 tahun), khususnya usia 70 tahun ke atas, memiliki jumlah penduduk yang relative lebih sedikit. Kelompok ini merupakan yang terkecil, dengan jumlah sekitan 19 ribu jiwa.

2.2.5. Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Grafik 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum rasio jenis kelamin penduduk laki-laki di Kabupaten Lampung Selatan lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali Kecamatan Way Panji. Pada gambar di atas juga diketahui bahwa sebagian besar kecamatan memiliki sex rasio atau rasio jenis kelamin lebih dari 100 persen, kecuali Kecamatan Way Panji. Beberapa kecamatan memiliki *sex ratio* di atas rata-rata *sex ratio* Kabupaten Lampung Selatan, di antaranya Kecamatan Rajabasa yang memiliki *sex ratio* tertinggi di antara kecamatan lainnya.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Kemiskinan merupakan permasalahan besar di berbagai daerah yang menjadi tantangan untuk diselesaikan. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggung jawab multi pihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan menyangkut banyak aspek baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pangan, lingkungan, dan perumahan.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Definisi kemiskinan yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik yakni kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut *World Bank* (2000) kemiskinan diartikan dengan “*deprivation of well being*” atau kehilangan kesejahteraan, sedangkan *United Nations Development Program (UNDP)* mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Secara sederhana, ukuran kemiskinan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut.

Seseorang termasuk dalam kategori miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif.

Seseorang termasuk dalam kategori miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih

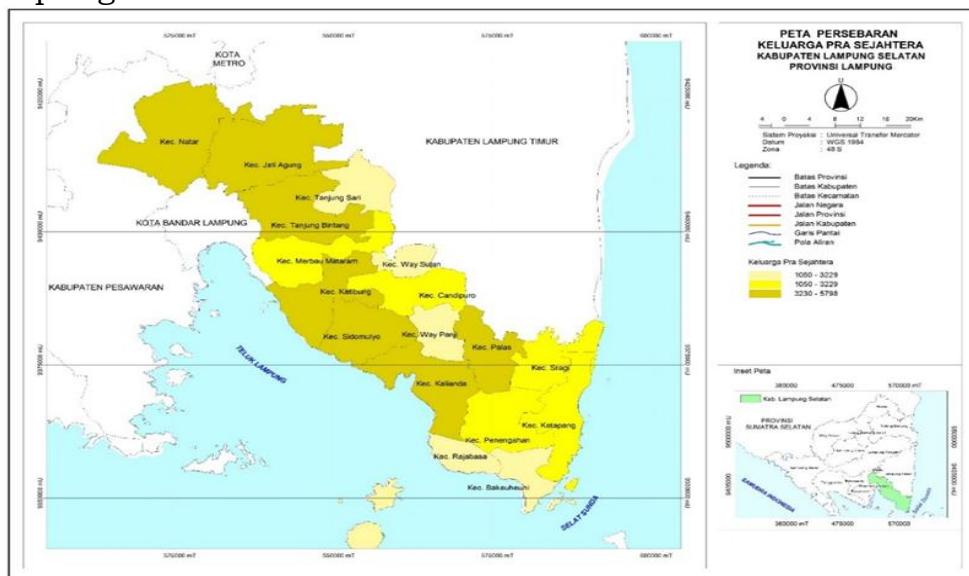
jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Konsep ini menjelaskan bahwa garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah.

3. Kemiskinan Kultural.

Seseorang termasuk dalam kategori miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri, yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Jika dilihat pada Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan maka terdapat 7 kecamatan dari 17 Kecamatan yang memiliki jumlah Keluarga Pra Sejahtera tergolong tinggi, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalianda dan Palas.

Gambar 3.1 Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2024

Dari jumlah penduduk miskin yang disajikan, terdapat penduduk yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem, yaitu kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Pemerintah telah menetapkan agenda

prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dan menetapkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu dari 212 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2022-2024. Pada Tahun 2023, penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 2,16 persen (22.620 jiwa) penduduk.

3.1. Kondisi Kemiskinan Makro

Kemiskinan terdiri dari beberapa indikator makro yang digunakan sebagai penanggulangan kemiskinan. Berikut ditampilkan tabel capaian kinerja tahun 2024 dari tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator	Capaian Nasional (Tahun 2024)	Capaian Provinsi Lampung (Tahun 2024)	Capaian Kab. Lampung Selatan (Tahun 2024)
1	Persentase penduduk miskin (P0)	9,03 %	10,69 %	12,57 %
2	Jumlah penduduk miskin	25,22 juta jiwa	941.23 ribu jiwa	132,38 ribu jiwa
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,36	1,53	1,94
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,09	0,33	0,46
5	Garis Kemiskinan (GK)	Rp 582.932	Rp 586.551,-	Rp 528.226,-

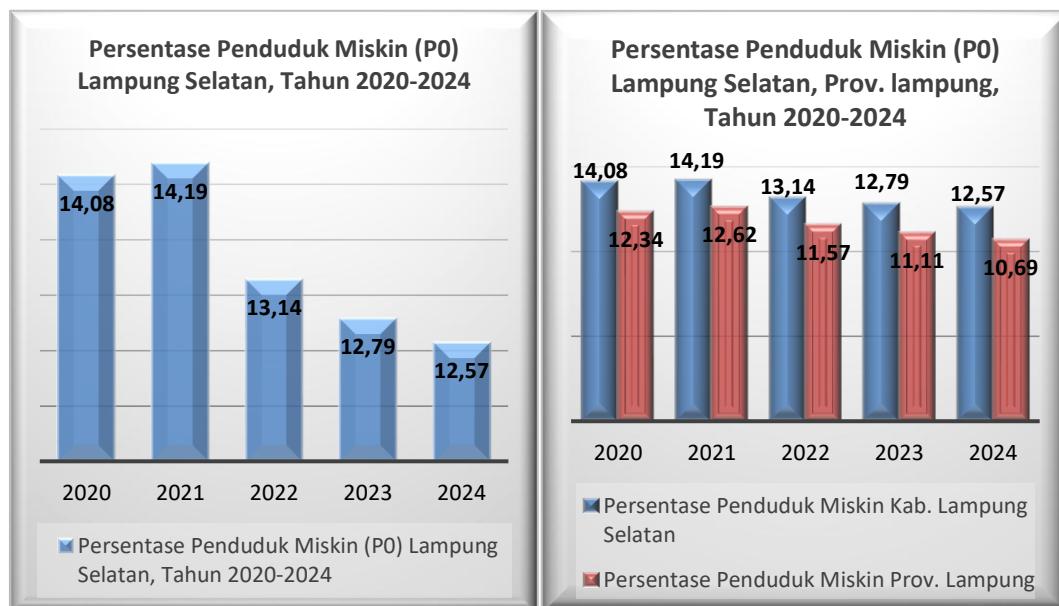
Sumber: BPS, 2024

Dari tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2022 maka diketahui bahwa Persentase penduduk miskin (P0) Kabupaten Lampung Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Lampung dan Nasional. Capaian jumlah penduduk miskin di

tahun 2024 kabupaten Lampung Selatan sebanyak 132,38 ribu jiwa atau sebesar 14,06% dari jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung. Sedangkan untuk Indeks kedalaman kemiskinan (P1), Kabupaten Lampung Selatan masih lebih besar dari Provinsi Lampung dan nasional yaitu 1,94, sedangkan untuk Indeks keparahan kemiskinan (P2) nilai Kabupaten Lampung

Selatan sama dengan Provinsi Lampung dan lebih besar 0,46 dari capaian nasional. Berikut pula ditampilkan analisis perkembangan antarwaktu dan analisis relevansi periode tahun (posisi relative, perkembangan antarwaktu, efektivitas dan analisis relevansi) dari aplikasi simple periode tahun 2020—2024 :

Grafik 3.1 Analisis Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Lampung Selatan



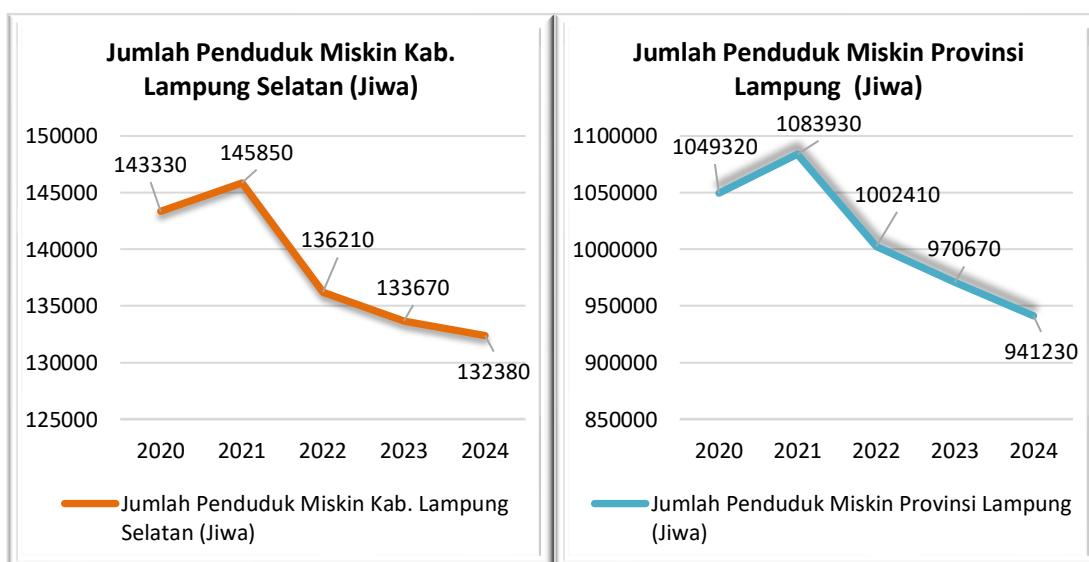
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Grafik 3.1 di atas, hasil analisis posisi relatif menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 12,57%. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan provinsi, nilai ini telah mengalami penurunan sebesar 0,22% dari tahun 2023.

Berdasarkan analisis perkembangan antar waktu, terlihat bahwa persentase penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan. Penurunan paling signifikan

terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 1,05% dibandingkan tahun 2021. Jika dilihat dari segi efektivitas, grafik menunjukkan penurunan angka kemiskinan selama periode 2020—2024. Hal ini menandakan bahwa semakin kecilnya angka kemiskinan mencerminkan meningkatnya efektivitas program atau kegiatan penanganan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan. Terlihat pula pada gambar 3.1 pada hasil analisis relevansi, angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Namun dalam hal ini meskipun angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi dan Nasional, akan tetapi Kabupaten Lampung Selatan mengalami trend grafik penurunan yang sama dengan Provinsi dan Nasional selama periode 2020—2024.

Grafik 3.2 Analisis Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan



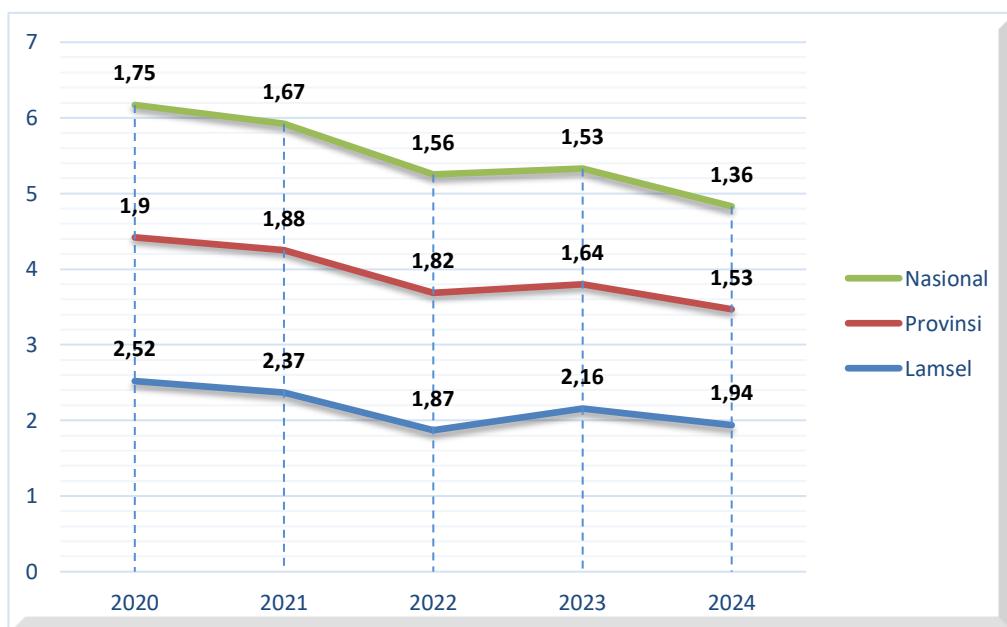
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Gambar 3.2, hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 132.380 jiwa. Jumlah ini menempatkan Kabupaten Lampung Selatan di urutan ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, setelah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah.

Berdasarkan analisis perkembangan antar waktu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami penurunan selama periode 2020–2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan penurunan sebanyak 9.640 jiwa. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat dampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya, analisis efektivitas yang ditampilkan dalam grafik menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2020–2024. Hal ini mencerminkan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Pada Gambar 3.2, hasil analisis relevansi juga menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan hingga tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, secara keseluruhan, tren selama lima tahun menunjukkan penurunan yang konsisten, dengan jumlah penduduk miskin terendah tercatat pada tahun 2024 sebanyak 132.380 jiwa.

Grafik 3.3 Analisis Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

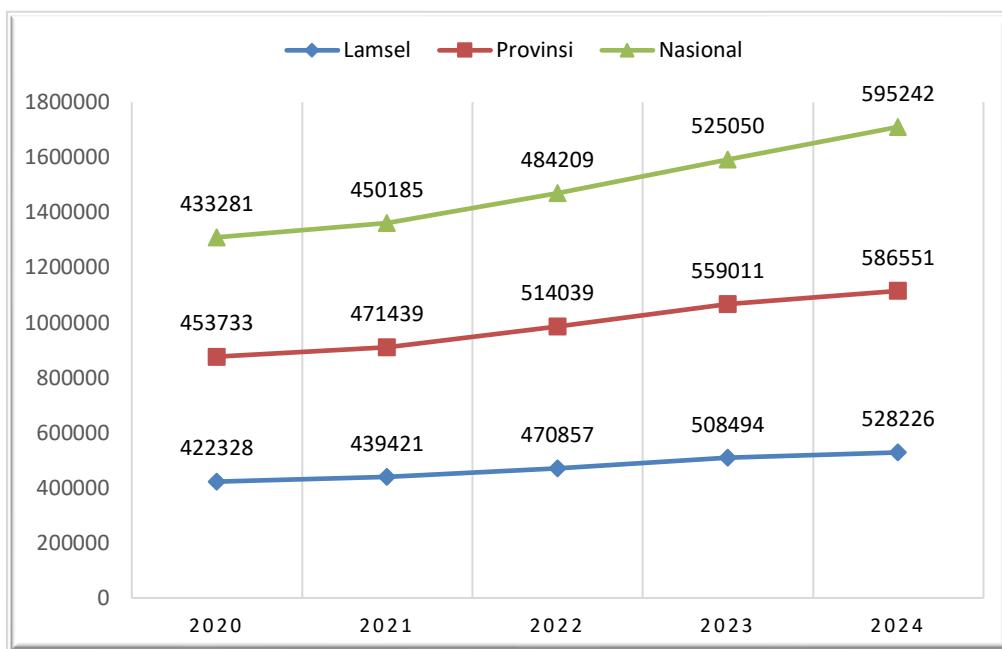
Pada Gambar 3.3 di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 1,94. Angka ini menempatkan Kabupaten

Lampung Selatan pada urutan ketiga terendah dalam indeks kedalaman kemiskinan di antara 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Meskipun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lampung Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 2,16 menjadi 1,94.

Hasil analisis perkembangan antar waktu menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan cenderung fluktuatif selama lima tahun (2020—2024). Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana indeks turun sebesar 0,5 poin. Namun, pada tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan kembali meningkat. Sementara itu, dalam analisis efektivitas selama periode 2020—2024, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mencapai 1,84.

Berdasarkan grafik 3.3 yang menyajikan hasil analisis relevansi, terlihat bahwa angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lampung Selatan masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional selama lima tahun terakhir. Namun, meskipun demikian, Kabupaten Lampung Selatan berada di bawah dua kabupaten lain di Provinsi Lampung dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir Barat.

Grafik 3.4 Analisis Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Gambar 3.5 di atas, hasil analisis posisi relatif menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 528.226,-. Angka ini menempatkan Kabupaten Lampung Selatan pada posisi ke-6 terbawah dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Meskipun Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan masih berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan tingkat nasional, angka tersebut telah mengalami peningkatan sebesar Rp 19.732,- dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan antar waktu, terlihat bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir (2020–2024), dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp 528.226,-. Meskipun pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2021, dampaknya tidak signifikan terhadap Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan, yang tetap menunjukkan peningkatan.

Sementara itu, hasil analisis efektivitas menunjukkan adanya grafik peningkatan selama periode 2020–2024. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024, dengan Garis Kemiskinan mencapai Rp 470.857,-. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas

program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian, berdasarkan hasil analisis relevansi, Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2020–2024 masih berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan tingkat nasional. Namun demikian, meskipun posisinya lebih rendah, Kabupaten Lampung Selatan tetap menunjukkan tren peningkatan grafik yang sejalan dengan Provinsi Lampung dan tingkat nasional selama periode tersebut.

3.2. Kondisi Sosial Kesejahteraan Penduduk

Terdapat 17 indikator sasaran yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,57 persen. Angka ini menunjukkan tren positif, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Penurunan sebesar 0,22 persen dibandingkan tahun 2023 mencerminkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang baik dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.

Pengaruh perempuan terhadap pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan juga cukup signifikan, dengan capaian Indeks Pembangunan Gender sebesar 89,96 persen dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan telah memberikan perhatian yang seimbang terhadap kedudukan dan kepentingan perempuan, sejajar dengan laki-laki. Namun demikian, peningkatan dalam pemberdayaan gender masih diperlukan, mengingat capaian Indeks Pemberdayaan Gender baru mencapai 63,28 persen. Pada sektor pendidikan, masih diperlukan perbaikan dan intervensi spesifik karena capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan hanya mencapai 7,78 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat setara dengan kelas 2 SMP. Dengan demikian, masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi atau

berhenti di jenjang SMP kelas 2. Sementara itu, harapan lama sekolah di Kabupaten Lampung Selatan adalah hingga jenjang Diploma 1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan berdampak pada tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang mencapai 4,48 persen. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tergolong baik, yaitu sebesar 67,34 persen, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penghambat yang turut memengaruhi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Selatan.

Secara kewilayahan, kondisi geografis berpengaruh signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan. Indeks Risiko Bencana saat ini tercatat sebesar 167,2, yang masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu 180. Namun, bencana banjir yang melanda Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Katibung telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk kehilangan tempat tinggal, kerusakan rumah, kehilangan harta benda, bahkan menelan korban jiwa.

Bencana ini turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kehilangan harta benda menyebabkan masyarakat yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Faktor kewilayahan lain yang turut memengaruhi kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan adalah keberadaan kawasan kumuh. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan, target penurunan kawasan kumuh pada tahun 2024 adalah sebesar 38,71 hektar. Kawasan kumuh sering kali identik dengan permukiman masyarakat miskin, sehingga penanganan kawasan kumuh menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkurangnya kawasan kumuh, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik.

Kondisi ini mencerminkan kemiskinan ekstrem yang sulit diatasi, karena masalah kemiskinan di kawasan kumuh cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lain. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh umumnya menghadapi berbagai permasalahan, seperti tempat tinggal yang tidak layak, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketiadaan pekerjaan tetap sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi terpadu dari berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya pada indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi sudah cukup baik yaitu sebesar 97,53% hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Lampung Selatan sudah dalam “akses layak” untuk kepemilikan jamban. Namun untuk Persentase Rumah Tangga yang Sudah Terlayani oleh Akses Penyediaan Air Minum baru mencapai 84,47%.

Pada sektor ekonomi, indikator Indeks Ketahanan Pangan juga berpengaruh terhadap penanganan penanggulangan kemiskinan. Nilai Indeks Ketahanan Pangan sebesar 85.46% mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik dalam mempersiapkan dan kestabilan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan. Pertanian sebagai sektor basis masih menjadi penyokong utama PDRB Kabupaten Lampung Selatan. Indikator Laju Tingkat Inflasi juga sangat berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan. Jika terjadi inflasi kenaikan harga maka masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan maka akan semakin terpuruk. Kondisi ini masyarakat miskin sangat bergantung pada bantuan-bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah sebagai konsekwensi terjadi inflasi.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Capaian	Kebijakan
				Tahun 2024		
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	12	12,57	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Capaian	Kebijakan
						Tahun 2024
2	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	Meningkatnya pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (poin)	90,2	89,96	baik serta kesejahteraan social
		Meningkatkan Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender (poin)		61	63,28
3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (angka tahun)	7,9	7,78	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan social
			Angka Harapan Lama Sekolah (angka)		12	12,65
4	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	70,5	74,46	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan social
5	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persentase)	0,72	1,33	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial
6	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka/TPT (persen)	4,1	4,48	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
				66	67,34	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Capaian	Kebijakan
						Tahun 2024
7	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana (poin)			kesejahteraan social
8	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Menurunnya kawasan kumuh	Percentase penurunan Kawasan kumuh (14,35 ha)	178	167,2	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
9	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak	Percentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman (persen)	98,06	97,53	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
10	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Meningkatnya Rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (persen)	Percentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (persen)	82,62	84,47	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
11	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Nilai Tukar petani (NTP)	105	129,01	Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Capaian	Kebijakan
				Tahun 2024	Tahun 2024	
12	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Meningkatnya kemandirian Pangan Daerah	Indeks ketahanan pangan (poin)		80,8	85,6
13	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)		12,7	14,75
14	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)		3 (± 1)	3,52

Sumber: RPJMD Kab. Lampung Selatan 2021-2026

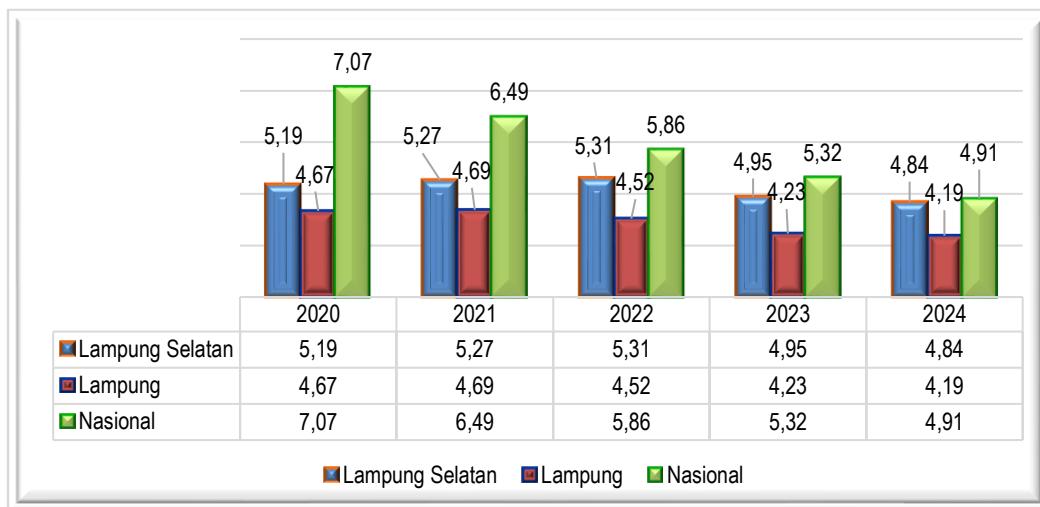
3.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan rendahnya penawaran kerja

yang terserap terutama tingkat pendidikan SMK dan diploma serta perampingan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. TPT Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari Tahun 2023 yang sebesar 4,95 persen menjadi 4,84 persen. Hal ini menjadi pencapaian yang cukup baik mengingat pada tiga tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan, terutama akibat dampak Pandemi Covid-19. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan *stakeholders*, termasuk penyelenggaraan *Job Fair* pada tahun 2022 hingga 2024. Jika dilihat dari dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat yang sebesar 214.192 jiwa atau 40,15 persen dari total angkatan kerja, maka dapat dikatakan bahwa kualitas angkatan kerja Kabupaten Lampung Selatan masih tampak rendah.

Grafik 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan

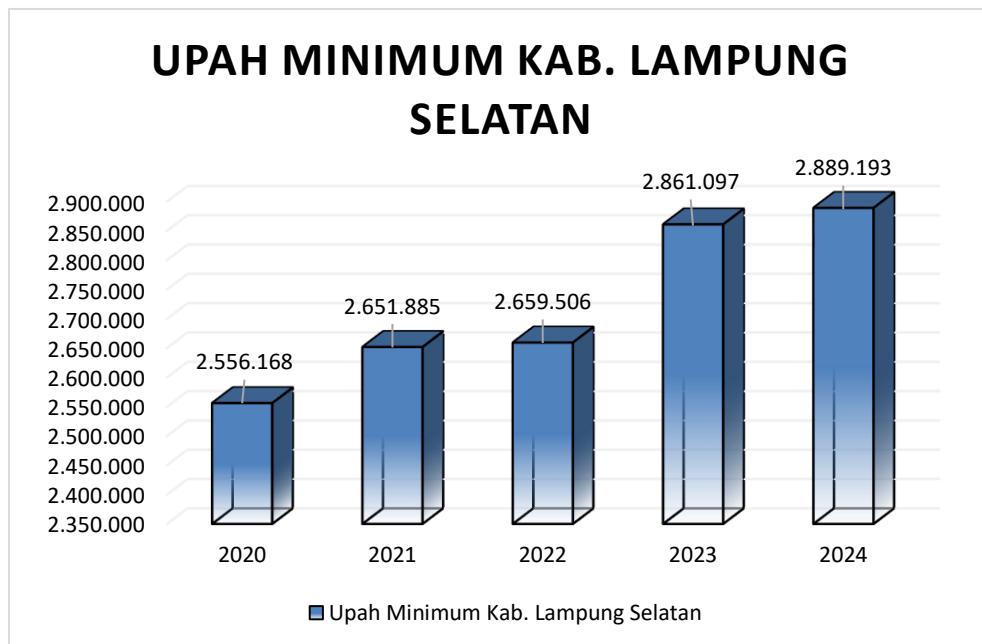


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Upah minimum memiliki pengaruh positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena dengan adanya standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan pekerja atau karyawan dapat memperoleh penghasilan yang layak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja serta

produktivitas mereka. Upah minimum adalah standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah, yang harus diberikan oleh pengusaha atau pelaku industri kepada pekerja di lingkungan usaha atau kerjanya. Di Kabupaten Lampung Selatan, upah minimum terus mengalami kenaikan.

Grafik 3.6 yang menunjukkan perkembangan upah minimum di Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

3.2.2 Bidang Kesehatan

Indikator kesehatan baik secara kolektif maupun tersendiri memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Kabupaten Lampung Selatan memiliki pelayanan kesehatan didukung dalam segi sarana prasarana, infrastruktur kesehatan dan alat kesehatan, kesehatan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk, perbaikan derajat kesehatan masyarakat harus disertai oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit dan puskesmas. Di Kabupaten Lampung Selatan menurut data statistik daerah terdapat 6 Rumah Sakit, 15 Puskesmas Rawat Inap, 13 Puskesmas Non Rawat Inap, 73 Puskesmas Pembantu, 1067 Posyandu 1 Laboratorium Kesehatan Daerah, tingkat kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan dikaitkan oleh beberapa program kesehatan antara lain :

A. Universal Health Coverage

Universal Health Coverage (UHC) merupakan program jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau. UHC Kabupaten Lampung Selatan di tampilkan pada table dibawah.

Tabel 3.3 *Universal Health Coverage* (UHC), 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	80,45	81,73	97,33	101,76	98,69

Sumber: *Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka*, 2024

Berdasarkan data, Cakupan UHC Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 81,23% menjadi 101,76%. Atas capaian tersebut Kabupaten Lampung Selatan meraih Penghargaan UHC pada tahun 2023. Penghargaan UHC adalah apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mencapai target 98% dari total penduduk perlindungan BPJS untuk masyarakatnya.

B. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta untuk memastikan bahwa penduduk dapat mengakses pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan umumnya memberikan manfaat berupa akses ke fasilitas kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Penduduk miskin dan rentan sering kali memiliki kemampuan finansial yang rendah, sehingga biaya layanan kesehatan menjadi kendala utama bagi mereka. Dengan adanya jaminan kesehatan, hambatan berupa biaya dapat diminimalkan, sehingga penduduk miskin dan rentan dapat menjaga kesehatannya. Kondisi kesehatan yang baik secara langsung akan berdampak positif pada produktivitas mereka.

Grafik 3.7 Kepesertaan Jaminan Kesehatan



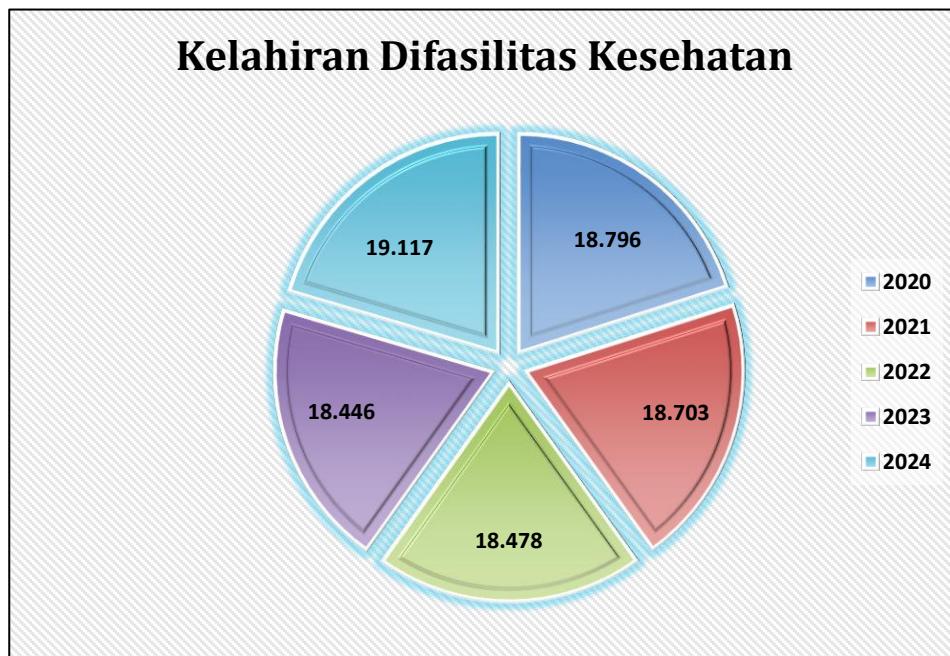
Sumber : Dinas Kesehatan 2024

Berdasarkan grafik 3.7 di atas kepesertaan jaminan kesehatan di lampung selatan sampai dengan tahun 2024 mengalami kondisi yg fluktuatif, dimana peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan terjadi di tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 180.768 jiwa, pada tahun 2024 adanya pengurangan kepesertaan jaminan kesehatan dari BPJS pusat di akibatkan penghapusan data kepesertaan ganda.

C. Kelahiran di Fasilitas Kesehatan

Kelahiran di Fasilitas Kesehatan berperan sangat penting guna menekan terjadinya kematian bagi ibu dan bayinya. Dengan melahirkan difasilitas kesehatan ibu dan bayi akan mendapatkan pertolongan dari petugas yang berkompeten dalam bidangnya.

Grafik 3.8 Kelahiran di Fasilitas Kesehatan



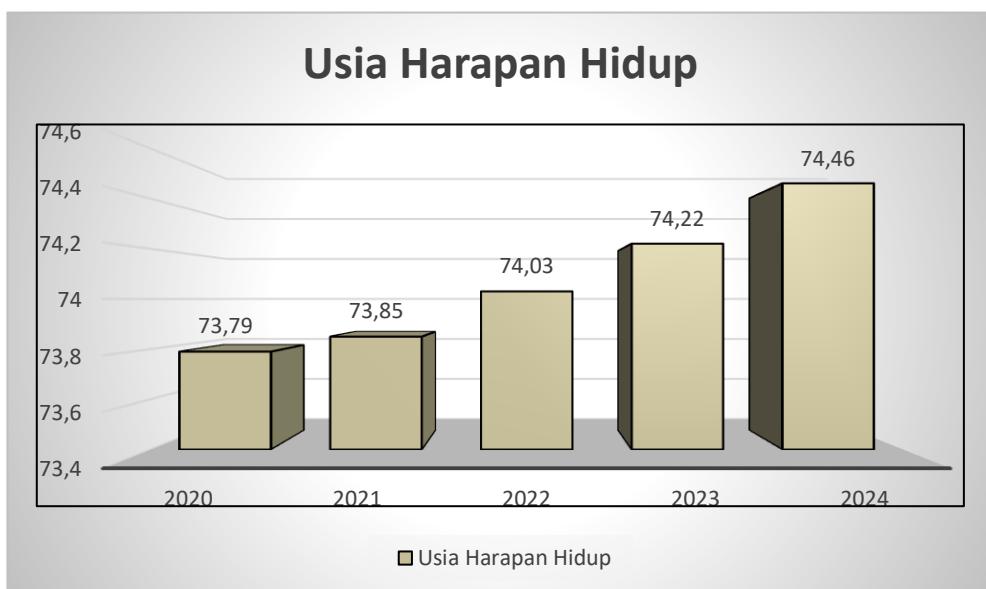
Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Dari Grafik 3.8 diatas memperlihatkan adanya penurunan kesedaran masyarakat yang melahirkan difasilitas kesehatan dari tahun 2021-2023 namun pada tahun 2024 angka kelahiran di fasilitas kesehatan meningkat 671 dengan total kelahiran di fasilitas kesehatan 19.117

D. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan peningkatan sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hingga Tahun 2024, Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan mencapai 74,46 tahun.

Grafik 3.9 Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan 2024

Tabel 3.4 Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Selatan	73,79	73,85	74,03	74,22	74,46
Lampung Barat	73,42	73,47	73,63	73,78	73,96
Tanggamus	73,44	73,51	73,69	73,87	74,08
Lampung Timur	73,52	73,56	73,75	73,95	74,19
Lampung Tengah	73,79	73,82	73,99	74,17	74,38
Lampung Utara	73,48	73,54	73,73	73,91	74,12
Way Kanan	73,68	73,73	73,93	74,11	74,31
Tulang Bawang	73,44	73,47	73,64	73,81	74,02
Pesawaran	73,44	73,50	73,65	73,8	74,00
Pringsewu	73,90	73,98	74,15	74,33	74,56
Mesuji	73,35	73,40	73,56	73,71	73,90
Tulang Bawang Barat	73,59	73,62	73,83	74,02	74,23
Pesisir Barat	73,39	73,46	73,61	73,75	73,93
Bandar Lampung	74,10	74,14	74,33	74,53	74,79
Metro	74,70	74,73	74,92	75,14	75,43
Provinsi Lampung	73,66	73,73	73,95	74,17	74,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Percepatan pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan harus terus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan, yang tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan saja, tetapi juga mencakup hampir

semua sektor pembangunan seperti sarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan, dan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi penduduk serta meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata harus konsisten diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang optimal.

E. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Di bidang kesehatan, terdapat 12 indikator pelayanan yang wajib dipenuhi untuk memastikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Keterbatasan biaya yang dialami oleh masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Berikut adalah capaian hasil standar pelayanan minimal di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator	Sasaran	Capaian	Persen (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20,915	19,325	92,68%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20,833	19,177	93,11%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19,642	18,300	93,95%
4	Pelayanan Kesahatan Balita	96,956	96,033	99,13%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	171,580	168,190	98,27%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	715,487	708,770	99,17%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	113,043	109,158	97,09%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	195,988	195,988	100%

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus (DM)	8,693	8,693	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1,793	1,793	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis (TBC)	16,583	16,583	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi (HIV)	25,409	25,409	100%

Sumber : Aplikasi SPM Bangda Kemendagri, 2024

3.2.3 Bidang Pendidikan

A. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan menjadi aspek penting yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan, yang berdampak pada meningkatnya produktivitas individu. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan masyarakat juga meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Berikut adalah capaian hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator	Sasaran	Capaian	Persen (%)
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	39,824	20,939	66,25%
2	Pendidikan Dasar	183,157	165,999	92,21%
3	Pendidikan Kesetaraan	15,158	4,583	44,19%

Sumber : Aplikasi SPM Bangda Kemendagri, 2024

B. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan diukur melalui tingkat pendidikan, menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

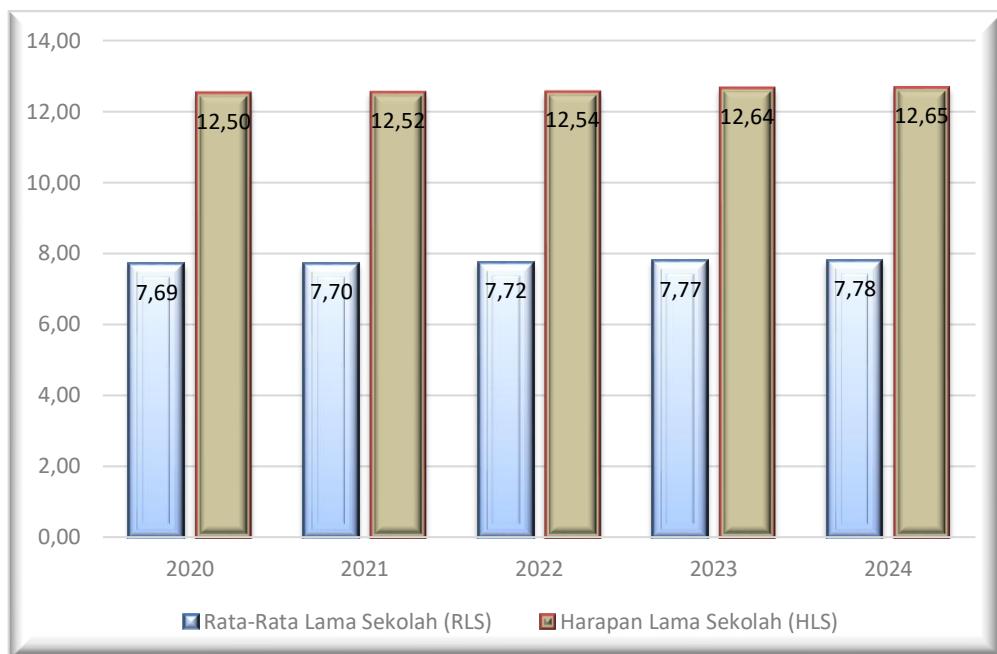
RLS Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan hanya sebesar 0,01 menjadi sebesar 7,78 tahun, yang memiliki arti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan hingga SMP kelas VII. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah harus terus memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Lampung Selatan untuk mendukung tercapainya target RLS 12 tahun. Rendahnya RLS ini juga berdampak kepada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. RLS masih menunjukkan nilai yang rendah jika

dibandingkan dengan harapan lama sekolah di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024, nilai RLS Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 7,78 tahun sedangkan nilai HLS sebesar 12,65 tahun.

Grafik 3.10 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024



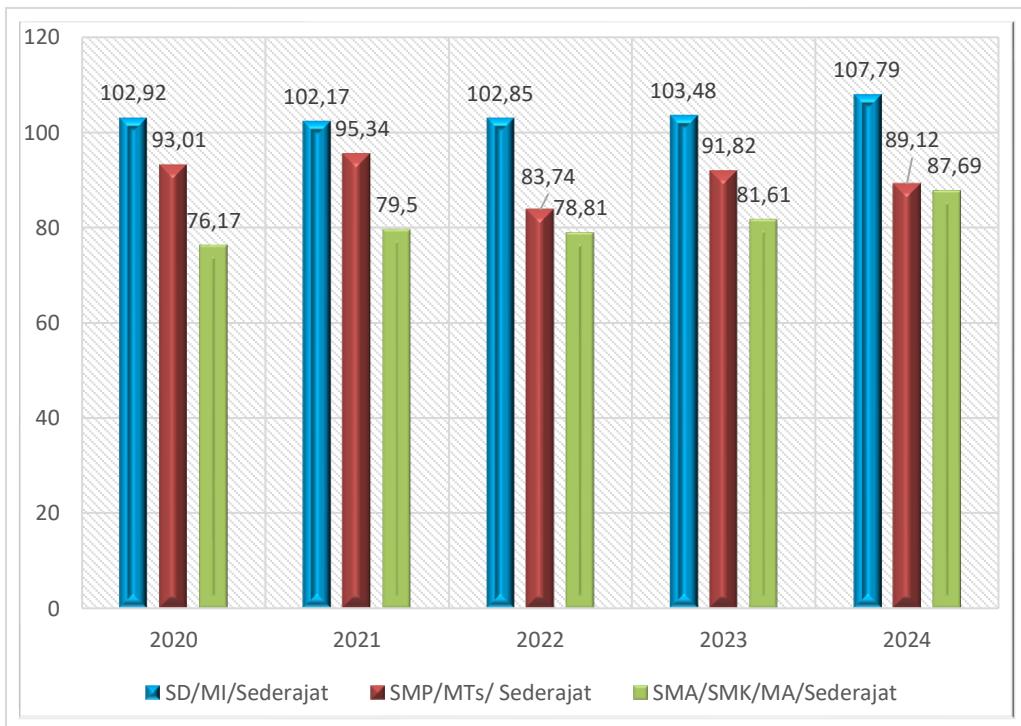
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

C. Angka Partisipasi Kasar

Daya saing SDM dapat dicerminkan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah Angka Pertisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kelompok usia. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang

pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 APK kelompok sekolah dasar di Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 102,92 dan menurun pada tahun berikutnya menjadi 102,17. Pada jenjang sekolah menengah pertama yang pada tahun 2020 berada pada angka 93,01 fluktuatif hingga pada tahun 2024 APK Sekolah Menengah Pertama menjadi 89,12. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, APK pada kelompok menengah atas justru mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, APK kelompok SLTA/MA sederajat tercatat sebesar 76,17 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga mencapai nilai APK 87,69.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk

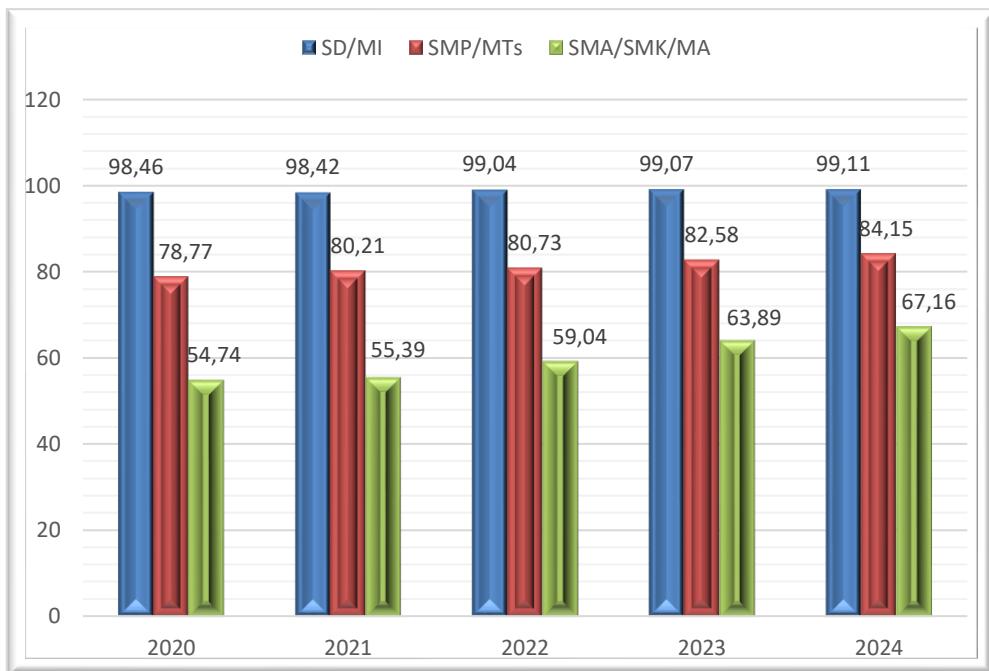
SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan Dasar dan Menengah pertama yang masih bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa APM di kelompok sekolah dasar cenderung terjadi peningkatan APM hingga tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya yakni dari nilai APM 98,46 di tahun 2020 menjadi 99,11 di tahun 2024. Pada kelompok sekolah menengah pertama terjadi tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dimana APM kelompok sekolah menengah pertama mencapai 84,15. Sama halnya dengan kelompok sekolah menengah pertama, APM sekolah menengah atas tahun 2019 berkisar di angka 54,74, namun pada tahun 2024 meningkat relatif besar hingga mencapai 67,16. Hal ini tentu menggembirakan bagi pemerintah daerah, karena dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat.

E. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS,

maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	07 – 12 (Sekolah Dasar)	99,78	100	99,80	99,72	99,74
2	13-15 (Sekolah Menengah Pertama)	94,76	93,31	93,42	93,98	98,23
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	65,90	71,83	71,93	72,36	72,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lampung Selatan pada rentang usia 7-12 memiliki tren stabil selama rentang waktu 2020-2024, yaitu berkisar di angka 99. Namun persentase APS usia Sekolah Dasar di Lampung Selatan masih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata APS Provinsi Lampung. Selaras dengan kondisi ini pada rentang usia 13-15 tahun menunjukkan tren yang juga fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun

2020 APS berada pada angka 94,76 dan kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya dan berada pada APS 93,31. Penurunan APS pada kelompok SMP/MTs sederajat ini berlangsung hingga tahun 2023 yang mencapai APS 93,98 namun kembali mencapai angka 98,23 pada tahun 2024. Sementara, APS pada kelompok sekolah menengah atas bergerak stabil, pada tahun 2021 diketahui APS kelompok SLTA/MA sederajat berada pada posisi 71,83 dan sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,36. Walaupun peningkatan yang relatif kecil, namun APS kelompok SLTA/MA sederajat Lampung Selatan ini berada di atas rata-rata APS Provinsi Lampung.

F. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2020 tepat 0,17% pada jenjang sekolah menengah pertama dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 0,005 persen. Angka yang sama pula terjadi pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 Angka Putus Sekolah kembali meningkat menjadi 0,06 dan di tahun 2024 kondisi ini meningkat hingga mencapai 1,33. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Angka Putus Sekolah dari per 10.000 murid Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Orang Tidak Sekolah	0,17	0,005	0,005	0,06	1,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

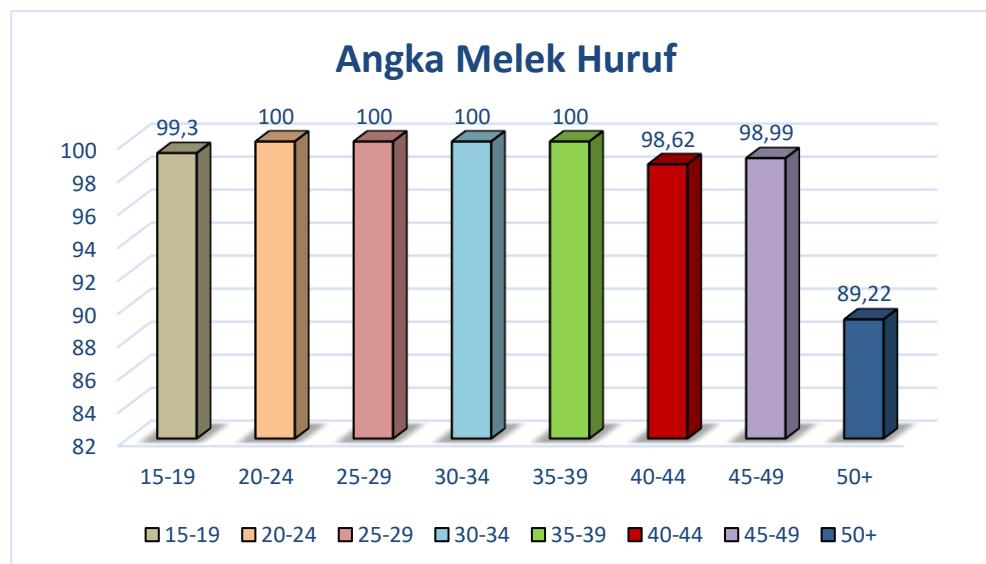
Anak putus sekolah merupakan permasalahan yang akan menghambat kemajuan dan daya saing bangsa. Anak putus sekolah disebabkan oleh Banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, diantaranya kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial dan faktor kesehatan. Anak putus sekolah perlu ditangani dengan baik, diantaranya dengan

kebijakan membebaskan biaya sekolah, memberikan beasiswa, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan, membangun sekolah dan mengirim guru pengajar ke daerah terpencil.

G. Melek Aksara/Melek Huruf

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Lawan kata “melek aksara” adalah buta huruf atau tuna aksara, di mana ketidakmampuan membaca dan menulis ini masih menjadi masalah, Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Tingkat Melek Huruf tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat di grafik 3.13 dibawah:

Grafik 3.13 Angka Melek Huruf



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan
2024

Dari Grafik 3.13 diatas memperlihatkan bahwa masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dari rentang usia 15—19 sampai dengan 50+ tahun rata-rata sudah melek huruf. Di tahun 2023 rata-rata melek huruf masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

sebesar 98.53. sehingga, masyarakat Kabupaten Lampung Selatan tersisa 1,47% dalam keadaan buta huruf.

3.2.4 Bidang Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB digunakan sebagai indikator statistik kuantitatif untuk mengevaluasi dan memantau hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah.

Perkembangan PDRB sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi wilayah serta kondisi sosial dan politik yang mendukung. Dalam praktiknya, PDRB terdiri dari dua jenis:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) – digunakan untuk menganalisis pendapatan per kapita dan struktur ekonomi.
2. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) – digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi.

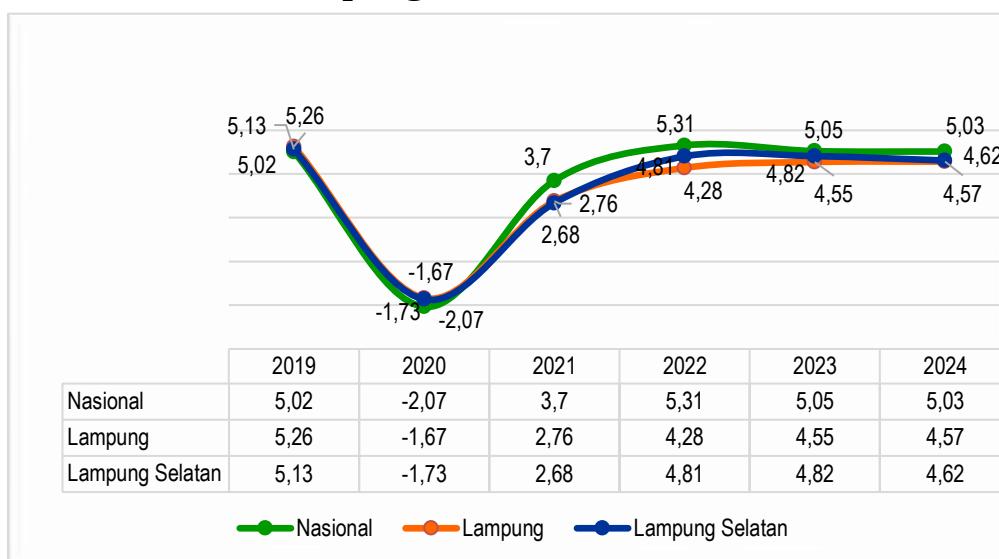
Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan dan mencapai Rp35.077.050 juta. Demikian pula, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) juga meningkat menjadi Rp60.320.970 juta. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 3.9 PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2020	44.293.000,00	29.743.300,00
2021	46.090.820,00	30.517.400,00
2022	51.285.000,00	31.986.260,00
2023	55.994.610,00	33.528.670,00
2024	60.320.970,00	35.077.050,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Grafik 3.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

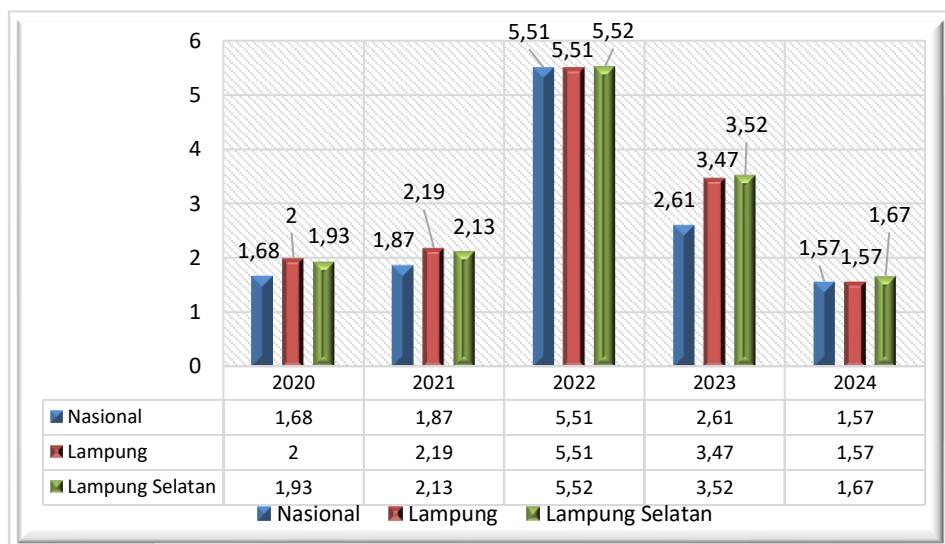
Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan kembali mengalami kenaikan sebesar 2,68%. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pada Tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan mencapai 4,81% dan 4,82%, melampaui capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,28% dan 4,55%, namun masih berada di bawah capaian Nasional sebesar 5,31% dan 5,05%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur normal serta pembangunan infrastruktur yang semakin intensif di Kabupaten Lampung Selatan.

B. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung terus menerus dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Angka inflasi Kabupaten Lampung Selatan yang sejak Tahun 2020 merujuk pada inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city*, selama lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi di luar estimasi sebesar 3+1 persen ditengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global. Pada Tahun 2022, seluruh wilayah mengalami peningkatan inflasi hingga di atas 5 persen, dimana Kabupaten Lampung Selatan

sebesar 5,52 persen. Pada Tahun 2024, sebagai hasil upaya pengendalian inflasi daerah, inflasi Kabupaten Lampung Selatan turun menjadi 1,67 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan Nasional yang sebesar 1,57 persen.

Grafik 3.15 Laju Inflasi di Lampung Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi inflasi, antara lain melalui monitoring pemerataan distribusi sejumlah komoditas, operasi pasar untuk mengontrol harga barang pokok, pasar murah di setiap kecamatan untuk akses harga terjangkau, gerakan tanam pangan cepat panen untuk meningkatkan produksi pangan, intensifikasi jaringan pengaman sosial untuk melindungi masyarakat rentan, dan penguatan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan efektivitas penanganan inflasi. Operasi Pasar Murah biasanya dilakukan di awal tahun. Hal ini berbarengan dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di 17 kecamatan. Dengan stabilnya harga diharapkan laju inflasi bisa terjaga.

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator ini juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan

nilai tambah, berdasarkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita, terutama apabila disertai dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Secara spesifik, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan rata-rata nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil per kapita, karena telah disesuaikan dengan inflasi dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.

**Tabel 3.10 PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020-2024 (Rupiah/jiwa)**

Tahun	PDRB ADHB per Kapita	PDRB ADHK per Kapita
2020	41.704.922	28.005.367
2021	42.846.721	28.369.435
2022	47.210.058	29.332.760
2023	50.461.132	30.342.770
2024	53.910.000	31.349.028

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 53.910.000,-, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 31.349.028,-. PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain dipengaruhi inflasi yang berdampak terhadap daya beli, juga karena pola distribusi pendapatan regional Lampung Selatan yang tidak mutlak merata.

D. Pengeluaran Per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu sektor rumah tangga

mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian, hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping sebagai konsumen akhir produk barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor industri lain.

Pengeluaran per kapita juga menggambarkan daya beli masyarakat akan barang dan jasa. Kemampuan daya beli antar wilayah akan sangat berbeda. Semakin rendah nilai daya beli yang ditunjukkan oleh data pengeluaran riil per kapita, maka kondisi perekonomian saat itu terbilang sedang menurun dan berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam membeli barang atau jasa.

Tabel 3.11 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Tahun)
2020	9.875
2021	9.931
2022	10.226
2023	10.617
2024	11.133

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Trend pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami penurunan di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 pengeluaran per kapita sebesar 9.978 ribu rupiah/orang/tahun, menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 9.875 ribu rupiah/orang/tahun. Penurunan yang relatif kecil merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian secara global menurun yang tentunya juga berdampak pada Kabupaten Lampung Selatan dan mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan pada Tahun 2021, rata-rata pengeluaran kembali meningkat sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi menjadi sebesar 9.931 ribu rupiah/orang/tahun. Dan pada Tahun 2024 kembali meningkat hingga mencapai angka 11.133 ribu rupiah/orang/tahun.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dan seringkali menjadi indikator penting untuk mengukur kemajuan pembangunan secara keseluruhan.

3.2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di parlemen, Sumbangan Pendapatan Perempuan dan Perempuan sebagai tenaga Profesional.

Tabel 3.12 Indeks Pemberdayaan gender dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,553	0,536	0,499	0,465	0,394
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,59	59,27	59,37	63,28	70,98
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,6	89,61	89,78	89,96	90,09
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	10,2	10	10	14	24
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	29,61	29,42	29,15	28,8	28,47
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	52,8	49,64	48,24	51,04	56,37

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini mencerminkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pendapatan, dan keterlibatan dalam posisi politik. Artinya, perempuan dan laki-laki semakin memiliki kesempatan yang setara di berbagai bidang.

Sejalan dengan itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan nilai IDG mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Lampung Selatan semakin diberdayakan dan memiliki peran yang lebih aktif dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Hal ini menjadi indikator positif terhadap kemajuan dalam kesetaraan gender serta pemenuhan hak-hak perempuan di daerah tersebut. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan IPG menandakan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil, khususnya dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Indikator yang digunakan untuk menghitung IPG pada dasarnya sama dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IPG berada dalam rentang 0 hingga 100. Semakin mendekati angka 100, berarti ketimpangan gender dalam pembangunan semakin rendah; sebaliknya, semakin jauh dari angka 100, maka ketimpangan tersebut masih tinggi.

3.2.6 Bidang Infrastruktur

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dalam hal distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum jaringan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari jaringan jalan Nasional

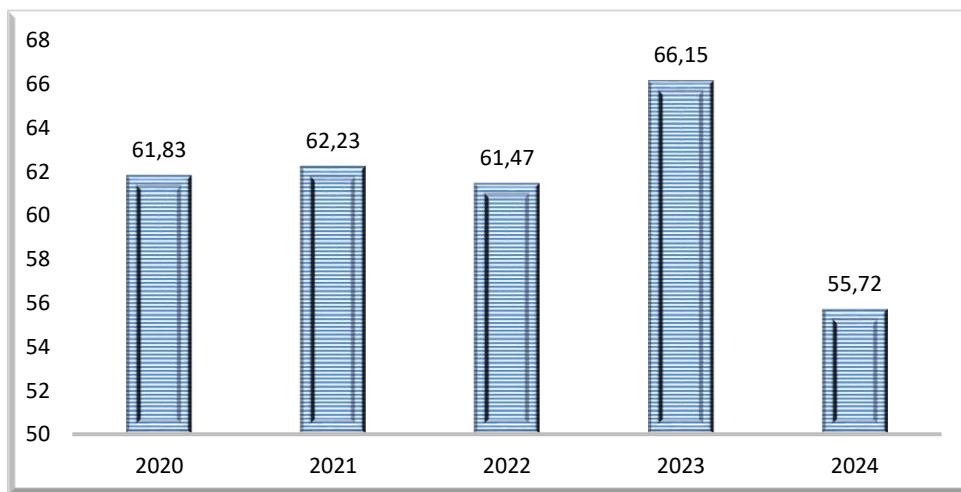
154 km, Jaringan jalan provinsi 104 km, Jaringan Jalan Tol 105 km, jaringan jalan kabupaten 1.204,10 dan Jaringan Jalan Desa 5.040 km dengan total ruas panjang jalan sepanjang 6.608 km dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 (km)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan	1.284,7 8	1.284,7 8	1.284,7 8	1.204,1 0	1.204,1 0

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Grafik 3.16 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam), 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Dilihat dari kondisi jalan dapat dijabarkan bahwa jalan Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 415,08 km dalam kondisi baik 255,90 km dalam kondisi sedang 225,06 km dalam kondisi rusak 308,07 dalam kondisi rusak berat. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018. Adapun capaian SPM sub urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81,3	100	92,9 5	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	66,67	94,7 8	100	100

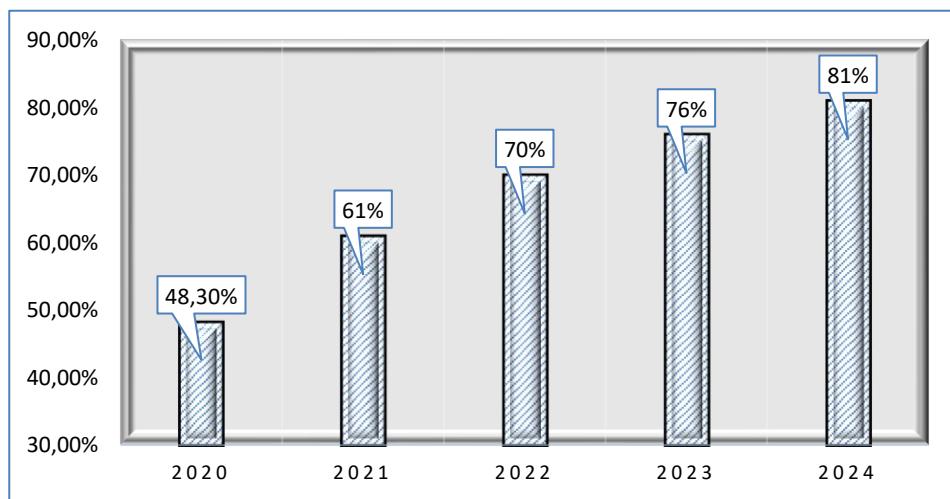
Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun sejak tahun 2023 sudah mencapai 100 persen. Pada Tahun 2024, kedua indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang juga mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada Tahun 2022 dan 2023 di 10 lokus desa penerima manfaat yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung, Sragi dan Bakauheni. Penerima manfaat ditargetkan sebanyak 410 sambungan rumah terlayani sambungan IPAL komunal atau setara 1.600 jiwa terlayani akses sanitasi yang layak.

Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari juga mengalami peningkatan menjadi 100 persen. Pengelolaan air minum di Lampung Selatan didukung oleh jaringan perpipaan yang ada pada PDAM Tirta Jasa dan juga melalui pengelolaan SPAM yang ada di masyarakat. Permasalahan yang ada pada pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jasa adalah ketersediaan air baku dan jumlah unit pengolahan air minum yang sedikit. Kapasitas produksi PDAM Tirta Jasa secara keseluruhan adalah 5.736,6 m³/hari dengan sumber air baku berasal dari mata air, air tanah, dan sungai. Hal ini dirasakan masih kurang mengingat luasnya wilayah yang ada di lampung selatan dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani.

Selain pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Jasa, kinerja pelayanan air minum juga didukung dengan keberadaan program penyediaan air minum baik oleh APBD maupun APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan Pembangunan SPAM Pedesaan. Pada Tahun 2022 jumlah desa yang telah mendapatkan program PAMSIMAS sejumlah 136 desa. Pada Tahun 2022 ini, program PAMSIMAS telah membangun sepanjang 11.195 meter di 15 lokus Desa dari 8 Kecamatan. Total jumlah sambungan rumah baik perkotaan maupun perdesaan pada Tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6,224 jiwa terlayani akses air minum layak. Dari data tersebut sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Selain itu, kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik SPAM pedesaan maupun PAMSIMAS sebagian besar menggunakan air tanah sebagai air baku. Hanya beberapa lokasi yang menggunakan air baku berasal dari mata air, terutama daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

Grafik 3.17 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Grafik di atas menunjukkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan

perdesaan tahun 2020-2024. Dari grafik dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup tajam terhadap proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, yakni pada tahun 2020 proporsinya hanya mencapai 48,3 persen, dan meningkat dengan tajam hingga tahun 2024 yang telah mencapai 81 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan SPM terkait pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan pelaksanaan SPM terkait relokasi program pemerintah Kabupaten. Berikut adalah kinerja pelayanan sub perumahan rakyat:

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	242 (100%)	42 (100%)	132 (100%)	14 (100%)	100
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi kiblat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah WN yang terkena relokasi kiblat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	3.415 (26,42%)	14 (100%)	80

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM sub bidang perumahan rakyat pada Tahun 2024 mengalami penurunan, di mana indikator fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten menurun menjadi 80 persen. Sedangkan indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah

yang layak huni bagi korban bencana kabupaten mencapai 100 persen. Salah satu tantangan dari pencapaian indikator ini adalah identifikasi terhadap ketersediaan lahan potensial sebagai alternatif lokasi relokasi.

Penanganan rumah tidak layak huni dikabupaten lampung selatan senantiasa berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, salah satunya adalah penyediaan hunian yang layak. Rumah sebagai tempat tinggal bukan hanya sebatas bangunan fisik, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membentuk kehidupan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera. Berikut grafik penanganan rumah tidak layak huni Kabupaten Lampung Selatan

Grafik 3.18 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024



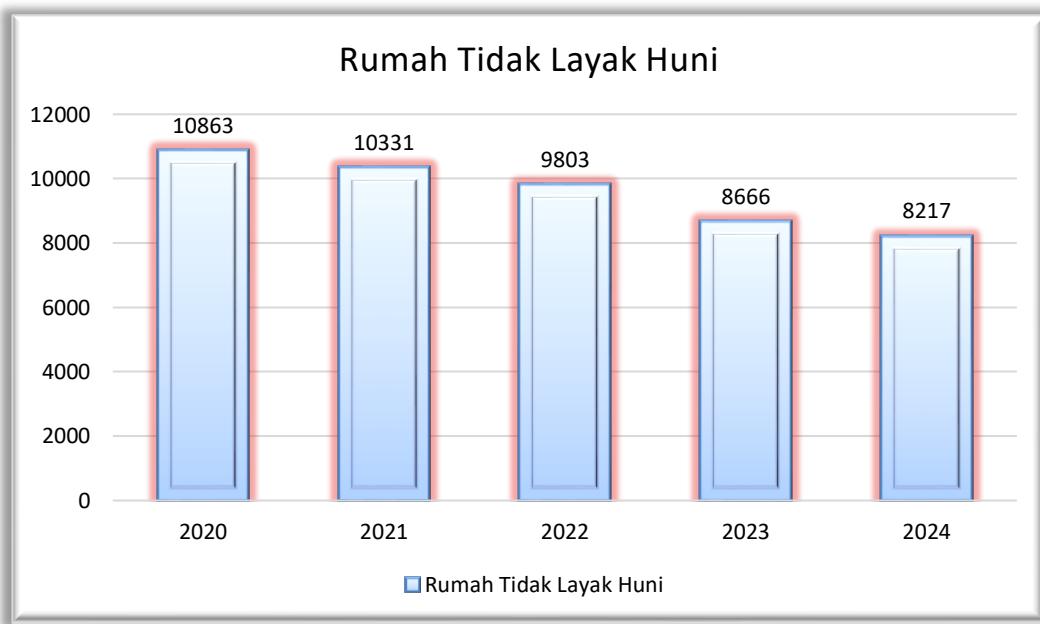
Sumber : Data diolah

Berdasarkan data grafik di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan

kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Selama lima tahun terakhir, penanganan rumah tidak layak huni mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah unit yang ditangani menurun dibandingkan tahun 2020, yakni masing-masing sebanyak 540 unit dan 544 unit. Penurunan ini diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang mengharuskan adanya realokasi anggaran serta pembatasan aktivitas fisik di lapangan. Meskipun demikian, dalam rentang waktu lima tahun, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah berhasil menangani sebanyak 3.676 unit rumah tidak layak huni. Capaian ini menjadi bukti nyata dan progresif atas upaya pemerintah daerah dalam menekan jumlah rumah tak layak huni, serta meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Berkat komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah ini terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Berikut ini disajikan data grafik perkembangan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lampung Selatan.

Grafik 3.19 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Data diolah

Berdasarkan data di atas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Berdasarkan data yang dihimpun selama lima tahun terakhir, jumlah RTLH di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 10.863 unit rumah tidak layak huni. Angka ini terus menurun menjadi 10.331 unit pada tahun 2021, 9.803 unit pada 2022, 8.666 unit pada 2023, dan terakhir 8.217 unit pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebanyak 2.646 unit RTLH dalam kurun waktu lima tahun.

3.3. Proyeksi Kemiskinan & Indikator Pendukung Kemiskinan

Kemiskinan merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Dalam rangka merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, diperlukan analisis proyeksi kemiskinan yang berbasis data dan tren historis. Proyeksi ini bertujuan untuk memperkirakan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di masa mendatang dengan mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi yang terjadi, baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan adanya proyeksi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat merancang strategi intervensi yang lebih terukur, efisien, dan adaptif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

Grafik 3.20 Proyeksi Kemiskinan Tahun 2025-2030



Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada tahun 2025, angka kemiskinan ditargetkan berada pada level 12,02 persen. Target ini kemudian diturunkan secara bertahap menjadi 11,3 persen pada tahun 2026, lalu turun kembali menjadi 10,62 persen pada tahun 2027. Penurunan dilanjutkan pada tahun 2028 dengan target sebesar 9,99 persen, kemudian 9,39 persen pada tahun 2029. Pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2030, angka kemiskinan ditargetkan dapat ditekan hingga mencapai 8,82 persen. Target penurunan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan melalui berbagai program strategis, intervensi sosial, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, TPT ditargetkan berada pada angka 4,19 persen, dan secara progresif akan ditekan hingga mencapai 3,40 persen pada tahun 2030. Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari indikator-indikator pendukung berikut indikator pedukung dalam penurunan angka kemiskinan.

Penurunan TPT ini diarahkan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, penguatan sektor-sektor produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi. Fokus juga diberikan pada pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja lokal.

Kebijakan ini sejalan dengan target penurunan tingkat kemiskinan dari 12,02 persen pada 2025 menjadi 8,82 persen pada 2030. Rendahnya tingkat pengangguran diharapkan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperluas daya beli masyarakat, dan secara langsung menurunkan angka kemiskinan di daerah.

Dengan sinergi antara penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 3.21 Tingkat Pengangguran Terbuka 2025-2030

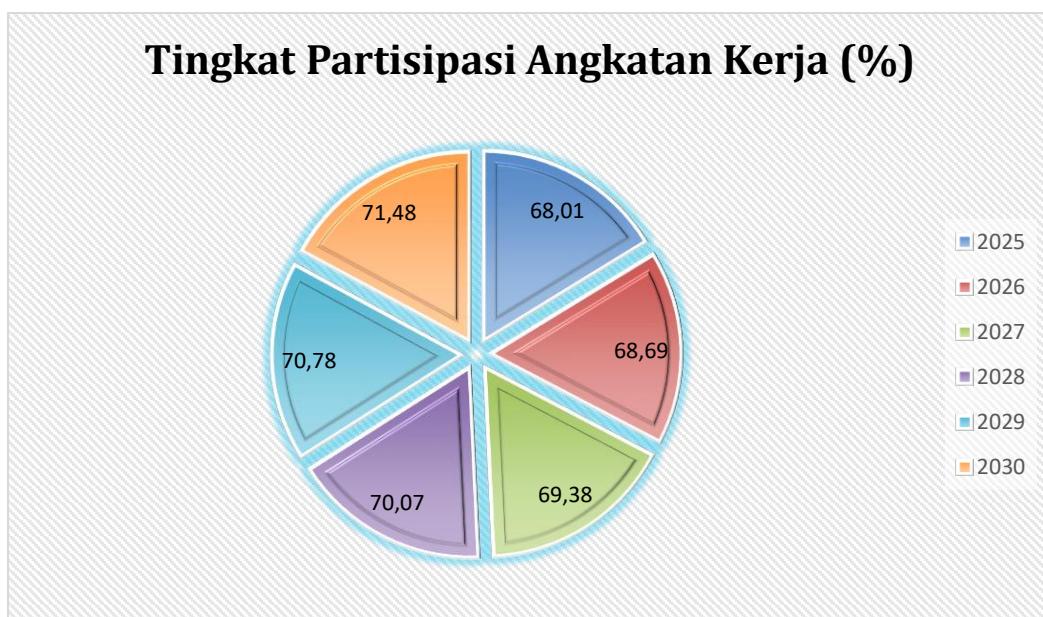


Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menunjukkan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK, semakin besar pula potensi ekonomi yang dimanfaatkan dari populasi usia produktif.

Di Kabupaten Lampung Selatan, TPAK ditargetkan mencapai 68,01% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 71,48% pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya usia produktif, dalam dunia kerja sebagai strategi penting dalam pengentasan kemiskinan. Keterkaitan antara TPAK dan kemiskinan sangat signifikan. Partisipasi kerja yang rendah sering kali mengindikasikan tingginya tingkat pengangguran atau banyaknya penduduk usia kerja yang tidak terserap ke pasar kerja, baik formal maupun informal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pendapatan rumah tangga, terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, dan memperbesar risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan tersedianya lapangan kerja produktif, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan dapat terus ditekan secara berkelanjutan.

Grafik 3.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2025-2030



Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

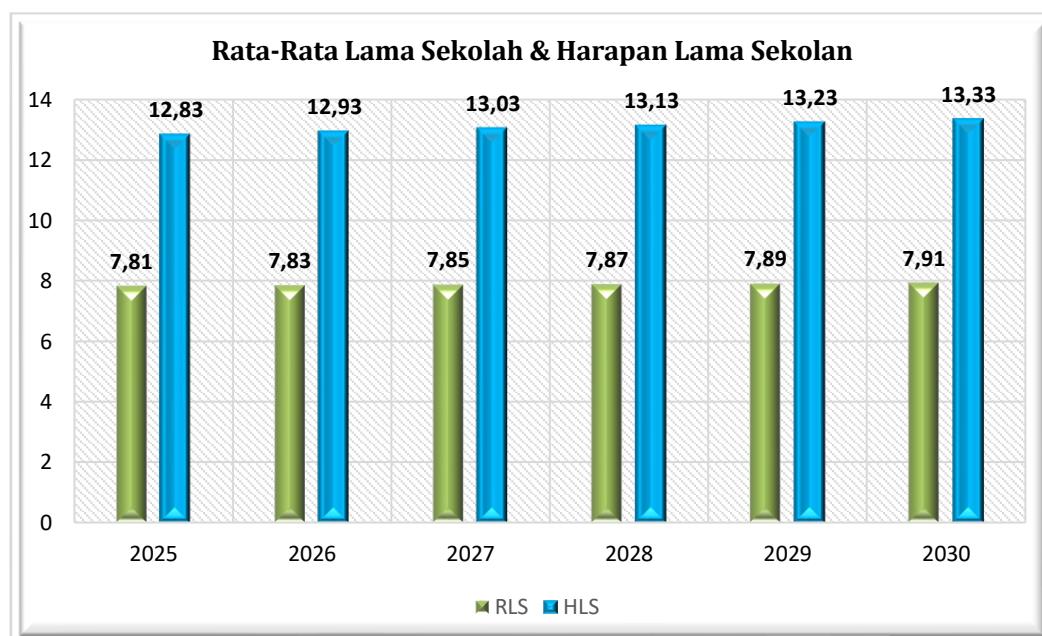
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan peningkatan indikator pendidikan, khususnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sebagai salah satu pendekatan strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan hingga tahun 2030.

Rata-rata Lama Sekolah mencerminkan tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, sementara Harapan Lama

Sekolah menggambarkan estimasi lama waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah. Kedua indikator ini saling melengkapi dan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta kemampuan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Dalam kurun waktu 2025–2030, Pemerintah Daerah menargetkan peningkatan RLS dan HLS secara bertahap melalui perluasan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, penurunan angka putus sekolah, serta penguatan peran pendidikan nonformal. Upaya ini didukung oleh penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan program bantuan pendidikan bagi keluarga miskin. Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan kesehatan, perencanaan keluarga, dan partisipasi sosial—semuanya merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan.

Grafik 3.23 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah 2025-2030



Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2025, RLS ditargetkan sebesar 7,81 tahun, yang setara dengan pencapaian pendidikan hingga kelas 1 SMP. Hingga akhir periode perencanaan pada tahun 2030, angka ini ditargetkan meningkat menjadi 7,91 tahun, atau setara dengan kelas 2 SMP. Meskipun peningkatannya bersifat

gradual, tren ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh lapisan masyarakat.

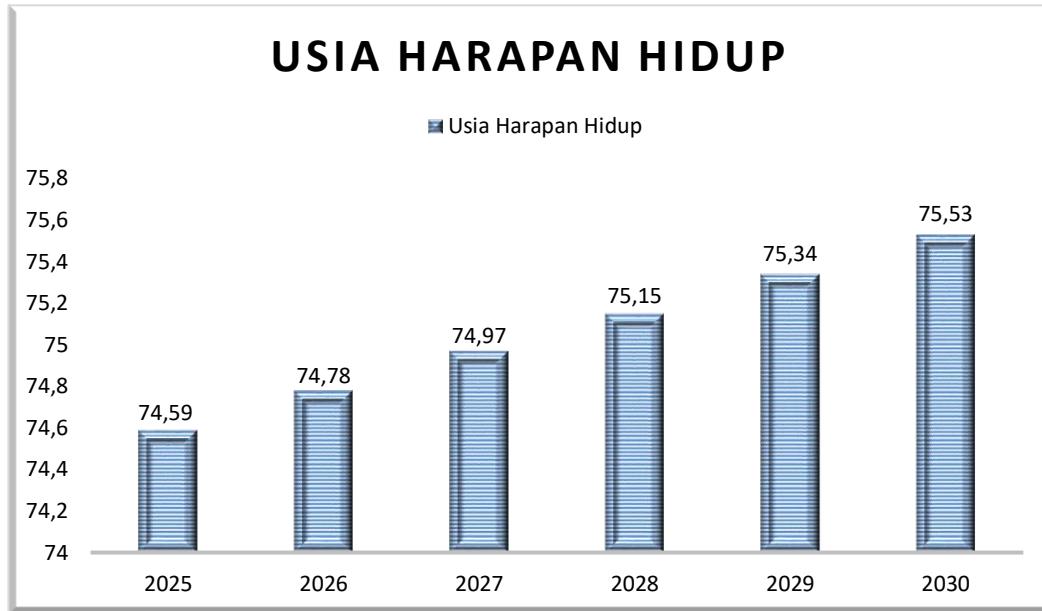
Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan prospek pendidikan anak-anak yang memasuki usia sekolah. Pada tahun 2025, HLS ditargetkan mencapai 13,56 tahun, yang setara dengan potensi menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 perguruan tinggi (semester awal D1/S1). Pada tahun 2030, HLS ditargetkan meningkat signifikan menjadi 17,3 tahun, yang setara dengan pendidikan hingga tingkat pascasarjana awal (S2 semester pertama).

Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai bagian dari upaya strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. UHH merupakan indikator penting yang mencerminkan derajat kesehatan penduduk dan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, seperti gizi, sanitasi, air bersih, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Selama periode 2025–2030, UHH di Kabupaten Lampung Selatan diproyeksikan terus meningkat, seiring dengan perbaikan layanan kesehatan, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, serta penguatan upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat. Peningkatan UHH juga mencerminkan penurunan angka kematian dini akibat penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Secara tidak langsung, peningkatan usia harapan hidup juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Masyarakat yang lebih sehat cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi, pengeluaran kesehatan yang lebih rendah, dan daya tahan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penduduk usia lanjut yang hidup lebih lama dan sehat dapat terus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi informal maupun sosial, yang turut mendukung ketahanan ekonomi keluarga.

Grafik 3.24 Usia Harapan Hidup 2025-2030

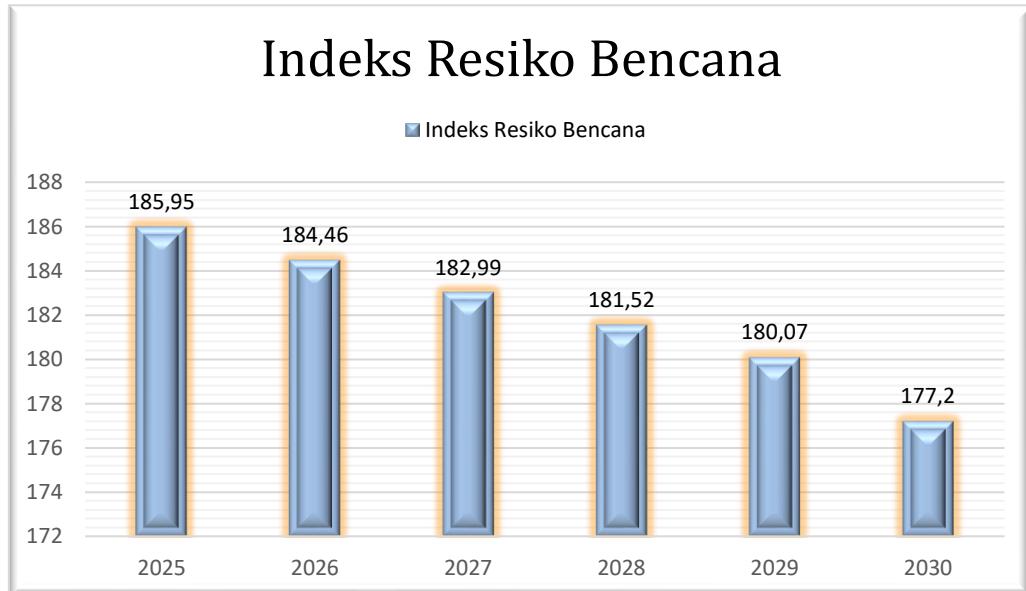


Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Berdasarkan data di atas, terlihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini tercermin dari proyeksi capaian Usia Harapan Hidup (UHH) yang ditargetkan sebesar 74,59 tahun pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga mencapai 75,53 tahun pada tahun 2030.

Risiko bencana yang tinggi berdampak langsung terhadap kerentanan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti pesisir, lereng bukit, dan daerah aliran sungai. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang dapat menghilangkan mata pencaharian, merusak aset produktif, serta memperburuk kondisi kemiskinan. Selama periode 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta penguatan sistem peringatan dini. Program edukasi kebencanaan, perencanaan tata ruang berbasis risiko, dan kolaborasi lintas sektor akan terus ditingkatkan agar risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.

Grafik 3.25 Indeks Resiko Bencana 2025-2030



Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Berdasarkan diatas salah satu upaya serius Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menanggulangi angka kemiskinan adalah dengan mengurangi Indeks Risiko Bencana. Indikator ini memiliki dampak langsung terhadap naik atau turunnya angka kemiskinan. Proyeksi menunjukkan bahwa target Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 sebesar 185,95, dan akan terus mengalami penurunan hingga mencapai 177,20 pada tahun 2030.

Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak menjadi salah satu prioritas dalam upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan. Akses terhadap sumber air minum yang aman dan terjangkau secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rumah tangga miskin.

Data menunjukkan bahwa capaian indikator akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak di Lampung Selatan berada pada angka 1,12 pada tahun 2025, dan ditargetkan meningkat menjadi 2,26 pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya sistematis dalam memperluas layanan air bersih ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Meski demikian, tantangan masih cukup besar. Rumah tangga miskin sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses

sumber air layak, baik karena faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, maupun beban biaya. Dengan meningkatnya capaian indikator ini, diharapkan akan terjadi penurunan angka kemiskinan secara signifikan, mengingat akses air minum yang layak merupakan fondasi penting bagi kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Grafik 3.26 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman 2025-2030

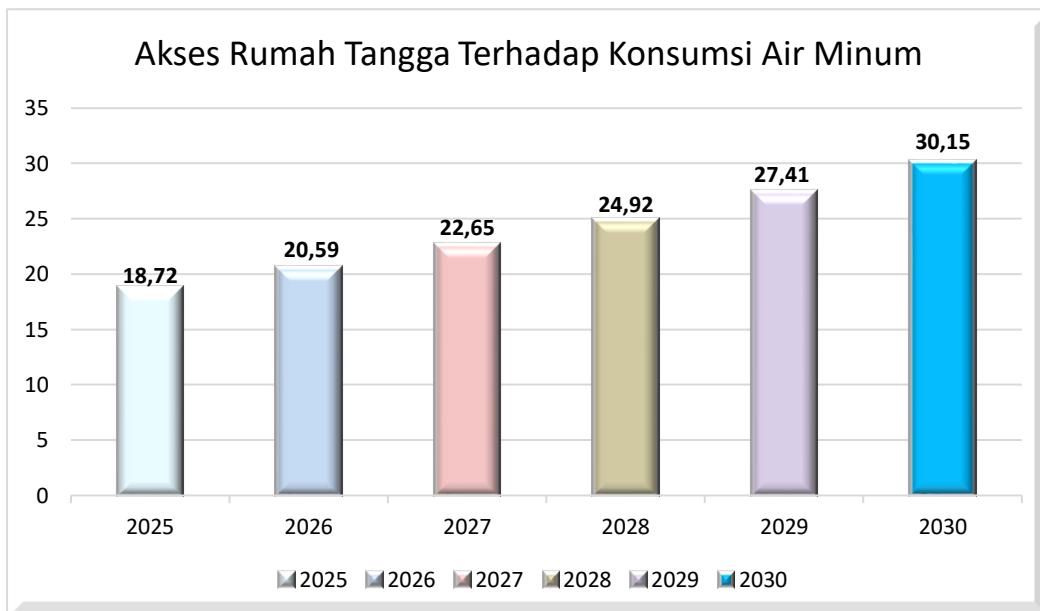


Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Akses terhadap air minum yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Lampung Selatan, masih terdapat kesenjangan akses air minum antar kelompok sosial, terutama antara rumah tangga miskin dan non-miskin. Data menunjukkan bahwa capaian indikator akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Lampung Selatan diproyeksikan mencapai 18,72% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 30,15% pada tahun 2030. Meskipun menunjukkan tren positif, angka ini masih mencerminkan perlunya percepatan dalam penyediaan air minum yang layak, terutama bagi kelompok rumah tangga miskin yang paling terdampak oleh keterbatasan infrastruktur dan daya beli. Meningkatkan akses air minum yang aman tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada produktivitas, pendidikan, dan penghematan pengeluaran rumah tangga miskin,

sehingga dapat mempercepat pemutusan rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Grafik 3.27 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum 2025-2030



Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Berdasarkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, diperkirakan terjadi peningkatan yang stabil dari 4,89 persen pada tahun 2025 menjadi 6,47 persen pada tahun 2030. Tren ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,32 poin per tahun.

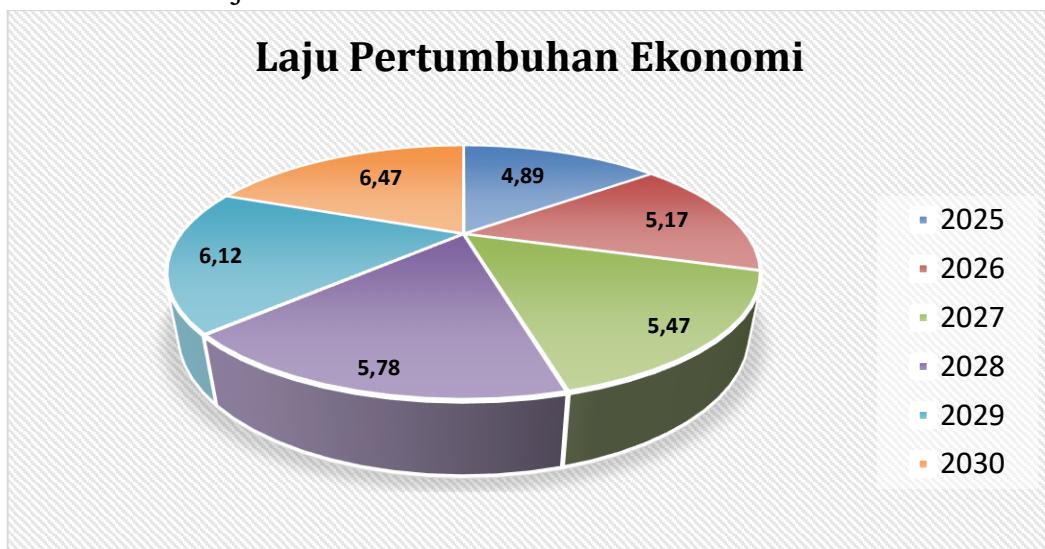
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, berpotensi memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya beli rumah tangga miskin.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif, yaitu mampu dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan

keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.

Dengan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemerataan dan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan akan berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Lampung Selatan secara berkelanjutan menuju tahun 2030.

Grafik 3.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2025-2030



Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan target Indeks Ketahanan Pangan sebesar 86,56 pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 93,18 pada tahun 2030. Peningkatan indeks ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat sistem pangan daerah Lampung Selatan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun akses pangan oleh kelompok rentan termasuk rumah tangga miskin.

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kerentanan terhadap krisis pangan. Rumah tangga miskin kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses pangan bergizi secara cukup, baik karena rendahnya pendapatan, terbatasnya ketersediaan pangan lokal, maupun mahalnya harga bahan pokok. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti gizi buruk, stunting, dan penurunan produktivitas kerja.

Dengan meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, maka pemerintah daerah secara tidak langsung juga memperkuat fondasi dalam mengurangi angka kemiskinan. Ketahanan pangan yang baik menjamin bahwa masyarakat, terutama yang miskin, memiliki akses berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, kapasitas produktif, dan pengeluaran yang lebih efisien di tingkat rumah tangga.

Grafik 3.27 Indeks Ketahanan Pangan 2025-2030



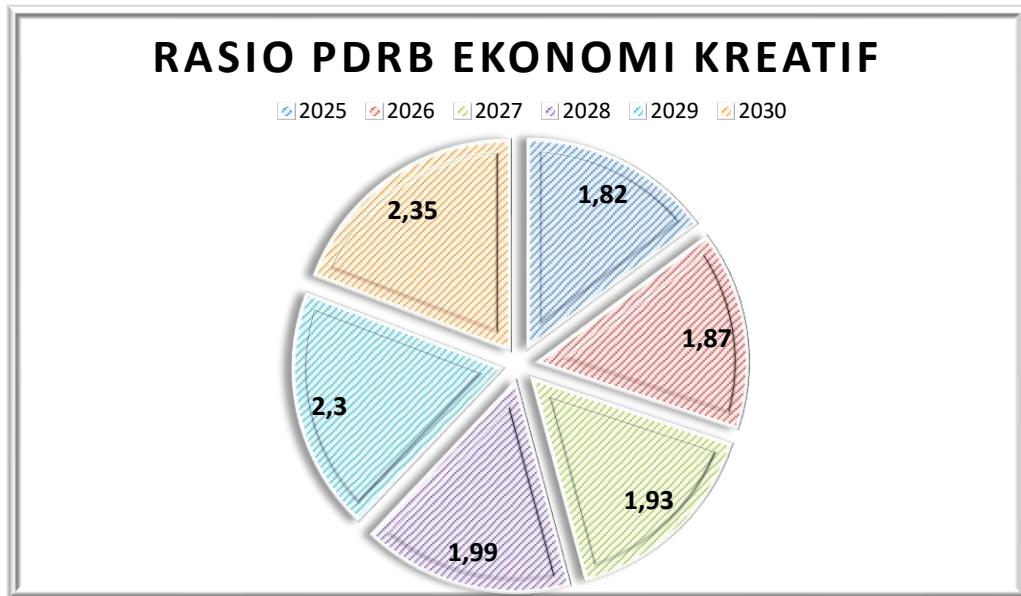
Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ekonomi kreatif merupakan indikator yang mencerminkan kontribusi sektor kreatif terhadap perekonomian daerah. Meningkatnya rasio ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan budaya lokal semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Lampung Selatan, penguatan sektor ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat usia produktif dan pelaku usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan rasio PDRB ekonomi kreatif mencapai 1,82 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 2,35 pada tahun 2030. Target ini mencerminkan harapan agar sektor ekonomi kreatif dapat tumbuh lebih signifikan dan membuka lebih banyak peluang ekonomi inklusif, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kurang terlibat dalam sektor formal.

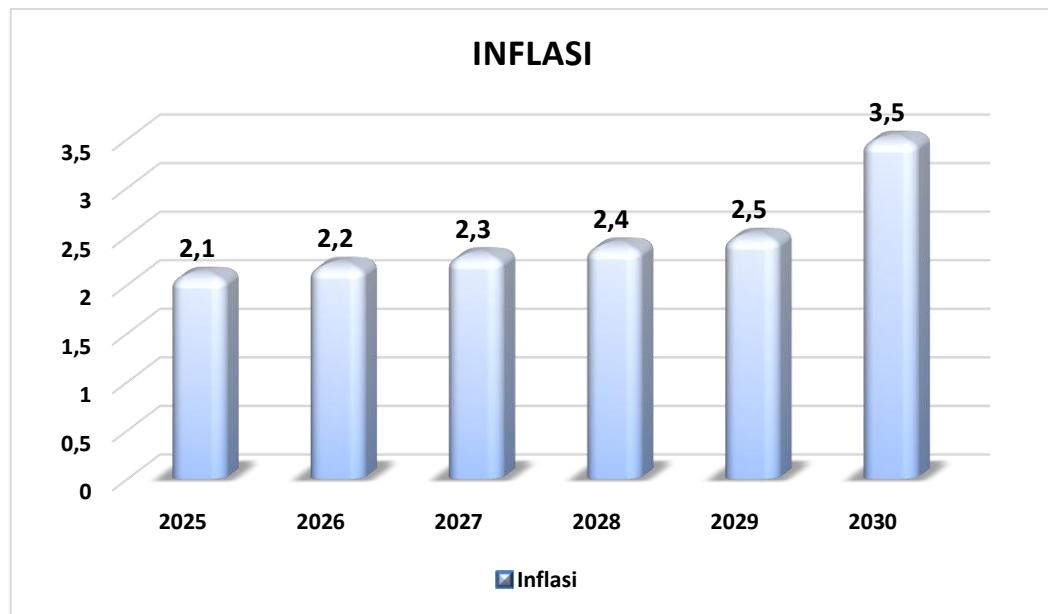
Ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang unik karena tidak selalu membutuhkan modal besar, tetapi lebih menitikberatkan pada ide, keterampilan, dan inovasi. Hal ini membuka peluang besar bagi kelompok masyarakat miskin, seperti pelaku UMKM, perajin lokal, seniman, pelaku kuliner tradisional, hingga komunitas digital, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Grafik 3.28 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif 2025-2030



Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Grafik 3.29 Inflasi 2025-2030

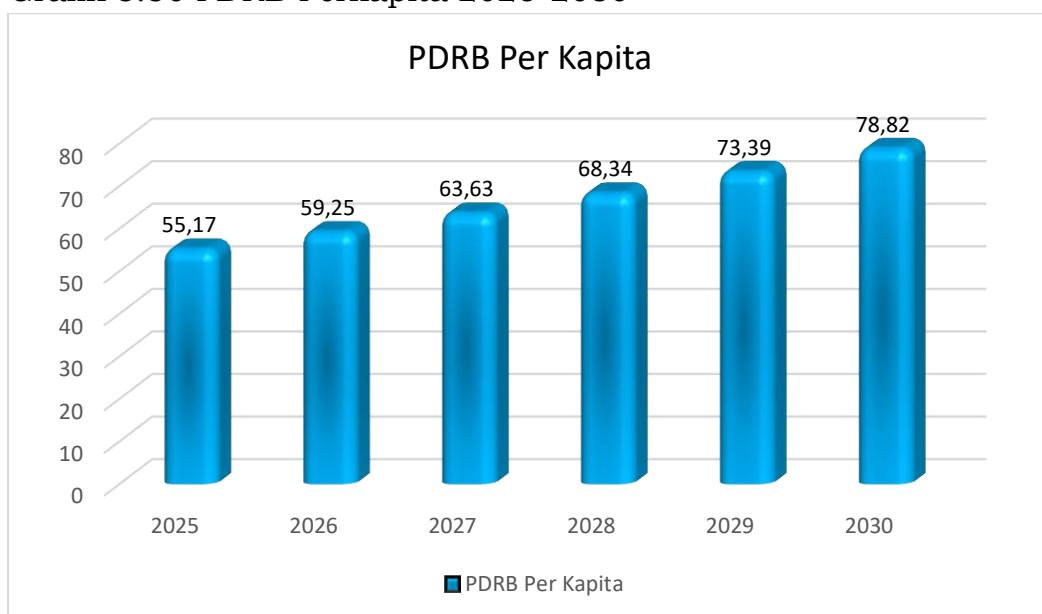


Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode. Di Kabupaten Lampung Selatan, pengendalian inflasi

menjadi faktor kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan laju inflasi terkendali pada kisaran 2–3% di tahun 2025 dan 2,5–3,5% pada tahun 2030. Rentang target ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga yang berkelanjutan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Keterkaitan antara inflasi dan kemiskinan sangat erat. Saat inflasi meningkat tajam, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat miskin cenderung stagnan. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli yang signifikan, meningkatkan kerentanan terhadap kekurangan gizi, dan menambah beban pengeluaran rumah tangga miskin. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Lampung Selatan. Upaya ini perlu didukung oleh penguatan sistem logistik pangan, stabilisasi harga di pasar rakyat, perlindungan terhadap sektor konsumsi rumah tangga miskin, serta kolaborasi antarsektor dalam menjaga pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Grafik 3.30 PDRB Perkapita 2025-2030



Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat, yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan pendapatan per kapita dapat memperbaiki daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Berdasarkan hasil proyeksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB per kapita diperkirakan naik dari Rp55,17 juta pada tahun 2025 menjadi Rp78,82 juta pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus menguat dan meningkatnya produktivitas masyarakat. Namun demikian, penting untuk dipastikan bahwa peningkatan PDRB per kapita tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, tetapi juga dirasakan secara merata oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif.

Dengan pertumbuhan PDRB per kapita yang konsisten dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan dapat terus menurun secara signifikan hingga tahun 2030, seiring dengan meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebagai persoalan struktural dan multidimensional, kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan sektoral yang parsial, melainkan membutuhkan intervensi yang terencana, terintegrasi, dan ditopang oleh pengalokasian anggaran yang tepat dan berkeadilan.

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran, keberadaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan menjadi sangat krusial. Program yang dirancang secara baik dan kegiatan yang dijalankan secara efektif merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal alokasi dana, tetapi juga tentang memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah dalam APBD harus dirancang agar memberi dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial.

Tabel 4.1 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1.	DINAS PENDIDIKAN	PENGELAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Bantuan Beasiswa SD	Siswa Miskin	124	186.000.000	150	225.000.000	150	225.000.000	150	225.000.000	150	225.000.000	150	225.000.000	
			Pengelolaan Pendikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Bantuan Beasiswa SMP	Siswa Miskin	35	70.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
2	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Penjaminan Pembayaran Kesehatan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	106844	44.452.799.999	117528	49.552.944.000	129281	50.544.002.880	142209	52.565.762.995	156430	53.722.829.243	172073	55.334.514.120

			Penerbitan Sertifikat Produk si Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk si, untuk Produk Makan an Minum an Tertentu yang Dapat Diprod uksi oleh Industr i Rumah Tangga	Pengendali an dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk si, untuk Produk Makan an Minum an Tertentu yang Dapat Diprod uksi oleh Industr i Rumah Tangga	Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan	50 Orang	316.515.150	55	366.51 5.150	60	367.68 0.302	65	368.85 7.105	70	370.04 5.676	75	381.24 6.132
3	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genang	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Life Jacket/ Baju Pelampung untuk keselamatan kerja dan perlindungan nelayan di laut	Kelompok nelayan (KUB)	60 Orang	15.000.000	60	15.000. 000	60	15.000. 000	60	15.000. 000	60	15.000. 000	60	15.000. 000

			an Air Lainnya yang Dapat Diolah akan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Hibah Pengadaan Sarana Budidaya Air Tawar Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	70 Orang	280.000.000	70 Orang	280.000.000	90 Orang	360.000.000						
			Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembinaan dan Sosialisasi BUDIKDAM BER untuk keluarga miskin	Keluarga Miskin	30 Orang	9.040.800	30 Orang	14.000.000								
			Belanja Budikdamb er untuk 30 Keluarga Miskin (DTSEN)	Keluarga Miskin	30 Orang	30.000.000	30 Orang	30.000.000	30 Orang	30.000.000	30 Orang	36.000.000	30 Orang	36.000.000	30 Orang	36.000.000	

				Pembinaan dan Pelatihan Teknis Budidaya Ikan dalam Terpal untuk keluarga miskin DTSEN (10 Peserta)	Keluar ga Miskin	10 Orang	0	10 Orang	10.828.950	15 Orang	12.500.000							
				Paket Budidaya Kolam Terpal untuk 10 Keluarga Miskin (P3KE)	Keluar ga Miskin	10 orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	15 Orang	45.000.000							
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan konsumsi untuk masyarakat miskin	Masyarakaat Miskin	50 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	60 Orang	18.000.000							
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTI VITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Pelatihan Sulam Tapis, House Keeping, Barista, Komputer, Waiters, CPMI, F&B Product,	Pencari Kerja	139	876.324.450	139	826.799.200	139	831.150.000	139	842.250.000	139	845.850.000	139	851.650.000

				Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pemagangan													
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Mengadakan kegiatan Job Fair / Bursa Kerja bekerja sama dengan perusahaan di wilayah Kab. Lampung Selatan masyarakat / Pencari Kerja di Kabupaten Lampung Selatan	Pencari Kerja	100	190.607.600	187	171.532.600	187	175.198.100	187	188.366.650	190	200.888.450	195	210.456.800	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk THLS dan Pekerja Rentan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Orang (Pekerja Rentan & Non ASN)	0	0	8.897	1.067.522.050	8.897	1.060.145.700	8.897	1.060.145.700	8.897	1.060.145.700			

5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DALDUK KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontraspsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Mengadakan Pelayanan KB gratis Kepada masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	850	152.306.000	1700	153.624.000	1785	192.000.000	1.874	245.000.000	1.968	280.000.000	2.066	325.000.000
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWAAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Bantuan Bahan Pangan (paket sembako) untuk Rumah tangga rentan rawan pangan miskin/stunting	Keluar ga rentan rawan pangan stunting/miskin	490	112.700.000	540	94.500.000	590	103.250.000	640	112.000.000	690	120.750.000	740	129.500.000
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan,	Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan (jasa kemasan dan kemasan untuk bantuan pangan di desa rawan pangan,	Keluar ga rentan rawan pangan stunting/miskin	6500 kg	30.000.000	6500 kg	30.900.000	6500 kg	31.827.000	6500 kg	32.781.800	6500 kg	33.765.250	6500 kg	34.102.900

				yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	miskin/stunting													
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Pemberian subsidi harga pangan dan Kegiatan GPM	Masyarakat berpenghasilan Rendah	17 lokasi	116.600.000	18 lokasi	120.000.000	20 lokasi	123.600.000	22 lokasi	127.308.000	24 lokasi	132.000.000	26 lokasi	135.000.000
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) daerah Kabupaten untuk Desa Rentan Rawan Pangan, Miskin dan Stunting	Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) daerah Kabupaten untuk Desa Rentan Rawan Pangan, Miskin dan Stunting	Masyarakat yang terdampak bencana, rawan pangan, miskin dan	3 ton	41.100.000	3 ton	41.100.000	3 ton	68.500.000	5 ton	68.500.000,00	5 ton	68.500.000,00	5 ton	68.500.000,00

						stunting												
		PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Pemanfaatan Ketersementaraan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan di Kabupaten/Kota	Koordinasi pemantapan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten/Kota	Kegiatan Gerakan Pangan Murah (Sumber Dana APBN Bapanas)	Masyarakaat Kabupaten Lampung Selatan	2 kali	22.000.000										
					Bantuan Pangan (Beras)	Penerima Bantuan Beras (PBP) di Kabupaten Lampung Selatan yang masuk pada data DTSEN	106.415 PBP	26.280.248.400										
7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	penyediaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari	pengadaan bibit ternak Sapi, Kambing & ayam petelur	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang	ayam petelur 1500 ekor	257.625.000	ayam petelur 1500 ekor	257.625.000	ayam petelur 1500 ekor	257.625.000	ayam petelur 1500 ekor	257.625.000	ayam petelur 1500 ekor	257.625.000	ayam petelur 1500 ekor	257.625.000	

		PERTANIAN	hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	daerah kabupaten/kota lain	/Kelompok)											
					Sapi PO Betina 60 Ekor	750.000.000	Sapi PO Betina 60 Ekor	750.00 0.000	Sapi PO Betina 60 Ekor	750.00 0.000	Sapi PO Betina 60 Ekor	750.00 0.000	Sapi PO Betina 60 Ekor	750.00 0.000	Sapi PO Betina 60 Ekor	750.00 0.000
					Kambing Rambo n 110 ekor	246.400.000	Kambing Rambo n 110 ekor	246.40 0.000	Kambing Rambo n 110 ekor	246.40 0.000	Kambing Rambo n 110 ekor	246.40 0.000	Kambing Rambo n 110 ekor	246.40 0.000	Kambing Rambo n 110 ekor	246.40 0.000
					Pengadaan Itik untuk 30 KK	30.000.000	Pengadaan Itik untuk 30 KK	30.000. 000	Pengadaan Itik untuk 30 KK	30.000. 000	Pengadaan Itik untuk 30 KK	30.000. 000	Pengadaan Itik untuk 30 KK	30.000. 000	Pengadaan Itik untuk 30 KK	30.000. 000
			pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Chooper	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	mesin pencacah rumput 2 kelompok	58.000.000	mesin pencacah rumput 2 kelompok	58.000. 000	mesin pencacah rumput 2 kelompok	58.000. 000	mesin pencacah rumput 2 kelompok	58.000. 000	mesin pencacah rumput 2 kelompok	58.000. 000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan prasarana pertanian	Pembangunan Rehabilitasi jalan usaha tani	Jalan Usaha Peternakan	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	2 unit	400.000.000	2 unit	400.00 0.000	2 unit	400.00 0.000	2 unit	400.00 0.000	2 unit	400.00 0.000

				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengadaan Chooper	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	mesin pencacah rumput 15 kelompok	435.000.000	10 kelompok	290.000.000								
					Sumur Bor	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	4 paket	600.000.000	4 paket	600.000.000	4 paket	600.000.000	4 paket	600.000.000	4 paket	600.000.000	4 paket	600.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat akat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	kampanye gizi	Siswa Sekolah	920 BUTIR	19.170.500	80 paket (Nugget, susu, telur)	13.456.000	80 paket (Nugget, susu, telur)	13.456.000	80 paket (Nugget, susu, telur)	13.456.000	80 paket (Nugget, susu, telur)	13.456.000	80 paket (Nugget, susu, telur)	13.456.000
8	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan JUT	Poktan / Gapoktan	19	3.800.000.000	19	3.800.000.000	19	3.800.000.000	19	3.800.000.000	19	3.800.000.000	19	3.800.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Pembangunan Prasarana Pertanian															

		PERTANIAN																
9	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	rumah korban bencana yang ditangani	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	17 Unit rumah	340.000.000	28 Unit Rumah	600.000.000	28 Unit Rumah	613.473.800	28 Unit Rumah	637.455.750	28 Unit Rumah	643.332.950	28 Unit Rumah	660.514.250
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	11 unit rumah	220.000.000	33 Unit	700.000.000	33 Unit	700.000.000						
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupengnya	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	446 Unut Rumah	8.920.000.000	421 unit Rumah	9.000.000.000	435 unit Rumah	9.300.000.000	450 unit Rumah	9.700.000.000	475 unit Rumah	10.000.000.000	490 unit Rumah	10.300.000.000

			aten/Kota	Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha														
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAIN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota	Sosialisasi peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Sosialisasi dan Pemberian Bantuan Berupa Barang yang diserahkan kepada masyarakat	Kelompok IR (Industri Rumahan)	25 Orang	42.483.300	50 orang	42.483.300	75 orang	196.000	100 orang	220.000	150 orang	256.000	200 orang	321.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pengutan dan pengeimbangan lembaga penyediaa layanan peningkatan	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga wewenang kabupaten/kota	Pembinaan, Sosialisasi, Bantuan	Masyarakat Miskin Ekstrem	50 orang	80.044.300	75 orang	125.000	100 orang	152.350	125 orang	185.650	150 orang	223.520	200 orang	252.650

			kualita s keluarg a dalam mewuj udkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabup aten/k ota															
1 1	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDU NGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelo laan Data Fakir Miskin Cakup an Daerah Kabup aten/K ota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Jumlah Fakir Miskin yang akan mendapatkan Bantuan Sosial dari kementerian Sosial RI serta biaya operasional pengelolaan data penerima bantuan sosial	Keluar ga Peneri ma Manfaat (KPM)	237178 KK	120.000.000	23717 8 KK	120.00 0.000	200.17 8 KK	120.00 0.000	150.80 0 KK	120.00 0.000	150.80 0 KK	145.00 0.000	150.80 0 KK	145.00 0.000
			Pegelolaa n Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin yang akan mendapatkan Bantuan Sosial dari kementerian Sosial RI serta biaya operasional pengelolaan data	Keluar ga Peneri ma Manfaat (KPM)	237178 KK	464.981.500	23717 8 KK	464.98 1.500	200.17 8 KK	464.98 1.500	150.80 0 KK	464.98 1.500	150.80 0 KK	464.98 1.500	150.80 0 KK	464.98 1.500	

				penerima bantuan sosial													
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial dalam bentuk uang bagi Petani Tembakau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	Keluar ga Penerima Manfaat (KPM)	40 Petani	87.657.200	0	87.657.200	0	87.657.200	0	87.657.200	0	107.800.000	0	107.800.000
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) / Family Development Session (FDS) bagi KPM Penerima Bantuan Sosial PKH dalam rangka pencegahan stunting	Keluar ga Penerima Manfaat (KPM)	237178 KK	64.400.000	237178 KK	64.400.000	200.178 KK	64.400.000	150.800 KK	64.400.000	150.800 KK	84.000.000	150.800 KK	84.000.000

				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (APBN)	Keluar ga Penerima Manfaat (KPM)	237178 KK	106.145.712.0 00	23717 8 KK	106.14 5.712.0 00	200.17 8 KK	106.14 5.712.0 00	150.80 0 KK	106.14 5.712.0 00	150.80 0 KK	106.14 5.712.0 00	150.80 0 KK	106.14 5.712.0 00
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan SOSial Sembako Kementrian Sosial (APBN)	Keluar ga Penerima Manfaat (KPM)	237178 KK	176.000.000.0 00	23717 8 KK	176.00 0.000.0 00	200.17 8 KK	176.00 0.000.0 00	150.80 0 KK	176.00 0.000.0 00	150.80 0 KK	176.00 0.000.0 00	150.80 0 KK	176.00 0.000.0 00
	REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Bantuan Permakana n bagi Penyandang Masalah Kesejahtera n Sosial (PMKS)	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas	1706 (50 orang disabilitas, 1.291 orang lanjut usia, 365 orang anak yatim piatu)		341.200.000	270 orang (50 lansia., 50 disabilitas, 50 anak terlantar, 120 lansia lomba desa)	54.000. 000	270 orang (50 lansia., 50 disabilitas, 50 anak terlantar, 120 lansia lomba desa)	54.000. 000	270 orang (50 lansia., 50 disabilitas, 50 anak terlantar, 120 lansia lomba desa)	54.000. 000	270 orang (50 lansia., 50 disabilitas, 50 anak terlantar, 120 lansia lomba desa)	54.000. 000	270 orang (50 lansia., 50 disabilitas, 50 anak terlantar, 120 lansia lomba desa)	54.000. 000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	Penyediaan Sandang	Bantuan seragam olahraga dan sepatu bagi Penyandang Masalah Kesejahtera n Sosial (PMKS)	Lanjut Usia peserta senam lomba desa	120 Orang lanjut usia (40 Orang Lansia x 3 lokus di Lomba Desa)		31.200.000	120 Orang lanjut usia (40 Orang Lansia x 3 lokus di)	31.200. 000	120 Orang lanjut usia (40 Orang Lansia x 3 lokus di)	31.200. 000	120 Orang lanjut usia (40 Orang Lansia x 3 lokus di)	31.200. 000	120 Orang lanjut usia (40 Orang Lansia x 3 lokus di)	31.200. 000	120 Orang lanjut usia (40 Orang Lansia x 3 lokus di)	31.200. 000

			Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Peninggalan di Luar Panti Sosial					Lomba Desa)		Lomba Desa)		Lomba Desa)		Lomba Desa)		Lomba Desa)		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Peninggalan di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Pemberian alat bantu kursi roda, tongkat, dan ABD bagi Lanjut usia dan disabilitas	Lanjut usia dan Disabilitas	173 orang, 149 kursi roda, 11 tongkat , 13 kruk	565.179.100	110 orang, 80 kursi roda, 20 tongkat, 10 ABD	301.000.000	110 orang, 80 kursi roda, 20 tongkat, 10 ABD	301.000.000	110 orang, 80 kursi roda, 20 tongkat, 10 ABD	301.000.000	110 orang, 80 kursi roda, 20 tongkat, 10 ABD	301.000.000	110 orang, 80 kursi roda, 20 tongkat, 10 ABD	301.000.000
1 2	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	Pelaksanaan Operasi pasar	Masyarakat	8500 Orang	564.704.450	4250	220.000.000	5000 Orang	250.000.000						

			dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	k dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Pelaksanaan IKM	Orang	225 Orang	699.761.800										
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan dan pemberian Alat Bantuan buat IKM	Orang			75 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000		
13	DINAS KOPERASI DAN UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	pendirian usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, serta desain dan teknologi	Pelatihan Kewirausahaan, Marketing, Packaging	Pelaku Usaha Mikro	70 Unit Usaha	695.618.300	300 Unit Usaha	630.180.700	300 Unit Usaha	650.312.600	300 Unit Usaha	678.144.550	300 Unit Usaha	700.037.600	300 Unit Usaha	722.886.250

		PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengutan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Workshop	Pelaku UMKM	90 Unit Usaha	154.000.000	120 Unit Usaha	70.000.000	120 Unit Usaha	74.312.750	120 Unit Usaha	80.275.100	120 Unit Usaha	84.965.150	120 Unit Usaha	89.859.900
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengutan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelatihan Pembuatan Bakso	Pelaku UMKM	200 Unit Usaha	249.983.200	200 Unit Usaha	200.000.000	200 Unit Usaha	204.312.700	200 Unit Usaha	210.274.900	200 Unit Usaha	214.964.900	200 Unit Usaha	219.859.600

			nasi dengan Para Peman gku Kepentri ngan.													
1 4	DINAS PERHUBU NGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah a Daerah Kabupaten /Kota	Admini strasi Keuang an Perang kat Daerah	Penyediaaa n Administrasi Pelaksana an Tugas ASN	Belanja Operasional Pendukung pelaksanaa n Pelayanan 4 unit Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar (Honorariu m Driver dan Kondektur Bus)	Pelajar /Siswa Sekola h di Kabup aten Lampu ng Selatan	288	56.400.000	288	56.400. 000	288	56.400. 000	288	56.400. 000	288	56.400. 000
				Penyediaaa n Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n DInas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional Pendukung pelaksanaa n Pelayanan 4 unit Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bus)	Pelajar /Siswa Sekola h di Kabup aten Lampu ng Selatan	288	78.220.000	288	78.220. 000	288	78.220. 000	288	78.220. 000	288	78.220. 000
1 5	DINAS PEKERJA AN UMUM DAN PENATAA N RUANG	PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelo laan dan penge mbang an sistem air limbah domestik	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala	BELANJA OPERASI	Kegiataa n		35.461.500		35.461. 500		35.461. 500		35.461. 500		35.461. 500

		dalam daerah Kabup aten/K ota	pemukim an													
		Pembangun an Tangki Septik Komunal (5- 10 KK) Desa.Batu Agung Kec. Merbau Mataram	KK	10	250.000.000	10 KK	250.00 0.000									
		Pembangun an Tangki Septik Komunal (5- 10 KK) Desa.Talang Jawa Kec. Merbau Mataram	KK	10	250.000.000	10 KK	250.00 0.000									
		Pembangun an Tangki Septik Komunal (5- 10 KK) Desa.Talang Way Sulan Kec. Way Sulan	KK	10	250.000.000	10 KK	250.00 0.000									
		Pembangun an Tangki Septik Komunal (5- 10 KK) Mekarsari Kec. Way Sulan	KK	10	250.000.000	10 KK	250.00 0.000									
		Pembangun an Tangki Septik Komunal (5- 10 KK) Desa Pamulihan Kec. Way Sulan	KK	10	250.000.000	10 KK	250.00 0.000									

				Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Purwodadi Kec. Way Sulan	KK	10	250.000.000	10 KK	250.00 0.000								
				Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat Desa Sinar Rejeki Kec. Jati Agung	KK	10	200.000.000	10 KK	200.00 0.000								
						1.779.3 58.949	1.485.461.500		1.735.4 61.500								
	PROGRAM PENYELEN GGARAAN JALAN	Penyele nggaran Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Way Galih Desa Sidoasri Kec. Candipuro	Unit	1	3.000.000.000	1 Unit	1.000.0 00.000								
				Pembangunan Jembatan Dusun Banyumas Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo	unit	1	1.300.000.000	1 Unit	1.300.0 00.000								
				Penanganan Tanggap Darurat Drainase dan Badan Jalan Desa Suak, Kec. Sidomulyo	Unit	1	300.000.000	1 Unit	300.00 0.000								

					Penanganan Tanggap darurat Drainase ruas jalan Natar-batas Pesawaran kec. Natar	Unit	1	500.000.000	1 Unit	500.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Drainase ruas jalan natar negararatu desa Natar kec. Natar	Unit	1	500.000.000	1 Unit	500.00 0.000								
					Penanganan Tanggap Darurat Gorong2 Ruas Jalan Pamulihan - Karyamulya sari, Kec. Way Sulan	Unit	1	750.000.000	1 Unit	750.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Gorong-gorong dan talud amblas pada Ruas Jalan Karang Turi Margakaya (R.198) Kec. Jati Agung	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Gorong-gorong Dusun Sukamaju B, Desa Sinar Rejeki, Kec. Jati Agung	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								

					Penanganan Tanggap darurat Gorong-gorong Dusun Sumber Bakti, Desa Sinar Rejeki, Kec. Jati agung	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Gorong - gorong Jalan Desa Dusun VII Desa Bali Nuraga, Kec. Way Panji	Unit	1	300.000.000	1 Unit	300.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Gorong - gorong Jalan Desa Kuripan, Kec. Penengahan	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap Darurat Gorong-gorong Jalan Ruas Sukanegara - Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang	Unit	1	300.000.000	1 Unit	300.00 0.000								

					Penanganan Tanggap darurat Gorong - gorong Ruas Jalan Gunung terang - Merak Belantung (KL Tanggap darurat), Kec. Kalianda	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap Darurat Gorong-gorong Ruas Krawangsari - Pancasila Kec. Jati Agung	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap Darurat Gorong-gorong/talud Desa Kelau Kec. Penengahan	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Jembatan Gg pisang dusun Marga jaya desa Talang Jawa kec. Merbau mataram	Unit	1	400.000.000	1 Unit	400.00 0.000								

					Penanganan Tanggap darurat Jembatan Jalan Desa Purwodadi dan Desa Karya Mulya Sari (D.3824), Kec. Way Sulan	Unit	1	1.300.000.000	1 Unit	1.300.000.000								
					Penanganan Tanggap darurat Jembatan Jalan Desa Way Lubuk Link III RT04 Kel. Way Lubuk, Kec. Kalianda	Unit	1	300.000.000	1 Unit	300.000.000								
					Penanganan Tanggap darurat Jembatan Perum Nuwo Sriwijaya Dusun I Desa Hajimena Kec. Natar	Unit	1	400.000.000	1 Unit	400.000.000								
					Penanganan Tanggap darurat Jembatan Ruas Jalan Neglasari - Batu Ampar (R.138), Kec. Merbau Mataram	Unit	1	400.000.000	1 Unit	400.000.000								

					Penanganan Tanggap Darurat jembatan Sidomekar, Desa Sidomekar, Kec. Katibung	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Jembatan Way Kubu Jalan Desa Kertosari Dusun VI RT 003, Kec. Tanjung Sari	Unit	1	600.000.000	1 Unit	600.00 0.000								
					Penanganan Tanggap Darurat Pembangunan Gorong-gorong/talus Desa Merak Belantung Kec. Kalianda	Unit	1	500.000.000	1 Unit	500.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Pengadaan Batu base Jalan Ruas Bandar Agung Kuala Jaya, Kec. Sragi	Unit	1	800.000.000	1 Unit	800.00 0.000								

					Penanganan Tanggap darurat Perbaikan Lantai Jembatan Ruas Jalan Karang Anyar - Krawang Sari, Kec. Jati Agung	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap darurat Rehab Jembatan Perum Sejahtera Dusun II Desa Hajimena Kec. Natar	Unit	1	550.000.000	1 Unit	550.00 0.000								
					Penanganan Tanggap Darurat Talud dan Gorong-gorong Jalan Buring Kec. Penengahan	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000								
					Penanganan Tanggap Darurat Talud Jalan Ruas Bakti Rasa - Gandri Kec. Penengahan	Unit	1	300.000.000	1 Unit	300.00 0.000								
					Pembangunan Jembatan Desa Rejosari Kec Natar	Unit	1	768.000.000	1 Unit	768.00 0.000								

				Pembangunan Jembatan Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang	Unit	1	1.000.000.000	1 Unit	1.000.00.000								
				Pembangunan Jembatan Dusun Banjar Sari Desa Sukanegara Tanjung Bintang	Unit	1	500.000.000	1 Unit	500.00.000								
				Pembangunan Jembatan Dusun IV Damar Berak Desa Bulok Kec. Kalianda	Unit	1	660.000.000	1 Unit	660.00.000								
				Pembangunan Jembatan Dusun Talang Mainal Desa Karang raja Kec. Merbau Mataram	Unit	1	800.000.000	1 Unit	800.00.000								
				Penanganan Tanggap Darurat Gorong-gorong/Box Culvert Ruas Jl. Sidoluhur - Banyumas Ds. Cinta Mulya Kec. Candipuro	Unit	1	150.000.000	1 Unit	150.00.000								

				Penanganan Tanggap darurat Gorong - gorong Desa Trimomukti , Kec. Candipuro	Unit	1	200.000.000	1 Unit	200.00 0.000									
				Penanganan Tanggap darurat Gorong- gorong jalan desa karya tunggal dusun rejosari 3, Kec. Katibung	Unit	1	300.000.000	1 Unit	300.00 0.000									
				Penanganan Tanggap Darurat Jembatan Desa Tajimalela Kec. Kalianda	Unit	1	510.000.000	1 Unit	510.00 0.000									
				Penanganan Tanggap darurat Perbaikan Jembatan Way Buatan Desa Suak, Kec. Sidomulyo	Unit	1	2.200.000.000	1 Unit	2.200.0 00.000									
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Perkerasan Jalan Ruas Jatimulyo - Fajar Baru (R.200) Kecamatan Jati Agung	Km	2.98	2.000.000.000	2.98 Km	2.000.0 00.000									
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Serdang - Jati Indah	Meter	150	177.786.000	150 Meter	177.78 6.000	150 Meter	177.78 6.000	150 Meter	177.78 6.000	150 Meter	177.78 6.000	150 Meter	177.78 6.000	150 Meter	177.78 6.000

				(R. 162) Kec. Tanjung Bintang													
				Pemeliharaan Jalan Ruas Sp. Serdang - Way Galih (R. 167) Kec. Tanjung Bintang	Meter	115	177.786.000	115 Meter	177.78 6.000								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Natar - Negara Ratu Kec. Natar	Meter	150	182.230.650	150 Meter	182.23 0.650								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Palembangan - Lubuk Jukung (R. 082) Kec. Kalianda	Meter	150	155.562.750	150 Meter	155.56 2.750								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Bulok - Sp. Siring Jaha (R.073) Kec. Kalianda dan Kec. Sidomulyo	Meter	120	177.786.000	120 Meter	177.78 6.000								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Purwodadi Simpang Gedung Agung (R. 169) Kec. Tanjung Bintang dan Kec. Jati Agung	M2	420	186.675.300	420 M2	186.67 5.300								

				Pemeliharaan Jalan Ruas Sidodadi Asri - Margo Rejo Kec. Jati Agung	M2	894	397.351.710	894 M2	397.35 1.710								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Sp. Pasuruan Bawah - Klaten (R.045) Kec. Penengahan	M2	700	311.125.500	700 M2	311.12 5.500								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Sp. Sidoarjo - Trimomukti (R.028) Way Panji dan Candipuro	M2	350	155.562.750	350 M2	155.56 2.750								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Sp. Sukamandi - Taman Wisata Belerang (R.063) Kec. Kalianda	M2	150	66.669.750	150 M2	66.669. 750								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Talang Baru - Sidomulyo (R.095) Kec. Sidomulyo	M2	330	146.673.450	330 M2	146.67 3.450								
				Pemeliharaan Jalan Ruas Trimulyo - Jatibaru (R. 114) Kec. Tanjung Bintang	M2	650	288.902.250	652 M2	288.90 2.250								

				Pemeliharaan Jalan Ruas Way Galih - Batas Bandar Lampung (R.168) Kec. Tanjung Bintang	M2	620	275.568.300	620 M2	275.56 8.300								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Candirejo - Rawa Selapan (R. 106) Kec. Candipuro	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Cinta Mulya-Karya Mulia Sari (R. 125) Kec. Candipuro	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Fajar Baru - Simbaringin (R.202) Kec. Jati Agung dan Kec. Natar	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Gedung Wani - Ciptodadi (R. 192) Kec. Jati Agung	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								

				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jati Baru - Talang Jawa Kec. Tanjung Bintang dan Merbau Mataram	M2	674	300.000.000	674 M2	300.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jati mulyo - Batas Bandar Lampung (R. 199) Kec. Jati Agung	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jati Mulyo - Margo Agung (R. 196) Kec. Jati Agung	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Karang Anyar - Krawang Sari (R. 180) Kec. Jati Agung	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Karang Anyar - Margo Rejo (R. 179) Kec. Jati Agung	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								

				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Karya Mulia Sari - Pamulihan (R. 126) Kec. Candipuro	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kertosari - Sp. 4 Kantor Camat Tanjung Sari (R.112) Kec. Tanjung Bintang	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Mujuk Sempurna - Sidowaluyo (R. 085) Kec. Kalianda	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Sidomulyo - Sidoarjo Kec. Sidomulyo	M2	899	400.000.000	899 M2	400.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Sinar Pasmah - Bumi Jaya (R. 105) Kec. Candipuro	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								

				emeliharaan Rutin Jalan Ruas Sp. Blambangan - Sp. Beringin Bawah (R. 057) Kec. Kalianda	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Sp. Cerucuk - Cinta Mulya (R. 121) Kec. Candipuro	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Sp. Gayam - Blambangan (R. 056) Kec. Penengahan	M2	652	250.000.000	652 M2	290.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Sp. Kantor Camat Tanjung Sari - Trimulyo (R.113) Kec. Tanjung Bintang	M2	483	215.000.000	483 M2	215.00 0.000								
				emeliharaan Rutin Jalan Ruas Sp. Lubuk Kamal - Sidomakmur (R. 078) Kec. Kalianda	M2	652	250.000.000	652 M2	290.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Sp. Serdang - Jati Baru	M2	674	300.000.000	674 M2	300.00 0.000								

				Kec. Tanjung Bintang													
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Sp. Way Urang - Sukaratu (R. 067) Kec. Kalianda	M2	449	200.000.000	449 M2	200.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Talang Baru - Sidomulyo Kec. Sidomulyo	M2	899	400.000.000	889 M2	400.00 0.000								
				Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Titi Wangi - Trimomukti (R. 029) Kec. Candipuro	M2	562	250.000.000	562 M2	250.00 0.000								
				Peningkatan Ruas Jalan Bungur Kec. Kalianda	Km	0,23	500.000.000	0.23 Km	500.00 0.000								
			Rekonstruksi Jalan	Pengadaan Tanah Untuk Akses Jalan Menuju Sekolah Rakyat	M2	3000	1.500.000.000	3000 M2	1.500.0 00.000								
				Peningkatan Jalan Ruas Sp. Pasar Suban - Mekar Jaya (Lanjutan)	Km	0.48	1.000.000.000	0.48 Km	1.000.0 00.000								

				Kecamatan Merbau Mataram													
				Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Kantor Camat Rajabasa - Kantor Camat Rajabasa (R.062) Kec. Rajabasa	Km	0.48	1.000.000.000	0.48 Km	1.000.0 00.000								
				Peningkatan Jalan Dusun Titinangi Rt. 002 (TPU Rimba Raya) Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
				Peningkatan Jalan Muria (SMAN Sidomulyo) (D.3031) Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo	Km	0.48	1.000.000.000	0.48 Km	1.000.0 00.000								
				Peningkatan Jl. Abdul Aziz Desa Hajimena Kec. Natar	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
				Peningkatan Jl. Durian 14 G Rt. 26 B Dsn. II D Ds. Jatimulyo	Km	0.09	200.000.000	0.09 Km	200.00 0.000								

				Kec. Jati Agung												
			Peningkatan Jl. Dusun Sindang Sari - Karang Jaya Desa Bakti Rasa Kec. Sragi	Km	0.24	500.000.000	0.24 Km	500.00 0.000								
			Peningkatan Jl. Kyai A. Junaidi (D.3314) Kec. Candipuro	Km	0.24	500.000.000	0.24 Km	500.00 0.000								
			Peningkatan Jl. Menuju Pertanian Modern Desa Trimomukti Kec. Candipuro	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								
			Peningkatan Jl. Satria 3, Jl. Raden Imba dan Jl. Pasar Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan	Km	0.72	1.500.000.000	0.72 Km	1.500.0 00.000								
			Peningkatan Jl. Sidomukti Dusun Sidomukti Desa Muara Putih Kec. Natar	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
			Peningkatan Jl. Tanjung Laut Ds. Fajar Baru	Km	0.24	500.000.000	0.24 Km	500.00 0.000								

			Kec. Jati Agung													
			Peningkatan Jl. Taruna Ds. Candimas Kec. Natar	Km	0.29	600.000.000	0.29 Km	600.00 0.000								
			Peningkatan Jl. Umbul Kelapa Desa Hajimena Kec. Natar	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
			Peningkatan Jl. Walet Desa fajar Baru Kec. Jati Agung	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
			Rekonstruksi Jalan Bandar Agung - Kuala Jaya (R.030) Kecamatan Sragi	Km	2,04	4.200.000.000	2,04 Km	4.200.0 00.000								
			Rekonstruksi Jalan Beringin Kencana - Purwodadi (R.118) Kecamatan Candipuro	Km	2,42	5.000.000.000	2,42 Km	5.000.0 00.000								
			Rekonstruksi Jalan Jati Indah - Purwodadi Dalam (R.163) Kecamatan Tanjung Bintang	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								
			Rekonstruksi Jalan Kali Sari - Krawang	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								

				Sari (R.181) Kec. Natar													
				Rekonstruksi Jalan Karang Pucung - Sumber Agung (R.131) Kecamatan Way Sulan	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.000.000								
				Rekonstruksi Jalan Kemukus - Lebung Nala (R.003) Kecamatan Ketapang	Km	1.31	2.700.000.000	1.31 Km	2.700.000.000								
				Rekonstruksi Jalan Kertosari - Wawasan (R.174) Kecamatan Tanjung Sari	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.000.000								
				Rekonstruksi Jalan Kota Baru - Sinar Rejeki (R.190) Kecamatan Jati Agung	Km	4.37	9.000.000.000	4.37 Km	9.000.000.000								
				Rekonstruksi Jalan Kota Dalam - Budi Daya (R.092) Kecamatan Sidomulyo	Km	0.97	2.000.000.000	0.97 Km	2.000.000.000								

					Rekonstruksi Jalan Lematang - BTS. Kota Bandar Lampung (Perum Permata Biru) (R.166) Kec. Tanjung Bintang	Km	1.21	2.500.000.000	1.21 Km	2.500.000.000								
					Rekonstruksi Jalan Muara Putih - Kali Sari (R.182) Kec. Natar	Km	1.63	3.370.000.000	1.63 Km	3.370.000.000								
					Rekonstruksi Jalan Pasuruan - Gandri (R.034) Kecamatan Penengahan	Km	1.96	4.050.000.000	1.96 Km	4.050.000.000								
					Rekonstruksi Jalan Rejomulyo - Pancasila (R.216) Kecamatan Natar	Km	1.50	3.100.000.000	1.50 Km	3.100.000.000								
					Rekonstruksi Jalan Ruas Karang Sari - Buring (R.012) (Lanjutan) Kecamatan Ketapang	Km	1,08	2.225.000.000	1,08 Km	2.225.000.000								
					Rekonstruksi Jalan Ruas Lebung Sari - Sumber Agung (R.133) Kecamatan Way Sulan	Km	0,48	1.000.000.000	0,48 Km	1.000.000.000								

				Rekonstruksi Jalan Ruas Merak Batin - Batas Pesawaran (R.208) Kecamatan Natar	Km	0,72	1.500.000.000	0,72 Km	1.500.0 00.000								
				Rekonstruksi Jalan Ruas Pamulihan - Batas Lamtim (Ngesti Karya) (R.124) Kec. Way Sulan	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								
				Rekonstruksi Jalan Ruas Pasar Karang Pucung - Batas Lampung Timur (Karang Anom) (R.120) (Lanjutan) Kecamatan Way Sulan	Km	0,72	1.500.000.000	0,72 Km	1.500.0 00.000								
				Rekonstruksi Jalan Ruas Sukamaju - Batas Lampung Timur (Jaya Asri) (R.191) Kec. Jati Agung	Km	0,72	1.500.000.000	0,72 Km	1.500.0 00.000								
				Rekonstruksi Jalan Sinar Rejeki - Sidoharjo (R.189) Kecamatan Jati Agung	Km	0,97	2.000.000.000	0,97 Km	2.000.0 00.000								

					Rekonstruksi Jalan Sp. Sidoarjo - Trimomukti (R.028) Kecamatan Way Panji	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								
					Rekonstruksi Jalan Sukabanjar - Suak (R.089) Kecamatan Sidomulyo	Km	2.42	5.000.000.000	2.42 Km	5.000.0 00.000								
					Rekonstruksi Jalan Tanjungan - Neglasari (R.136) Kecamatan Katibung	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								
					Rekonstruksi Jalan Tanjung Sari - Muji Mulyo (R.213) Kecamatan Natar	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								
					Rekonstruksi Jalan Way Gelam - Balinuraga (R.103) Kecamatan Way Panji	Km	1.45	3.000.000.000	1.45 Km	3.000.0 00.000								
					Rekontstruksi Ruas Jalan Way Bakak - Toto Harjo (R. 002) Kecamatan Penengahan	Km	0.58	1.200.000.000	0.58 Km	1.200.0 00.000								

				Peningkata n Jalan Airan 1 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung	Km	0.34	700.000.000	0.34 Km	700.00 0.000								
				Rekonstruk si Jalan Ruas Natar - Batas Pesawaran (R.207) Kecamatan Natar	Km	1.12	1.500.000.000	1.12 Km	1.500.0 00.000								
				Rekonstruk si Jalan Ruas Kenyayan - Kws. Wisata Tanjung Tua (R.001) Kecamatan Bakauheni	Km	2.20	3.000.000.000	2.20 Km	3.000.0 00.000								
				Rekonstruk si Jalan Ruas Krawangan Sari - Pancasila (R.217) Kecamatan Natar	Km	1.49	2.000.000.000	1.49 Km	2.000.0 00.000								
				Rekonstruk si Jalan Ruas Kuripan - Klaten (R.044) Kecamatan Penengahan	Km	1.10	1.500.000.000	1.10 Km	1.500.0 00.000								
				Rekonstruk si Jalan Ruas Legundi - Ruguk (R.006) Kecamatan Ketapang	Km	1.83	2.500.000.000	1.83 Km	2.500.0 00.000								

					Rekonstruksi Ruas Jalan Merak Batin - Batas Bandar Lampung (R.205) (Lanjutan) Kecamatan Natar	Km	0.74	1.000.000.000	0.74 Km	1.000.000.000								
					Peningkatan Jalan Permata Raya Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung (Lanjutan) Kecamatan Jati Agung	Km	0.24	500.000.000	0.24 Km	500.000.000								
					Peningkatan Jl. Dara Putih (D.10900) Desa Kuripan Kec. Penengahan	Km	0.29	600.000.000	0.29 Km	600.000.000								
					Rekonstruksi Jalan Bumi Daya - Bumirestu - Trimomukti (R. 051) Kec. Palas	Km	6.14	12.655.000.000	6.14 Km	12.655.000.000								
					Rekonstruksi Jalan Pardasuka - Suban (R.140) Kecamatan Katibung dan Merbau Mataram	Km	3.88	8.000.000.000	3.88 Km	8.000.000.000								

				Rekonstruksi Jalan Ruas Kalisari - Muji Mulyo (R.215) Kecamatan Natar	Km	1.19	2.500.000.000	1.19 Km	2.500.0 00.000								
				Peningkatan Jl. Asem Bagus Desa Kali Asin Kec. Tanjung Bintang	Km	0.48	1.000.000.000	0.48 Km	1.000.0 00.000								
				Peningkatan Jl. Pengayoman Kel. Way Urang Kec. Kalianda	Km	0.48	1.000.000.000	0.48 Km	1.000.0 00.000								
				Rekonstruksi Jalan Babatan - Umbul Bayur (R.127) Kec. Katibung	Km	0.97	2.000.000.000	0.97 Km	2.000.0 00.000								
				Rekonstruksi Jalan Kali Asin - Umbul Merbau (R.157) Kec. Tanjung Bintang dan Merbau Mataram	Km	0.87	1.800.000.000	0.87 Km	1.800.0 00.000								
				Rekonstruksi Jalan Panca Tunggal - Triharjo (R.149) Kecamatan Merbau Mataram	Km	1.43	3.000.000.000	1.43 Km	3.000.0 00.000								

					Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Ruas Sukamarga - Bulok (R 072) Kecamatan Kalianda	Km	3.84	11.190.000.000	3.84 Km	11.190.000.000								
					Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Ruas Way Harong - Sp. Sidoarjo (R.027) Kecamatan Kalianda	Km	1.37	4.000.000.000	1.37 Km	4.000.000.000								
					Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Ruas Sp. Tugu Radin Intan-Exit Tol Kalianda (R.077) Kecamatan Kalianda	Km	6.30	18.351.000.000	6.30 Km	18.351.000.000								

					Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Talang Jawa - Neglasari (R. 137) (Lanjutan) Kec. Merbau Mataram dan Katibung	Km	1,07	1.440.000.000	1,07 Km	1.440.0 00.000								
					Peningkatan Jalan Desa Haduyang Kec. Natar	Km	0,34	700.000.000	0,34 Km	700.00 0.000								
					Peningkatan Jalan Dusun 001 - 002 Desa Kota Guring Kec. Rajabasa	Km	2,05	200.000.000	2,05 Km	200.00 0.000								
					Peningkatan Jalan Dusun 01, 03, 04 Desa Palas Pasemah Kec. Palas	Km	0,48	1.000.000.000	0,48 Km	1.000.0 00.000								
					Peningkatan jalan Dusun IV Desa Jati Mulyo kec. Jati Agung	Km	0,29	600.000.000	0,29 Km	600.00 0.000								
					Peningkatan jalan Dusun Kenihai Desa Agom Kec. Kalianda	Km	0,09	200.000.000	0,09 Km	200.00 0.000								
					Peningkatan Jalan Dusun Spontan RT.02	Km	0,19	400.000.000	0,19 Km	400.00 0.000								

			RW.03 Desa Rejomulyo Kec. Palas													
			Peningkatan Jalan Dusun Taman Sari Desa Taman Sari Kec. Ketapang	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
			Peningkatan Jalan Eko Sumarli Desa Sukapura Kec. Sragi	Km	0.14	300.000.000	0.14 Km	300.00 0.000								
			Peningkatan Jalan Hendro Suratmin Dusun 3 Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
			Peningkatan Jalan Lettu Rochani Gg. Kapelom Kel. Kedaton Kec. Kalianda	Km	0.09	200.000.000	0.09 Km	200.00 0.000								
			Peningkatan Jalan Lingkar Dusun I, III Desa Banding Kec. Rajabasa	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								

				Peningkata n Jalan lingkungan Dusun I, II, IV Desa Way Muli Kec. Rajabasa	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
				Peningkata n Jalan Lingkungan Gg. PLN Dusun 2 Sindang Sari Kec. Natar	Km	0.09	200.000.000	0.09 Km	200.00 0.000								
				Peningkata n Jalan Lingkungan Jl. Raden Saleh Kec. Candipuro	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
				Peningkata n Jalan menuju Resi Gudang Dusun 4 Desa Titiwangi Kec. Candipuro	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
				Peningkata n Jalan Perjuangan 1 Dusun 3b Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
				eningkatan Jalan Sunan Ampel Dusun Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								

				Peningkata n jalan Tmg. Mangku Bumi dan Lingkar Masjid Desa Buah Berak Kec. Kalianda	Km	0.09	200.000.000	0.09 Km	200.00 0.000								
				Peningkata n Jalan Usaha II Dusun Pati Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Ruas Sp. Kenahat - Sekurip (R.042)(Des a Suka Bakti) Kec. Palas	Km	0.34	700.000.000	0.34 Km	700.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Ruas Tridarma Yoga - Pepandu (Ruguk) (R.009) Kec. Ketapang	Km	0.34	700.000.000	0.34 Km	700.00 0.000								
				Rekonstruksi Jalan Ruas Kunjir - Cugung - Batu Balak (R.061) Kec. Rajabasa	Km	0.27	558.883.988	0.27 Km	558.88 3.988								
				Rekonstruksi Jalan Ruas Mandah - Rulung Raya (R.221) Kec. Natar	Km	0.48	1.000.000.000	0.48 Km	1.000.0 00.000								

				Pembangunan Jalan Dusun 2 Desa Banjar Agung Kec. Jati Agung	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Pembangunan Jalan Way Tutung Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Peningkatan Jalan Dusun 10 - Dusun 8 Desa Natar Kec. Natar	Km	0.09	200.000.000	0.09 Km	200.00 0.000								
				Peningkatan jalan Dusun 3 Banyuwangi Desa Sidowaluyo Kec. Sidomulyo	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Peningkatan Jalan Dusun Sukabangu (penghubungan RT 02 - 01) Desa Sukamulya Kec. Palas	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Peningkatan Jalan Kenanga 2 (D.7831) (Bawah Fly Over Natar) Kec. Natar	Km	0.14	300.000.000	0.14 Km	300.00 0.000								
				Peningkatan Jalan Lingkungan SDN3 Titiwangi - Jalan	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								

				Lingkar Kecamatan Candipuro													
				Peningkata n Jalan menuju SMPN 3 Tanjung Bintang Kec. Tanjung Bintang	Km	0.14	300.000.000	0.14 Km	300.00 0.000								
				Peningkata n Jalan Pemuda Desa Sukapura Kec. Sragi	Km	0.09	200.000.000	0.09 Km	200.00 0.000								
				Peningkata n Jalan Pertanian Kedaung Barat Kec. Sragi	Km	0.09	200.000.000	0.09 Km	200.00 0.000								
				eningkatan Jalan Ruas Way Sari - Tanjung Sari (R.230) Kecamatan Natar	Km	0.34	700.000.000	0.34 Km	700.00 0.000								
				Peningkata n Jalan Umbul Sukiar Dusun Spontan Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo	Km	0.14	300.000.000	0.14 Km	300.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Ahmad Suparno Desa Bangun	Km	0.14	300.000.000	0.14 Km	300.00 0.000								

				Rejo Kec. Ketapang													
				Peningkata n Jl. Cut Nyak Din Dusun 3 Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro	Km	0.14	300.000.000	0.14 Km	300.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Dahlia Dusun 1 - SMAN 1 Natar Kec. Natar	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				peningkatan Jl. Dsn Rajawali RT.001 - Dsn Suka Makmur RT.003 Desa Mekar Mulya Kec. Palas	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Dusun 03 Regah Lada Desa Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa	Km	0.37	776.000.000	0.37 Km	776.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Dusun 1 Kalidamar Desa Sidorejo kec. Sidomulyo	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Dusun 3 Kampung Sawah Desa Sukaratu	Km	0.19	400.000.000	0.19 Km	400.00 0.000								

			Kec. Kalianda													
			Peningkata n Jl. Dusun II Pematang Desa Pematang Kec. Kalianda	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
			Peningkata n Jl. Dusun V (Umbul Asem/Umb ul Jakarta) Desa Kertosari Kec. Tanjung Sari	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
			Peningkata n Jl. Lingkungan Cipta Rasa Desa Bhakti Rasa (D.2129) Kec. Sragi	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
			Peningkata n Jl. Ogan Jaya Desa Talang Jawa kec. Merbau Mataram	Km	0.14	300.000.000	0.14 Km	300.00 0.000								
			Peningkata n Jl. Pendidikan Dsn. Karang Endah - Dsn. Karang Tani Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								

				Peningkata n Jl. Ruas Tanjungan - Sumber Agung (R.135) (Jl. Raden Awas) Kec. Katibung	Km	0.35	736.000.000	0.35 Km	736.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Sangon Ratu (D.5364) Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung	Km	0.27	568.000.000	0.27 Km	568.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Saudara Dusun Marga Kaca Desa Pemanggila n Kec. Natar	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Peningkata n Jl. Sri Basuki Desa Ruguk Kec. Ketapang	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				eningkatan Ruas Jalan Legundi - Ketapang (R.007) Kec. Ketapang	Km	0.13	288.000.000	0.13 Km	288.00 0.000								
				Rekonstruk si Jalan Ruas Banjar Negeri - Mandah (R.227) Kec. Natar	Km	0.72	1.500.000.000	0.72 Km	1.500.0 00.000								
				Rekonstruk si Jalan Ruas Sp. Babatan - Rejosari	Km	1.11	2.300.000.000	1.11 Km	2.300.0 00.000								

			(R.091) Kecamatan Katibung													
			Rekonstruksi Ruas Jalan Kalirejo - Marga Catur (R.055) Kec. Kalianda	Km	0.72	1.500.000.000	0.72 Km	1.500.0 00.000								
		Rehabilitasi Jembatan	Pembangunan Box Culver Perum Hartono Kel. Way Urang Kec. Kalianda	Meter	0.64	200.000.000	0.64 Meter	200.00 0.000								
			Rehabilitasi Jembatan Ruas Jl. Sri Pendowo - Sumber Wangi Kecamatan Ketapang	Meter	1.30	1.300.000.000	1.30 Meter	1.300.0 00.000								
			Pembangunan Box Culver Ruas Jalan Tanjungan - Negla Sari Kec. Katibung	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								
			Pembangunan Box Culver Ruas Jalan Trans Tanjung - Rejo Agung Kec. Katibung	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								

				Pembangunan Box Culvert Desa Trans Tanjungan Kec. Katibung	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								
				embangunan Box Culvert Ruas Jalan Cinta Mulya - Karya Mulya Sari Kec. Candipuro	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								
				Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Karya Mulya Sari - Sp. Pamulihan Kec. Candipuro	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								
				Pembangunan Gorong - Gorong Dusun Banjar Sari Desa Seloretno Kec. Sidomulyo	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								
				Pembangunan Gorong - Gorong Lk. 05 Sukajadi Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								
				Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Way Sari - Sri Rejo Kecamatan Natar	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								

					Rehabilitasi Jembatan Ruas Jl. Margo Lestari - Sukamaju (Jbt. Way Semumbo) Kecamatan Jati Agung	M2	0.96	300.000.000	0.96 M2	300.00 0.000								
					Rehabilitasi Jembatan Ruas Jl. Rejomulyo - Bandar Rejo (Jbt Way Rejomulyo) Kecamatan Jati Agung	M2	0.80	250.000.000	0.80 M2	250.00 0.000								
					Rehabilitasi Jembatan Ruas Jl. Sukamaju - Sidoharjo (Jbt. Way Cadas) Kecamatan Jati Agung	M2	0.64	200.000.000	0.64 M2	200.00 0.000								
			Rehabilitasi Jalan		Rehabilitasi Jalan Ruas Trans Tanjungan - Batu Liman (R. 128) Kecamatan Katibung	Km	0.70	1.000.000.000	0.70 Meter	1.000.0 00.000								
					Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Polsek Sidomulyo - Tanjung Mukti Kec. Sidomulyo dan Kec. Katibung	Km	1,05	1.500.000.000	1,05 Meter	1.500.0 00.000								

1 6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Keliling Jemput Bola (PAKDE) Pelayanan Administrasi kependudukan DI Desa (Meminimalisir Pengeluaran /Cost dalam mengurus dokumen Kependudukan ke Kabupaten)	Masyarakat di desa dengan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan rendah	10.500 Dokumen	369.250.000	12.000 dokumen	206.45 4.300	15.000 dokumen	213.23 0.800	20.000 dokumen	223.58 2.000	25.000 dokumen	231.02 5.610	175.00 0 dokumen	238.83 4.500
					Pelayanan Yanduksatiantas (Pelayanan Adinistrasi Kependudukan bagi orang sakit, lansia dan disabilitas)	Masyarakat dengan kondisi sakit, lansia dan penyandang disabilitas yang belum memiliki Dokumen Kependudukan	250 Dokumen	39.600.000	300 dokumen	54.880.000	350 dokumen	56.681.000	400 dokumen	59.432.000	450 dokumen	61.411.000	500 dokumen	63.487.000
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Keliling Jemput Bola (PAKDE) Pelayanan Administrasi kependudukan DI Desa (Meminimalisir Pencatatan	Masyarakat di desa dengan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan	2.500 Dokumen	48.624.600	3.000 Dokumen	77.874.000	3.500 Dokumen	81.369.100	4.000 Dokumen	85.293.950	4.500 Dokumen	88.130.000	5.000 Dokumen	91.104.400

					Pengeluaran /Cost dalam mengurus dokumen Akta Pencatatan Sipil	Sipil rendah												
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi bagi Desa untuk siap melaksanakan Adminduk Di Desa	Desa yang siap melaksanakan Pelayanan Admin duk di Desa	160 Desa	106.952.700	170 Desa	110.000.000	200 Desa	113.000.000	230 Desa	116.699.000	245 Desa	120.199.000	260 Desa	123.804.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta APBDEsa Perubahan (memaksimalkan penggunaan Anggaran Desa yang tepat sasaran, efektif dan efisien serta meminimalisir penyimpangan penggunaan Anggaran Desa).				256 Dokumen APBDesa dan 256 Dokumen APBDesa Perubah an	327.600.000	256 Dokumen APBDesa dan 256 Dokumen APBDesa Perubah an	343.980.000	256 Dokumen APBDesa dan 256 Dokumen APBDesa Perubah an	361.179.000	256 Dokumen APBDesa dan 256 Dokumen APBDesa Perubah an	379.237.950	256 Dokumen APBDesa dan 256 Dokumen APBDesa Perubah an	398.199.848

1 8	BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH	Program Koordinasi dan sinkronisas i perencanaaa n pembangu nan daerah	koordin asi perenc anaan bidang pemer intahan dan pemb angan manusi a	koordinas i pelaksana an sinergatis dan harmonis asi perencan aan pembang unan daerah bidang pemerinta han	koordinasi dalam pelaksanaa n kegiatan penanggula ngan kemiskinan	Seluru h OPD, pihak luar dan masyar akat lampu ng selatan	3 Dokum en	408.830.000	3 Dokum en	408.83 0.000	3 Dokum en	429.27 1.500	3 Dokum en	429.27 1.500	3 Dokum en	429.27 1.500	3 Dokum en	450.73 5.075
--------	---	--	--	---	---	--	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

BAB V

LOKASI PRIORITAS

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis data kemiskinan, telah diidentifikasi sebanyak 35 desa yang tersebar di 7 kecamatan sebagai lokus prioritas penanggulangan kemiskinan. Wilayah-wilayah ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun dari segi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta kesempatan ekonomi yang terbatas.

Penetapan lokus ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, agar sumber daya yang tersedia dapat difokuskan pada wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan. Dengan pendekatan spasial yang berbasis data ini, diharapkan intervensi pembangunan tidak lagi bersifat umum, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan spesifik masyarakat miskin di masing-masing desa dan kecamatan.

Lebih lanjut, pemasaran program pada lokus kemiskinan ini juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip *targeting* dalam perencanaan pembangunan, yakni memastikan bahwa setiap program dan kegiatan—baik yang bersifat peningkatan kapasitas ekonomi, penyediaan layanan dasar, maupun perlindungan sosial—dapat menjangkau masyarakat yang paling terdampak secara langsung. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini akan berfokus pada penanganan kemiskinan di 35 desa dan 7 kecamatan tersebut, dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Tabel 5.1 Lokus Prioritas Pengapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Dimensi Aksesibilitas, Infrastruktur, Pelayanan Dasar, Dan Kesulitan Geografis

NO	Kecamatan	Jumlah Desil 1 Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Desil 1 Desa/Kelurah an
1	TANJUNG BINTANG	11.888	SABAH BALAU	1.232
			SUKANEGERA	1.222
			KALI ASIN	1.150
			SERDANG	1.123
			BUDI LESTAR	1.041
2	MERBAU MATARAM	11.455	MEKAR JAYA	2.757
			BARU RANJI	1.634
			MERBAU MATARAM	1.197
			SUBAN	1.139
			TANJUNG BARU	1.100
3	NATAR	25.207	MERAK BATIN	3.229
			NEGARA RATU	2.681
			BRANTI RAYA	2.517
			KALI SARI	2.384
			NATAR	1.666
4	JATI AGUNG	17.453	JATI MULYO	3.524
			KARANG ANYAR	1.930
			WAY HUI	1.780
			SINAR REJEKI	1.384
			SIDODADI ASRI	1.270
5	KATIBUNG	12.234	PARDASUKA	2.685
			TANJUNGAN	2.143
			TANJUNG RATU	1.236
			TANJUNG AGUNG	1.144
			BABATAN	900
6	SIDOMULYO	9.181	BANDAR DALAM	1.891
			SIDODADI	1.080
			SIDOREJO	984
			SUKA BANJAR	817
			SIDOMULYO	675
7	KALIANDA	12.542	PALEMBAPANG	1.206
			TAJIMALELA	951
			KALIANDA	927
			WAY URANG	893
			BULOK	775

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2030 merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis dan kebijakan, tetapi juga menjadi cerminan dari semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun daerah yang lebih adil dan sejahtera. Kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan dalam RPKD ini dirancang secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kemiskinan dan pendekatan lintas sektor yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Selama periode 2025–2030, Pemerintah Daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan melalui penguatan kapasitas rumah tangga miskin dan rentan, peningkatan kualitas layanan dasar, penciptaan kesempatan kerja produktif, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan program akan terus didasarkan pada data yang akurat, pendekatan partisipatif, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan pelaksanaan RPKD ini tentunya tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah semata, tetapi juga pada dukungan dan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, sinergi dan koordinasi lintas sektor, mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota, harus senantiasa diperkuat.

Akhir kata, semoga dokumen RPKD 2025–2030 ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mewujudkan masyarakat daerah yang mandiri, berdaya, dan sejahtera. Semoga ikhtiar bersama ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,

khususnya mereka yang selama ini hidup dalam kondisi serba terbatas dan memerlukan uluran tangan dari semua pihak.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) TAHUN 2025-2029



**TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH (TKPKD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Jalan Mustafa Kemal No. 1 Telephone/Faximile
(0727) 322 177
Kalianda - Lampung Selatan**